

# **MAKALAH**

## **KAJIAN PERCEPATAN EKONOMI DAN AKSES KEUANGAN DAERAH 2019**



**OLEH**

**DR. HERI NUGRAHA, SE. M.SI**

**INSTITUT MANAJEMEN**

**KOPERASI INDONESIA**

**2019**



**IKOPIN**



IKOPIN

**KAJIAN PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH 2019**

Oleh: Dr. Heri Nugraha, SE. M.Si.

didokumentasikan  
Pasa Perpustakaan IKOPIN Sebagai Bahan Bacaan Mahasiswa  
Program S1 dan D3



**IKOPIN**  
**INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA**  
**2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT serta mengucapkan syukur kepada Nya atas segala limpahan karuniaNya kami diberi kekuatan untuk menyusun Kajian yang berjudul “Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Garut 2019”.

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk Menjadi sumber informasi dan data yang bermanfaat guna pembuatan kebijakan atau program peningkatan inklusi keuangan daerah, Mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah masing-masing, Menyediakan model yang dapat dijadikan acuan bagi tiap daerah dalam mengimplementasikan program peningkatan akses keuangan daerah. Kami memiliki harapan yang sangat besar bahwa kajian ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi para pembaca untuk memperluas wawasan mengenai potensi dan akses keuangan daerah di Kabupaten Garut.

Kami sangat menyadari bahwa kajian ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Oleh karena itu, berbagai bentuk kritikan dan juga saran yang membantun akan sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan kajian ini.

Bandung, April 2019

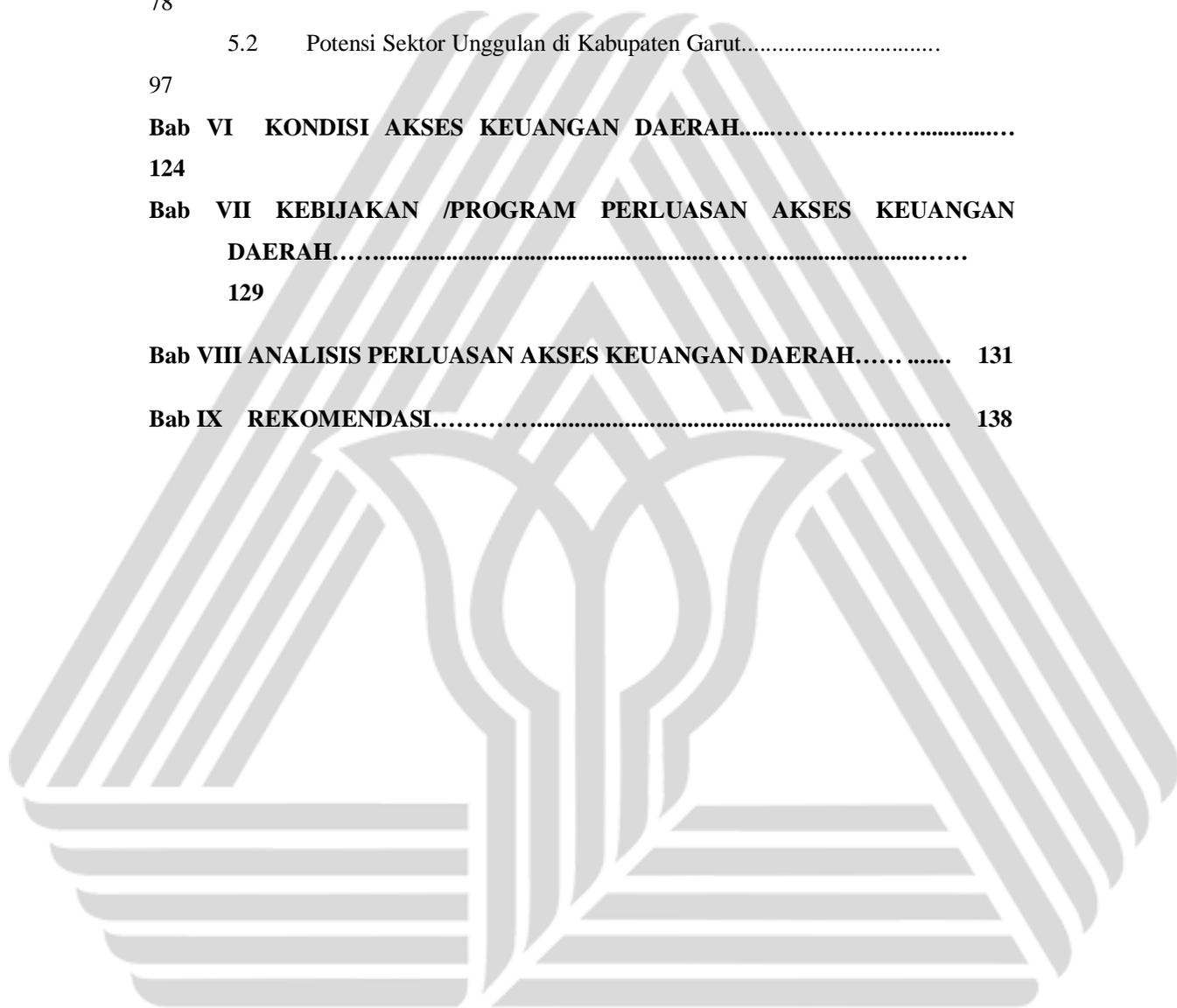
Tim Penyusun

# IKOPIN

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii-iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv-vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Sitematika Penulisan .....	2
<b>BAB II PENDEKATAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pendekatan Ekonomi.....	10
2.1.1 Ekonomi Makro .....	11
2.1.2 Ekonomi Pembangunan .....	22
2.1.3 Ekonomi Regional .....	25
2.2 Pendekatan Keuangan Inklusif .....	30
<b>BAB III METODOLOGI.....</b>	<b>41</b>
3.1 Pemilihan Lokus Penelitian dan Teknik Sampling .....	41
3.2 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kondisi Geografis dan Demografis.....	51
4.2 Indikator Ekonomi.....	61
<b>Bab V POTENSI EKONOMI UNGGULAN DAERAH.....</b>	<b>78</b>

5.1	Gambaran Sembilan Sektor Ekonomi Kabupaten Garut .....	
78		
5.2	Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Garut.....	
97		
<b>Bab VI</b>	<b>KONDISI AKSES KEUANGAN DAERAH.....</b>	
124		
<b>Bab VII</b>	<b>KEBIJAKAN /PROGRAM PERLUASAN AKSES KEUANGAN DAERAH.....</b>	
129		
<b>Bab VIII</b>	<b>ANALISIS PERLUASAN AKSES KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>131</b>
<b>Bab IX</b>	<b>REKOMENDASI.....</b>	<b>138</b>



IKOPIN

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Pelaksanaan kajian dan analisis data.....	8
Statistik geografi dan Iklim Kabupaten Garut.....	53
Luas Lahan menurut fungsi Kabupaten Garut.....	54-55
Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Garut.....	55-56
Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Garut.....	56-57
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Garut.....	58-59
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Garut.....	60-61
Kontribusi Kategori terhadap PDRB.....	63-64
Kontribusi Kategori terhadap PDRB.....	67
Status Pekerjaan Utama penduduk Kabupaten Garut dengan usia 15 Tahun ke atas.....	71
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Garut.....	72
Pencari kerja yang mendaftar di Kabupaten Garut.....	73
PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2013-2016 (Milyar Rupiah).....	85-87
Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Garut Tahun 2013-2016.....	91-92
Rincian Rencana Kawasan Budidaya pertanian.....	98
Jumlah Usaha Tanaman Holtikultura di Kabupaten Garut.....	99
Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan Kabupaten Garut.....	100
Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan Kabupaten Garut.....	100
Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Bukan Ikan Hias Menurut Jenisnya Kabupaten Garut.....	10
1Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan Di Kabupaten Garut.....	101-102

Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis Tanaman dan Keterangan Penjualan Hasil Usaha.....	102
Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Sektor Pertanian Tahun 2016 – 2017 .....	105
Posisi Pinjaman Yang diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR.....	105
Data Jumlah Hotel di Wilayah Kabupaten Garut.....	117
Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Garut.....	117
Posisi Pinjaman Yang diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR.....	117
Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2016 – 2017.....	122-123
Jumlah Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Kabupaten Garut.....	124
Jumlah Perkembangan Agen di Kabupaten Garut.....	125
Komposisi Dana Pihak Ketiga.....	125
Penyaluran Kredit.....	125
Rasio jumlah penduduk terhadap akses LJK.....	126
Rekapitulasi Jumlah Nasabah BSA Laku Pandai.....	126
Rekapitulasi Outstanding Nominal BSU Laku Pandai.....	127
Rekapitulasi Perkembangan Aset perbankan.....	127
Kualitas.....	146

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Locational triangle dari Weber.....	29
Kondisi Fisik Geografis Wilayah Kabupaten Garut.....	52
Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Garut.....	63
Trend PDRB Per Kapita Kabupaten Garut Tahun 2013-2017.....	64
Pertumbuhan IPM Kabupaten Garut.....	65
Capaian IPM Kabupaten Garut dan Jawa Barat 2012-2017.....	66
Perkembangan Pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Garut.....	69
Perkembangan Struktur Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Garut.....	69
Struktur pengeluaran Non Makanan per Bulan penduduk di Garut.....	70
Persentase Tenaga Kerja Menurut Sektor Kabupaten Garut.....	72
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan sektor di Kabupaten Garut.....	105
Trend Penciptaan NTB Perdagangan di Garut Tahun 2012-2017.....	116
Statistik Usaha Perdagangan Formal dan Pasar.....	116
Branchless Banking.....	135
Pemanfatan Produk Perbankan.....	144
Alasan Nasabah Bank Tidak Datang ke Bank Untuk Bertransaksi.....	145
Activity Branchless Banking Model.....	149
Road Map Pengembangan Perluasan Akses Keuangan Daerah.....	150



IKOPIN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Perpres 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target indeks inklusi keuangan Indonesia pada akhir tahun 2019 ditargetkan mencapai 75%. Namun demikian, berdasarkan data Global Findex 2017, indeks inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 48,9%, sehingga masih terdapat selisih 26,1% atau diperlukan sekitar +54 juta rekening baru untuk mencapai target 75% pada tahun 2019. Untuk mendukung pencapaian indeks inklusi keuangan tersebut, OJK telah menetapkan Inisiatif Strategis 8 (IS-8) tahun 2019 dengan tema Percepatan Akses Keuangan. Salah satu deliverable pada IS-8 tersebut adalah penyusunan kajian potensi ekonomi unggulan atau sektor prioritas. Kajian ini diharapkan dapat mengakomodasi potensi ekonomi unggulan maupun sektor prioritas untuk kemudian memberikan gambaran dan informasi bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, regulator, lembaga jasa keuangan (LJK), pelaku bisnis, akademisi, hingga masyarakat terhadap kebutuhan spesifik atas sektor jasa keuangan di masing-masing daerah. Kajian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan maupun program dalam memperluas akses keuangan di daerah. Dengan mengacu pada terdapatnya potensi ekonomi unggulan maupun sektor prioritas yang unik di masing-masing daerah beserta tantangan yang dihadapi, Kajian Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah (KPAKD) dipandang perlu dilakukan pada tingkat provinsi/kota/ kabupaten agar hasil kajian ini dapat efektif dan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari pembentukan kajian ini, antara lain:

- a. Menjadi sumber informasi dan data yang bermanfaat guna pembuatan kebijakan atau program peningkatan inklusi keuangan daerah.
- b. Mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah masing-masing.
- c. Menyediakan model yang dapat dijadikan acuan bagi tiap daerah dalam mengimplementasikan program peningkatan akses keuangan daerah.

## **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan kajian potensi dan akses keuangan daerah adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

### **Bab II Pendekatan Teoritis**

#### 2.1 Pendekatan Ekonomi

##### 2.1.1 Ekonomi Makro

##### 2.2.2 Ekonomi Pembangunan

##### 2.3.3 Ekonomi Regional

#### 2.2 Pendekatan Inklusi Keuangan

### **Bab III Metodologi**

#### 3.1 Pemilihan locus penelitian dan Teknik Sampling

#### 3.2 Teknik Analisis Data

### **Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Garut:**

#### 4.1 Kondisi geografis dan demografis.

#### 4.2 Indikator ekonomi.

### **Bab V Potensi Ekonomi Unggulan Daerah**

#### 5.1 Gambaran Sembilan Sektor Ekonomi Kabupaten Garut

#### 5.2 Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Garut

### **Bab VI Kondisi Akses Keuangan Daerah**

### **Bab VII Kebijakan/ program Perluasan Akses Keuangan Daerah**

## **Bab VIII Analisis Perluasan Akses Keuangan Daerah**

### **Bab IX Rekomendasi**

Terkait kajian penyusunan kajian Potensi dan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Garut terdapat sejumlah pendekatan yang digunakan, yaitu:

1) Pendekatan Kondisi Obyektif

Merupakan pendekatan yang berbasis kondisi eksisting fakta lapangan dari tentang kondisi potensi ekonomi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut.

2) Pendekatan Kajian Teori dan Empiris

Merupakan pendekatan yang menggunakan kajian teori dan studi empiris (terdahulu) tentang database perekonomian.

- ✓ Analisis menggunakan pendekatan kajian teori yaitu melakukan analisis dengan mendasarkan pada rujukan teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait tema dimaksud.
- ✓ Analisis menggunakan pendekatan studi empiris yaitu melakukan analisis dengan mendasarkan pada kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tema dimaksud, yang disesuaikan dengan konteks Kabupaten Garut.

3) Pendekatan Survey Lapangan

Pendekatan survey data lapangan dimaksudkan melakukan observasi secara langsung ke wilayah studi dengan cara menggali informasi yang utuh di lapangan tentang data dan informasi mengenai kajian Potensi dan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Garut dilakukan dengan menggunakan metode uji petik.

4) Kajian Teoritis yang digunakan

Landasan teoritis yang digunakan dalam kajian ini dengan menggunakan analisis SWOT, yakni proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan

strategi organisasi dengan tepat. Analisis dilakukan berdasarkan logika yang bisa mengoptimalkan kekuatan atau Strengths serta peluang atau Opportunities. Tapi secara beriringan, analisis ini juga harus bisa meminimalkan ancaman atau Threats dan kelemahan atau Weaknesses. Proses dalam pengambilan keputusan strategis diketahui memang selalu berhubungan langsung dengan kebijakan perusahaan, strategi, tujuan dan pengembangan misi. Artinya, perencana strategis harus menganalisa berbagai faktor strategis organisasi atau perusahaan mulai dari kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan. Tidak mengherankan jika analisa swot juga disebut dengan nama Analisis Situasi. Daerah penelitian adalah wilayah di Kabupaten Garut. Jenis data dan informasi terdiri dari :

- a. Data Primer,  
yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicermati atau dicatat untuk pertama kali oleh si peneliti sendiri. Umar Husein (2000: 130) menjelaskan data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari nara sumber/responden terkait.
- b. Data Sekunder,  
yaitu data yang bukan diperoleh sendiri oleh peneliti. Menurut Umar Husein (2000: 130) data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data ini diperoleh dengan mengambil data yang telah tersedia oleh pihak-pihak lain berupa laporan-laporan, informasi dari dokumen, publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Dalam kajian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/

instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.

Adapun data yang diperlukan terkait data primer yaitu

- ✓ RPJP dan RPJM Kabupaten Garut
- ✓ Kondisi UMKM Kabupaten Garut
- ✓ Penyerapan kredit di wilayah Kabupaten Garut, meliputi kondisi NPL di Kabupaten Garut
  
- ✓ Kondisi Perbankan, Industri keuangan Non-Bank dan Pasar Modal Di Kabupaten Garut, meliputi : jumlah kantor, agen, ATM dll untuk bank maupun lembaga non bank

Adapun dalam tahap pengumpulan data lapangan juga di gunakan pendekatan dengan metoda wawancara, FGD dan *indepth* survey. Selanjutnya dalam tahap analisis data dan perumusan hasil digunakan pendekatan *scientific problem solving*. Metodologi survey dan pengumpulan data mencakup kegiatan survai lapangan dan survey instansional yang berlokasi di Kabupaten Garut.

Adapun tahapan kegiatan survey dan pengumpulan data adalah sebagaimana tersaji dalam berikut. tahapan survey dan pengumpulan data secara umum terbagi dalam dua kegiatan yaitu (1) survey lapangan; dan (2). Survey instansional. Survey lapangan dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara terstruktur berupa *kuesioner untuk responden* maupun *wawancara bebas (in depth) kepada* narasumber terkait. Dokumen yang ada di instansi pemerintah untuk kebutuhan penyusunan kajian Potensi dan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Garut.

Dalam kajian ini akan digunakan 2 (dua) metode teknik analisis data, meliputi:

- a. Analisis Deskriptif

Merupakan analisis bersifat uraian atau penjelasan dengan membuat tabel-tabel, grafik-grafik, bagan, mengelompokkan, menganalisa data berdasarkan pada hasil jawaban kuisisioner yang diperoleh dari tanggapan responden dengan menggunakan tabulasi data.

b. Metode Kuantitatif

Analisis dengan mengolah data dari hasil kajian yang telah dinyatakan dalam satuan angka untuk dianalisis dengan perhitungan statistik terhadap variabel obyek yang diteliti. Dalam kajian ini alat analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, perbandingan rasio, analisis pertumbuhan (*growth*), analisis share (kontribusi), dari masing-masing objek data yang berasal dari hasil data di lapangan.

Pelaksanaan kajian dan analisis data dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

✓ Tahap Persiapan

Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan kajian, meliputi mobilisasi personel dan penyusunan rencana kerja. Mobilisasi personel mencakup pembagian tupoksi kerja dan tanggungjawab masing-masing disetiap kegiatan kajian. Dalam proses ini juga mencakup diskusi-diskusi (*focus group discussion*), baik antara intern pelaksana maupun dengan pihak pekerjaan, terkait instrumen survey dan output yang akan dicapai.

✓ Pelaksana survey dan pengumpulan data

Pelaksanaan survey dengan menggunakan instrument yang telah disusun, dilakukan melalui survey lapangan maupun survey institusional terhadap nara sumber yang telah ditetapkan bersama, sesuai dengan substansi pekerjaan. Data yang terkumpul disusun dan diberi penomoran agar memudahkan dalam pelaksanaan input dan tabulasi data.

✓ Input data dan analisis data

Setelah data hasil survey terkumpul, selanjutnya pada tahapan ini akan dilakukan input data dan pembuatan tabulasi

data dari survey lapangan, serta melakukan review dokumen hasil kegiatan survey instansional. Apabila tahapan ini telah selesai, terhadap data tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan teknik kuantitatif, supaya data tersebut dapat memaknai, dianalisis dan dapat diinterpretasi, sehingga menghasilkan informasi yang dengan mudah dapat dibaca dan dimengerti oleh semua pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

✓ Konsultasi dan Diskusi-diskusi

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan komprehensif, dilakukan konsultasi dan diskusi-diskusi dengan pemberi kerja maupun *stakeholders* lainnya yang terkait. Hal ini menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan guna memberikan nilai tambah tertentu atas hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.

✓ Menyusun Laporan Kajian

Setelah semua data terkumpul dan dilakukan berbagai *treatment* terhadap data, selanjutnya tim konsultan menyiapkan dan menyusun laporan hasil kajian sebagaimana yang diminta oleh pemberi kerja

Jangka waktu yang diperlukan untuk kegiatan menurut kerangka acuan pekerjaan adalah 1 (satu) bulan kalender kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPK). Dalam kurun waktu pelaksanaan tersebut diperlukan tahapan pekerjaan secara umum yang secara garis besar akan terbagi sebagai berikut :

IKOPIN

No	Kegiatan	Minggu ke 1	Minggu Ke 2	Minggu ke 3	Minggu Ke 4
<b>1.</b>	<b>Tahap Persiapan</b>				
	• Rapat-rapat persiapan yang mencakup rapat koordinasi dengan instansi terkait				
	• Penyusunan alat instrumen kerja dan lainnya sebagai alat penunjang untuk menghimpun data				
	• Koordinasi dengan Tim Teknis				
<b>2.</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>				
	• Inventarisasi data dan identifikasi kebijakan mekanisme pencatatan transaksi simpan pinjam. Kegiatan ini di dilakukan pada lokasi studi				
	• Pengolahan data dan informasi				
	• Penyusunan laporan pedoman teknis				
<b>3.</b>	<b>Tahapan Penyusunan Laporan</b>				
	• Penyusunan Laporan Akhir				
	• Penyerahan Laporan Akhir				

### **Rencana Teknis Pelaksanaan Di Lapangan**

#### 1) Tahap Persiapan

Di dalam tahap persiapan akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Rapat-rapat persiapan yang mencakup rapat koordinasi dengan instansi terkait Penyusunan pedoman
- b. Penyusunan alat instrumen kerja dan lainnya sebagai alat penunjang untuk menghimpun data
- c. Koordinasi dengan Tim Teknis

2) Tahap Pelaksanaan

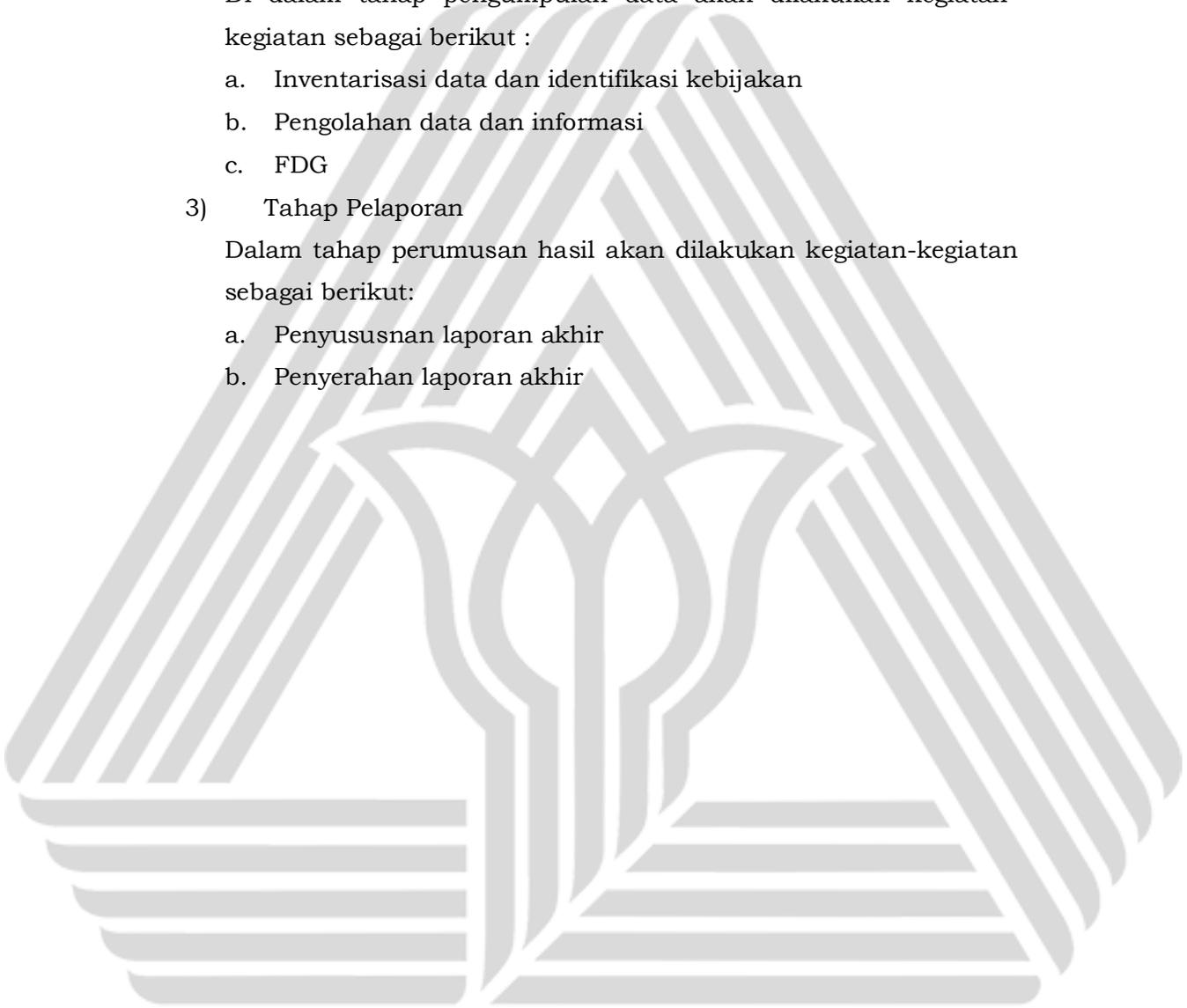
Di dalam tahap pengumpulan data akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi data dan identifikasi kebijakan
- b. Pengolahan data dan informasi
- c. FDG

3) Tahap Pelaporan

Dalam tahap perumusan hasil akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan laporan akhir
- b. Penyerahan laporan akhir



IKOPIN

# BAB II

## PENDEKATAN TEORITIS

### 2.1 Pendekatan Ekonomi

Kata Ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani “Oikos atau Oiku” dan “Nomos” yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain ekonomi adalah semua yang menyangkut dengan peraturan dalam rumah tangga (Putong, 2013:271). Menurut P.A Samuelson ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Adam Smith mengatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Mill J.S Ekonomi mengatakan ilmu Ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Lebih lanjut Abraham Maslow mengatakan Ilmu Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomiyang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu sosial, Karena manusia dan perilaku akan kebutuhannya yang menjadi objek penelitiannya. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan

tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.

Ilmu ekonomi terbagi dalam dua bagian besar yaitu Ilmu Ekonomi Mikro dan Ilmu Ekonomi Makro. Manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi menurut Mankiw (2013) adalah:

1. Ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik.
2. Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau lihai dalam perekonomian.
3. Dengan menguasai ilmu ekonomi maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi.
4. Bila kita dapat memahami dan mahir dalam perekonomian lalu paham dengan potensi serta keterbatasannya maka kita akan sangat paham bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang baik dimana setiap pilihan menentukan tujuan.

### **2.1.1 Ekonomi Makro**

Teori Ekonomi Makro adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan secara agregatif. Peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah tersebut di antaranya berupa tingkat pendapatan/produksi nasional, kesempatan kerja (pengangguran) dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian. Makro Ekonomi menurut Muana Nanga merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku dari perekonomian atau tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan (aggregate), termasuk di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian atau kegiatan ekonomi agregat tersebut. (Nanga,2001:1). Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah makroekonomi yang penting (major macroeconomic issues) dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi didalam kehidupan sehari-hari (Dornbusch and Fischer,

1994:3) Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian hubungan-hubungan kausal yang ingin dipelajari oleh ilmu ekonomi makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara variabel-variabel ekonomi agregatif. Menurut Putong (2013:273) ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro lebih terfokus pada perilaku ekonomi secara keseluruhan, seperti total output suatu produk dan jasa, tingkat inflasi dan pengangguran, dan tingkat nilai tukar. Menurut Mankiw (2006:2) makro ekonomi adalah sebuah studi tentang perekonomian secara menyeluruh, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pertumbuhan pendapatan, kemiskinan, inflasi, kestabilan harga, resesi, depresi, pengangguran dan lainnya. Makro ekonomi melihat pasar secara luas bagaimana suatu barang dijual. Ekonomi makro fokus kepada perilaku dan politik yang mempengaruhi konsumsi dan investasi, tentang nilai tukar rupiah, kebijakan fiskal dan moneter, tingkat suku bunga, dan hutang negara. Hubungan yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif (keseluruhan). Diantara variabel-variabel yang dimaksud antara lain adalah tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi nasional (pemerintah maupun swasta), tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga-harga umum, neraca pembayaran (ekspor dan impor) dan lainnya (Putong, 2013:8). Diantara variabel-variabel ekonomi agregatif yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro antara lain : tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, hutang pemerintah (Soediyono, 1981:2).

Makroekonomi sangat penting bagi para pembuat kebijakan (policymakers), karena beberapa alasan sebagai berikut (Hall and Taylor, 1993:5):

- a) Makroekonomi dapat membantu para pembuat kebijakan (policy makers) untuk menentukan apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu memecahkan resesi yang dihadapi suatu perekonomian
- b) Makroekonomi dapat pula membantu para pembuat kebijakan melalui berbagai pilihan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- c) Makroekonomi dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mempertahankan agar inflasi tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil tanpa menyebabkan perekonomian mengalami ketidakstabilan dalam jangka pendek
- d) Makroekonomi juga dapat menjelaskan kepada kita bagaimana perubahan dalam suatu kebijakan itu mempengaruhi jenis-jenis barang yang dihasilkan dalam perekonomian.

Sebagai suatu cabang dari ilmu ekonomi yang berdiri sendiri, makroekonomi mempunyai tugas untuk menjelaskan mengenai (Parkin and Bade, 1992:2-4):

- a) Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk nasional bruto (GNP) atau produk domestik bruto (GDP) di dalam suatu negara yang merupakan ukuran dari kemampuan suatu perekonomian di dalam memproduksi barang dan jasa, dan sekaligus juga menjadi ukuran standar hidup dan pertumbuhan pendapatan riil penduduk
- b) Sebab-sebab timbulnya pengangguran dan bagaimana cara untuk mengatasinya
- c) Sebab-sebab timbulnya inflasi dan cara-cara untuk mengatasinya
- d) Sebab-sebab naiknya turunnya tingkat suku bunga di dalam perekonomian
- d) Sebab-sebab terjadinya ketidakseimbangan (defisit dan surplus) di dalam neraca pembayaran

- e) Faktor-faktor penyebab fluktuasi nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing

Dari uraian di atas maka dapat dibayangkan betapa luasnya hal-hal yang dipelajari dalam Teori Ekonomi Makro. Untuk mempermudah dalam mengamati bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, masyarakat suatu perekonomian dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Sektor perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi dari sektor rumah tangga dan sektor rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga dan petindak memerlukan barang-barang dan jasa-jasa yang akan digunakan untuk keperluan konsumsi yang dihasilkan oleh sektor yang lain. Kemudian pemerintah juga mengkonsumsi dan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa dari dan untuk sektor lain.

Ekonomi makro memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh dari kegiatan ekonomi. Apabila yang dibicarakan adalah produsen maka yang diperhatikan adalah mengenai produsen dalam keseluruhan ekonomi. Apabila yang diperhatikan adalah tingkah laku konsumen maka yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam analisis makroekonomi juga diperhatikan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Dalam aspek ini yang diperhatikan adalah tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi keseluruhan perekonomian seperti masalah inflasi dan pengangguran.

Teori ekonomi makro didominasi oleh dua mashab besar yaitu :

1. Mashab Klasik Pelopor utama mashab klasik adalah Adam Smith dan David Ricardo.

Sumber utama bahasan dan analisisnya berasal dari buku yang ditulis oleh Adam Smith yang berjudul "*An Inquiry into*

*the Nature and Cause of the Wealth of Nation* biasanya disingkat dengan *The Wealth of Nations*” yang umumnya berisikan tentang bagaimana mengelola perekonomian suatu negara dengan cara bersaing bebas tanpa campur tangan pemerintah, adanya pembagian kerja, dan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien. Mashab klasik melalui Adam Smith memiliki semboyan dalam perokonomian yaitu “*Laissez faire-Laissez fases*” yang menyatakan bahwa setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun (dalam batas tertentu). Sehingga perekonomian diarahkan pada kebebasan individu untuk memnuhi kebutuhannya.

Kaum klasik beranggapan bahwa dengan diberikannya kebebasan kepada individu untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi maka mereka akan bisa mencapai kemakmurannya. Peranan pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin sebab apa yang dikerjakan oleh pemerintah bisa dikerjakan oleh pihak swasta bahkan lebih efisien.

Dengan demikian kegiatan pemerintah hanya diprioritaskan pada bidang yang tidak bisa digeluti oleh pihak swasta. Kaum klasik juga beranggapan bahwa dalam perekonomian tidak akan terjadi kekurangan permintaan, sehingga pada akhirnya penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai (tidak ada pengangguran). Hal ini didasarkan pada Hukum Say yaitu “*Supply Creates its own demand* atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri”. Dengan adanya kepastian bahwa berapa banyak pun jumlah dan jenis barang yang diproduksi maka pasar akan mampu menyerapnya sehingga membawa ekonomi klasik beranggapan bahwa dalam perekonomian tidak akan ada pengangguran seandainya adapun penyebabnya adalah kekakuan perekonomian dan kejadiannya pun tidak berlangsung lama.

## 2. Mashab Keynesan

Pada aliran Keynesian termasuk percaya bahwa perekonomian liberal lebih mengandalkan pemilik modal adalah pemicu kemajuan ekonomi tetapi mereka juga percaya bahwa konsep kapitalisme memiliki kelemahan karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah bukan sekedar sebagai penjaga malam melainkan juga ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dan benar melalui kebijakan ekonomi.

Ilmu ekonomi makro adalah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan/totalitas(agregat) atau dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu serta masalah-masalah yang dihadapinya. Istilah agregat yaitu menonjolkan variabel yang menjadi pusat perhatian dari ekonomi makro adalah variabel-variabel ekonomi secara totalis seperti pendapatan nasional, konsumsi nasional, tabungan, investasi, pengangguran, inflasi. Sehingga variabel-variabel ekonomi keberadaannya sangat kompleks.

Secara umum hubungan antar variabel ilmu ekonomi terdiri dari 4 tipe yaitu:

1. Hubungan perilaku, merupakan gambaran hubungan satu variabel atau beberapa variabel. Contoh : bentuk formal hubungan antar jumlah konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan (Y) maka dapat ditulis

$$C = a + cY$$

2. Hubungan identitas, yang merupakan hubungan defesional yang tepat sama antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lain Contoh :  $GDP = C + I + G + (X - M)$

3. Hubungan teknologi, menggambarkan hubungan antara variabel yang disebabkan oleh sifat fisik dari variabel tersebut Contoh : reaksi biaya total karena merupakan jumlah output yang diproduksi
4. Hubungan kelembagaan, yaitu hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga

Ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan secara agregatif. Peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah tersebut di antaranya berupa tingkat pendapatan/produksi nasional, kesempatan kerja (pengangguran) dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian

#### 1. Masalah jangka pendek atau stabilisasi

##### a. Inflasi

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

##### b. Pengangguran

Pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Selain itu pengangguran bisa saja terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi namun adanya kesenjangan informasi dan keahlian yang diinginkan.

##### c. Ketimpangan dalam neraca pembayaran

Neraca pembayaran yang timpang adalah kesenjangan antara jumlah perolehan dari ekspor dengan

pembayaran untuk impor. Bila impor terlalu besar maka devisa akan semakin berkurang, nilai tukar mata uang lokal relatif akan jatuh, industri dalam negeri berbasis impor akan banyak yang mati. Sedangkan bila ekspor terlalu besar maka nilai mata uang local akan menguat terhadap mata uang luar negeri dan akan berdampak pada semakin naiknya impor yang akan menyebabkan matinya industri yang berbasis bahan baku dalam negeri.

## 2. Masalah jangka panjang atau pertumbuhan

### a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti dengan produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki citra dan mutu hidup. Akan tetapi masalahnya adalah tanah tidaklah bertambah dan bila eksploitasi berjalan terus menerus tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tahan maka akan secara cepat pula kemampuannya menurun dan bila diteruskan akan berdampak pada bencana evolutif. Untuk menghindari hal ini maka pemerintah menjalankan program kependudukan untuk mengatur jumlah kelahiran agar daya dukung ekonomi tetap dapat seirama dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

### b. Peningkatan kapasitas produksi

Peningkatan kapasitas produksi berkaitan erat dengan tingkat investasi dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat, sedangkan tingkat

tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Jadi apabila kapasitas produksi ditingkatkan maka tabungan haruslah juga ditingkatkan agar investasi dapat pula ditingkatkan.

Kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh setiap negara secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah dan swasta dimana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Tujuan-tujuan kebijakan tersebut adalah :

1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi

Dalam kondisi yang ideal tidak adanya pengangguran sangat diharapkan tetapi pada kenyataannya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun selalu ada dan banyak, dan situasinya memang tidak dapat dihilangkan. Yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat (full employment) yaitu dimana semua lapangan pekerjaan yang disediakan baik oleh pemerintah atau swasta terisi penuh oleh para pencari kerja.

2. Kapasitas produksi nasional yang tinggi

Usaha peningkatan kapasitas produksi merupakan suatu keharusan yaitu dengan cara melakukan investasi di segala bidang yang sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan yang tepat. Tinggi rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi sedangkan investasi dalam negeri tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri dan suku bunga, tingkat tabungan dalam negeri tergantung dari tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Sehingga untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri maka peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat dan

mengembangkan teknologi (pemberdayaan sumber daya)

3. Tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Tidak ada ukuran standar mengenai bagaimana tingkat pendapatan suatu negara akan dicapai. Akan tetapi berdasarkan perbandingan pada negara lain dapat diketahui apakah pendapatan suatu negara lebih besar ataukah lebih kecil daripada negara lain. Membandingkan tingkat pendapatan nasional suatu negara dengan negara lain adalah ukuran relatif sedangkan untuk mendapatkan gambaran absolut adalah dengan membandingkan pendapatan perkapita suatu negara dengan negara lain. Tingkat pendapatan perkapita adalah perbandingan antara pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disebabkan tingginya pendapatan nasional yang relatif, melainkan seberapa besar produktivitas penduduk suatu negara mampu meningkatkan pendapatannya secara kumulatif.

4. Keadaan perekonomian yang stabil

Kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan terutama kestabilan pada tingkat harga-harga barang secara umum. Dalam pengertian yang lebih realistis perekonomian yang stabil bukanlah berarti suatu perekonomian yang kondisinya selalu mengalami masa-masa booming terus menerus tetapi suatu kondisi yang fluktuasi variabel ekonomi terutama harga-harga komoditi secara umum dan

tingkat pendapatan bergerak/berubah dalam kondisi yang wajar.

5. Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang

Neraca pembayaran adalah ikhtisar sistematis dari semua transaksi ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam uang. Dari segi tinjauan ekonomi murni neraca pembayaran yang surplus dan defisit umumnya tidak diinginkan oleh pemerintah suatu negara. Neraca pembayaran yang surplus menyebabkan penawaran devisa lebih banyak di dalam negeri yang relatif akan menyebabkan nilai tukar mata uang lokal di dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga nilai impor akan semakin murah dan ini akan berdampak matinya industri di dalam negeri, dan dalam jangka menengah justru akan menguras devisa kembali. Sedangkan bila neraca pembayaran defisit berarti jumlah penawaran devisa di dalam negeri semakin sedikit dan ini akan berdampak pada semakin turunnya nilai mata uang lokal terhadap devisa tersebut sehingga nilai import akan semakin mahal apabila hal ini terjadi maka industri di dalam negeri yang berbasiskan impor akan mengalami kesulitan dan akibatnya harga komoditi impor tersebut dijual dengan harga yang lebih mahal dan tingkat inflasi akan meningkat.

6. Distribusi pendapatan yang merata

Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif lebih baik. Pada muaranya diharapkan akan terjadi kehidupan yang tidak bertendensi pada keresahan dan kerusakan sosial. Beberapa cara yang digunakan untuk menghitung dan menentukan tingkat distribusi

pendapatan dalam masyarakat adalah indeks Gini atau koefisien Gini atau gini Ratio yang merupakan kesimpulan matematis dari studi empiris Lorenz yang terkenal dengan kurva Lorenz sehubungan dengan distribusi pendapatan tersebut. Gini koefisien adalah suatu peralatan analisis yang dipergunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Sedangkan kurva Lorenz adalah suatu kurva yang menunjukkan ukuran distribusi pendapatan dengan penilaian merata, sedang, dan timpang

### **2.1.2 Ekonomi Pembangunan**

Secara umum, ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Menurut Lincoln Arsyad, ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu ekonomi yang harus dipelajari untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi saat ini, yang dihadapi dan ditemukan di negara-negara sedang berkembang.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan transisi di seluruh dunia. Khususnya, negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara-negara transisi di Eropa. Secara umum, ekonomi

pembangunan memiliki fungsi dalam menciptakan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara sedang berkembang. Ekonomi pembangunan berfungsi sebagai ilmu dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara berkembang di dunia.

Jika dianalisis satu per satu, beberapa fungsi ekonomi pembangunan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan GDP  
Dengan memahami dan mengaplikasikan dengan baik ilmu dari ekonomi pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja juga akan meningkat yang akan memengaruhi tingkat pendapatan nasional.
- b) Menurunkan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan  
Karena adanya penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Akibatnya, pengangguran dan tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.
- c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Dengan mengaplikasikan ekonomi pembangunan, pendidikan masyarakat juga dapat meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan dan kemampuan ekonomi merupakan faktor dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d) Terbentuknya Faktor Modal  
Memahami dan mengaplikasikan ekonomi pembangunan dengan baik tentunya pembangunan ekonomi negara pasti berkembang. Pembangunan ekonomi yang berjalan lancar dan terus berkembang akan membuat masyarakat memikirkan hal selain kebutuhan pokok dan mulai menginvestasikan modalnya pada sektor ekonomi.
- e) Mendatangkan Bantuan dari Dalam dan Luar Negeri

Sebuah negara bisa mendapatkan bantuan dana jika memiliki kemampuan ekonomi yang bagus atau dengan kata lain memiliki pembangunan ekonomi yang lancar dan terus berkembang. Pembangunan ekonomi yang pesat bisa mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

Pembahasan dalam ekonomi pembangunan mencakup definisi ekonomi pembangunan, teori-teori pembangunan ekonomi, dan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pembangunan negara-negara berkembang. Masalah tersebut akan dipisahkan berdasarkan perspektif ekonomi mikro dan ekonomi makro. Beberapa cakupan bahasan ekonomi pembangunan di antaranya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Kemiskinan
3. Pembentukan modal
4. Pengerahan tabungan
5. Bantuan luar negeri (investasi)

Tujuan analisis ekonomi pembangunan :

1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan.
2. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan.
3. Mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan.

Bidang-bidang penting yang dianalisis dalam Ekonomi Pembangunan :

1. Masalah pembentukan modal (investasi)
2. Masalah perdagangan luar negeri (ekspor & impor)
3. Masalah pengerahan tabungan.
4. Masalah bantuan luar negeri

5. Masalah dalam sektor pertanian atau industri
6. Masalah pendidikan dan peranannya dalam menciptakan pembangunan.

### **2.1.3 Ekonomi Regional**

Ilmu ekonomi regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya bereaksi atas kegiatan tersebut. Ilmu bumi ekonomi menggarap kegiatan itu secara individual, yaitu mempelajari dampak satu atau kelompok kegiatan di satu lokasi terhadap kegiatan lain di lokasi lain, atau bagaimana kinerja kegiatan di lokasi itu sebagai akibat dekat atau jauhnya lokasi itu dari lokasi kegiatan lain, tetapi lokasi tersebut saling berhubungan atau berinteraksi.

Ilmu ekonomi regional (IER) menurut Robinson Tarigan (2005) adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang unsur perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah yang lain. IER merupakan bagian baru dari ilmu ekonomi. IER ada karena untuk menyelesaikan masalah khusus terkait pertanyaan di mana yang biasanya dikesampingkan dalam analisis cabang ilmu ekonomi lain. Tujuan yang paling utama dari IER adalah untuk menjelaskan diwilayah mana sebaiknya suatu kegiatan itu dilakukan dan mengapa harus dilakukan pada daerah itu. IER disini hanya akan memeberikan arahan batas wilayah. Tujuan IER sebenarnya hampir sama dengan tujuan dari cabang imu ekonomi pada umumnya.

Ferguson (1965) menejelaskan ada beberapa tujuan dari kebijakan ekonomi antara lain: full employment, economic growth dan price tability. Maka dari itu, Tarigan (2005) mengemukakan tujuan dari masing-masing IER yakni:

1. Terciptanya full employment atau sekurang-kurangnya dapat mengurangi tingkat pengangguran yang menjadi salah satu tujuan dari berbagai pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
2. Adanya economic growth (pertumbuhan ekonomi), yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan terutama untuk angkatan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan adanya peningkatan pendapatan.
3. Menciptakan price stability (stabilitas harga), adanya stabilitas harga akan memberikan rasa aman pada masyarakat tanpa harus takut harga akan tiba-tiba melonjak. Ketika harga tidak stabil, maka masyarakat akan merasa tidak tenang, karena mereka akan berfikir apakah simpanan atau tabungan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan dikemudian hari.

Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi lain yang terakhir berkembang adalah ilmu ekonomi lingkungan sebagai pecahan dari ilmu ekonomi regional. Pemikiran ke arah ekonomi regional secara sepotong-sepotong dicetuskan oleh Von Thunen (1826), Weber (1929), Ohlin (1939) dan Losch (1939). Namun secara umum Walter Isard adalah orang pertama yang dianggap dapat memberwujudkan atas ilmu ekonomi regional, IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di Universitas Harvard yang berjudul Location and Space Economics (1956).

Walter Isard adalah orang yang pertama memberikan kerangka landasan tentang apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam regional science, yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Sejarah Perkembangan Regional Science Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, di masa lalu ada teori-teori yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi regional yang tertuang secara berserakan pada berbagai tulisan. Dalam hal ini, antara lain model lokasi berbagai jenis usaha dari Von Thunen (1826) model lokasi dari Weber (1929), teori Central Places dari Christaller (1933), dan teori lokasi ekonomi dari Losch (1939). Di antara keempat teori tersebut, di dalam studi ekonomi, hanya teori Weber yang agak banyak dikenal. Regional Science mencakup beberapa bidang ilmu, seperti ekonomi regional, ilmu bumi ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu hukum.

Dalam pertumbuhannya, terutama karena didesak oleh kebutuhan, materi dari regional science banyak dibahas dalam perencanaan perkotaan dan perencanaan pembangunan daerah. Di dalam perencanaan daerah selalu muncul permasalahan tentang memilih lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan akan dibangun di masa mendatang. Karena tidak adanya pedoman atau buku referensi yang dapat dipakai, penentuan lokasi sering dilakukan atas dasar musyawarah dari orang-orang yang memiliki berbagai keahlian/kepentingan dalam suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah (pedesaan dan perkotaan).

Teori lokasi menurut (Tarigan, 2005) adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Adapun faktor-faktor yang menentukan lokasi industri menurut Djodipuro (1992) sebagai berikut :

1. Faktor endowment.
2. Pasar dan harga.
3. Bahan baku dan energi.
4. Aglomerasi, keterkaitan antar industri dan penghematan ekstern.
5. Kebijakan pemerintah
6. Biaya angkutan.

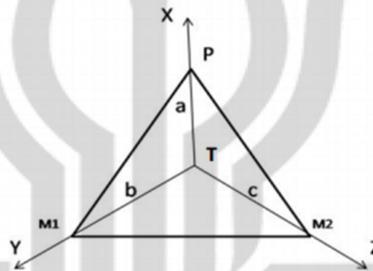
Menurut Hamzah (1997) menyatakan fungsi utama dari teori lokasi adalah untuk menjelaskan bagaimana berbagai aktivitas ekonomi saling berkaitan di dalam ruang geografi. Tapi teori pada umumnya menyatakan bahwa teori lokasi lebih menekankan pada lokasi dari industri, dimana semakin dekat lokasi industri, maka akan semakin kecil harga satuan angkutan untuk industri tersebut. Teori lokasi Industri dikemukakan oleh Alfred Weber, dalam bukunya yang berjudul *Uber den Standort der Industrien* (1909) yang kemudian dialihbahasakan oleh J.C. Friedrich menjadi Alfred Weber's *Theory of Location of Industries* (1929). Menurut teori Weber pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya. Weber menyatakan 'bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum'.

Isi pokok Teori Weber adalah memilih lokasi industri yang biayanya paling minimal (prinsip *least cost location*) dan untuk mendapatkan enam pra-kondisi tersebut perlu diasumsikan :

1. Wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduk (berkaitan dengan keterampilan)
2. Sumber daya atau bahan mentah yang terdapat di tempat tertentu saja
3. Upah buruh yang telah baku, artinya sama dimanau juga.

4. Biaya transportasi yang tergantung dari bobot bahan mentah yang diangkut dan dipindahkan
5. Terdapat kompetisi antar industri
6. Manusia berfikir rasional

Menurut Weber, teori lokasi berorientasi kepada tempat lokasi mengalami perkembangan pesat sehingga dijabarkan sebagai berikut : 1. Lokasi Perusahaan satu Bahan Baku dan Satu Pasar 2. Lokasi Industri Dua Bahan Baku dan Satu Pasar Weber memberikan contoh 3 arah sebagai berikut. Konsep ini dinyatakan sebagai segitiga lokasi atau locational triangle seperti dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Locational triangle dari Weber

Dimana : T = Lokasi optimum  
M1 dan M2 = Sumber bahan baku  
P = Pasar  
X, Y, Z = bobot input dan output  
a, b, c = Jarak lokasi input dan output

Pada gambar di atas dimisalkan ada dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda, yaitu M1 dan M2 dan pasar berada pada arah yang lain. Dengan demikian, terdapat 3 arah lokasi sehingga ongkos angkut termurah adalah pada pertemuan dari 3 arah tersebut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lokasi optimum adalah titik T. Untuk

menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM) sebagai berikut :

$$IM = \frac{\text{Bobot Bahan Mentah}}{\text{Bobot Bahan jadi}}$$

Apabila  $IM > 1$ , perusahaan akan berlokasi dekat ke bahan baku dan apabila  $IM < 1$ , perusahaan akan berlokasi dekat ke pasar. (Tarigan, 2005). Namun model Weber masih memiliki kelemahan yang kemudian dikembangkan oleh Hoover (1948), terutama asumsi biaya dengan membedakan antara biaya transportasi (distribusi dan perantara) dengan biaya produksi. Biaya transportasi yang tidak proporsional dengan jarak. Serta faktor kebijakan pemerintah lokal seperti besarnya pajak lokal dan ketentuan lainnya sangat menentukan lokasi. (Tarigan, 2005).

## **2.2 Pendekatan Keuangan Inklusif**

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju. Walau mereka tergolong *in the bottom of the pyramid* serta tidak mempunyai tabungan (*saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak produktif (*holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran inipun adakalanya mereka lupa. Dengan menguangkan *holding* diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan dibina.

Bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*in the bottom of the pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*middle and high income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas. Dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan. Mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka.

*Financial inclusion* (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. *Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat. Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial Inclusion sebagai :

*“The proportion of individuals and firms that use financial service has become a subject of considerable interest among policy makers, researchers and other stakeholders.”*

financial inclusion merupakan suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi. Definisi lain terkait *financial inclusion* menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam supartoyo dan kasmiati (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk

harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan. Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (*financial service deepening*) yang ditujukan kepada *masyarakat in the bottom of the pyramid* untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek Strategi keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi. Sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas OJK, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas.

Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan *financial inclusion* mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa Negara-negara dengan populasi penduduk yang besar, belum mempunyai akses yang luas terhadap sektor formal

lembaga keuangan dan juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, *financial inclusion* hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi *financial inclusion*.

Partisipasi lembaga keuangan dalam pengembangan *financial inclusion* secara tepat adalah dengan mengembangkan program yang tidak hanya mengandalkan usaha pada penghimpunan dana tabungan atau kredit dengan bunga ringan, tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga dengan akses kredit yang lebih luas bagi keluarga miskin. *Financial Inclusion* ini bukan sekedar institusi perbankan, bukan sekedar mendapatkan kredit. Tetapi lebih kepada bagaimana mereka yang tidak pernah menabung, tidak pernah menggunakan fasilitas kredit diberikan kesempatan untuk menabung dan mendapat kredit sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang pro rakyat. Untuk mewujudkan inklusif keuangan tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Kegiatan keuangan inklusif diharapkan dapat mendukung stabilitas keuangan yang menjadi landasan pokok bagi pembangunan ekonomi yang kokoh. Dari sisi makro, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan, serta dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Visi nasional *Financial Inclusion* dirumuskan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Tujuan *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
2. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
4. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
5. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
6. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan.

Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya.

Sasaran Umum Keuangan Inklusif Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menysasar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Pengelompokan kategori miskin:

1. Termiskin dari yang miskin Penduduk miskin yang tidak memiliki sumber pendapatan karena berbagai faktor seperti sakit, cacat fisik sehingga tidak memiliki pendapatan.
2. Miskin berpendapatan rendah Mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Termasuk kelompok miskin yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sangat terbatas dan bersifat tidak tetap atau musiman yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian atau sektor-sektor lainnya yang bersifat padat karya.
3. Miskin bekerja Kelompok penduduk miskin yang berpenghasilan relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan bekerja di sektor informal.
4. Bukan miskin Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi criteria untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan miskin bekerja.
5. Pekerja migrant domestik dan intenasional Indonesia merupakan Negara penerima remitansi ketiga terbesar di wilayah asia-pasifik. Sekitar 80 persen pekerja migran atau

lazim disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di sektor informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di daerah pedesaan dengan tingkat pendapatan rendah.

6. Perempuan Di banyak Negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap jasa keuangan. Sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan keuangan adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda.
7. Penduduk daerah terpencil Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal di daerah pedesaan. Angka-angka ini ditambah dengan kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk member perhatian khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa keuangan untuk kategori ini

sebagian dapat diatasi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kerangka keuangan inklusif Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai berikut:

1) Edukasi keuangan

Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal.

Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi:

- a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan,
- b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan,
- c) perlindungan nasabah,
- d) ketrampilan mengelola keuangan.

2) Fasilitas keuangan publik.

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:

- a) subsidi dan bantuan sosial,
- b) pemberdayaan masyarakat,
- c) pemberdayaan UMKM

3) Pemetaan informasi keuangan.

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil.

Inisiatif pilar ini meliputi:

- a) peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis,
- b) sistem jaminan alternatif,

- c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana,
- d) identifikasi nasabah potensial.

4) Kebijakan atau peraturan yang mendukung.

Pilar ini mengacu pada kebutuhan untuk menambah atau memodifikasi peraturan, baik oleh pemerintah atau OJK, untuk meningkatkan akses akan jasa keuangan. Pilar ini meliputi beberapa aspek:

- a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional,
- d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan,
- e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan,
- f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

5) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi.

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi:

- a) fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetri,

- b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha,
  - c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
- 6) Perlindungan konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang ada pada pilar ini meliputi:
- a) transparansi produk,
  - b) penanganan keluhan nasabah,
  - c) mediasi,
  - d) edukasi konsumen.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah Negara dalam mengembangkan keuangan inklusif adalah:

- 1) Ketersediaan / akses:  
mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.
- 2) Penggunaan:  
mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (a.l. keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan).
- 3) Kualitas:  
mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 4) Kesejahteraan:

mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa.

Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh kementerian/instansi terkait dalam rangka implementasi strategi nasional keuangan inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen dari berbagai kementerian/instansi terkait untuk secara aktif berupaya mengimplementasikan rencana-rencana masa depan serta program-program yang berkaitan dengan strategi nasional keuangan inklusif diantaranya:

1. Peran keuangan inklusif sangat penting untuk pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan.
2. Penerapan SNKI memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri.
3. Proses implementasi dan pemantauan strategi nasional keuangan inklusif akan terbagi dalam
  - a. Inventarisasi ketersediaan data dan diagnose kondisi saat ini
  - b. Penentu target dan tujuan yang tercantum dalam indikator kinerja utama
  - c. Peran sektor publik dan swasta,
  - d. Pemantauan kemajuan kegiatan
4. Kepemimpinan diperlukan untuk mengkoordinasikan tindakan dan mempertahankan dorongan serta momentum untuk reformasi.

# IKOPIN

## BAB III

# Metodologi

### 3.1 Pemilihan Lokus Penelitian dan Teknik Sampling

Kabupaten Garut secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sekitar 3.065,19 Km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak diantara 6° 57'34" – 7° 44'57" Lintang Selatan dan 107°24'3" – 108°24'34" Bujur Timur dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit -bukit dan pegunungan. Kondisi alam daerah sebelah Selatan, sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam. Corak alam di daerah sebelah Selatan ini diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai baik yang bermuara ke pantai selatan maupun ke pantai utara Jawa. Hal ini menyebabkan

sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.

Ibukota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m di atas permukaan laut (dpl) dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 m), Gunung Cikuray (2821 m), Gunung Papandayan (2622 m) dan Gunung Guntur (2249 m). Karakteristik topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil. Rangkaian pegunungan vulkanik yang mengelilingi dataran antar gunung, di Garut Utara umumnya memiliki lereng dengan kemiringan 30-45° disekitar puncak, 15-30° di bagian tengah dan 10-15° di bagian kaki lereng pegunungan. Lereng gunung tersebut umumnya ditutupi vegetasi cukup lebat karena sebagian diantaranya merupakan kawasan konservasi alam.

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2018 Kabupaten Garut memiliki 421 Desa dan 21 Kelurahan dengan desa terbanyak berada di Kecamatan Malangbong. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada 3 wilayah tipologi, yaitu :

a. Dataran Tinggi

Topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit – bukit dan pegunungan.

b. Dataran Redah

Kondisi alam daerah sebelah Selatan, sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam. Corak alam di daerah sebelah Selatan ini diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan segenap potensi alam dan keindahan pantainya

c. Perkotaan

Kegiatan perekonomian terpusat di Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul dan Tarogong kaler, menurut Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten

Garut rencananya kawasan perkotaan akan dikembangkan di Kecamatan Karangpawitan, Cilawu dan Banyuresmi.

Menurut Sugiyono (2012) lokus penelitian adalah tempat lokasi penelitian tersebut dilakukan, sehingga metode dalam pengambilan lokus penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling atau judgement sampling. Berdasarkan teknik tersebut terpilih locus penelitian adalah beberapa desa dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Dataran Tinggi, meliputi :
  1. Desa Cikandang, Kec. Cikelet
  2. Desa Cigedung, Kec Cigedung
- b. Dataran Redah
  1. Desa Cigadog, Kec Sucinaraja
  2. Desa Mandalakasih, Kec Pameungpeuk
- c. Perkotaan
  1. Desa, Kec Kadungora
  2. Desa, Kec Leles

Setelah terpilih tiga desa maka tahap berikutnya adalah memilih sektor unggulan masing-masing desa yang disesuaikan dengan arah pembangunan kabupaten garut dan metode Rapid Rural Appraisal. Metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “*cepat dan kasar/kotor*” tetapi RRA dinilai masih lebih baik dibanding teknik-teknik kuantitatif klasik. Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera.

Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-

program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metode RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat.

Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin, menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan. Menurut Beebe James (1995), metode RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.

Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

- a. Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
- b. Oservasi/pengamatan lapang secara langsung.
- c. Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
- d. Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.

- e. Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.
- f. Kecenderungan-kecenderungan.
- g. Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat.
- h. Pembuatan laporan lapang secara cepat.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam RRA, yaitu:

- a. Efektivitas dan efisiensi, kaitannya dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang dapat dipercaya yang dapat digunakan dibanding sekadar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan.
- b. Hindari bias, melalui: introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin.
- c. Triangulasi sumber informasi dan libatkan Tim Multi-disiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif.
- d. Belajar dari dan bersama masyarakat.
- e. Belajar cepat melalui eksplorasi, cross-check dan jangan terpaku pada bekuan yang telah disiapkan.

Tahap terakhir adalah dengan memilih sampel responden berdasarkan sektor unggulan masing-masing desa.

### **3.2 Teknik Analisis Data**

Pada Penelitian ini teknik analisis data menggunakan Analisis Jalur Path analysis atau analisis jalur pada awalnya dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1920-an untuk menganalisis model hipotesis pada studi phylogenetis. Path Analysis ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya memengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung". (Robert D. Retherford 1993 dikutip oleh Widaryano, 2005) Sedangkan definisi lain mengatakan: "Path Analysis merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (magnitude) dan signifikansi (significance) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam

seperangkat variabel.” (Paul Webley 1997 dikutip oleh Sarwono 2007). David Garson dari North Carolina State University mendefinisikan Path Analysis sebagai “Model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti.

Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedang yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. (David Garson, 2003 dikutip oleh Sunyoto 2011).

Menurut Kuncoro, 2007, teknik Path Analysis adalah teknik yang digunakan dalam menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap  $Y$  serta dampaknya terhadap  $Z$ .

Menurut Sarwono (2012) tujuan menggunakan Path Analysis diantaranya adalah:

1. Variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya.
2. Menghitung besarnya pengaruh satu variabel. Melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model apriori.
3. Menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer.
4. Menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang memadai.
5. Mengidentifikasi jalur penyebab suatu independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya.

Manfaat dari model Path Analysis sebagai berikut (Kuncoro, 2007) :

1. Menjelaskan explanation terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti.

2. Memprediksi nilai variabel terikat (Y) berdasarkan nilai variabel bebas (X), dan memprediksi dengan Path Analysis ini bersifat kualitatif.
3. Faktor determinan yaitu penentu variabel bebas (X) mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat (Y), juga dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variabel (X) terhadap variabel terikat (Y).
4. Pengujian model

Dalam Path Analysis Dalam metode Path Analysis ada beberapa istilah yang digunakan, istilah-istilah tersebut antara lain (Sarwono, 2007) :

1. Model jalur. Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Anak panah-anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel exogenous atau perantara dengan satu variabel tergantung atau lebih. Anak panah juga menghubungkan kesalahan (variabel residue) dengan semua variabel endogenous masing-masing. Anak panah ganda menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel exogenous.
2. Jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan. meliputi pertama jalur-jalur arah dari anak-anak panah menuju ke variabel tersebut dan kedua jalur-jalur korelasi dari semua variabel endogenous yang dikorelasikan dengan variabel-variabel yang lain yang mempunyai anak panah-anak panah menuju ke variabel yang sudah ada tersebut.
3. Variabel exogenous ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel exogenous dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-

variabel tersebut. Dalam istilah lain, dapat disebut pula sebagai independen variabel.

4. Variabel endogenous. Variabel endogenous ialah variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya ialah mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara endogenous mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedangkan variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Atau dapat disebut juga sebagai variabel dependen.
5. Koefisien jalur / pembobotan jalur. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut 'beta' yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua atau lebih variabel-variabel penyebab, maka koefisien-koefisien jalurnya merupakan koefisien-koefisien regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam suatu model jalur tertentu yang mengontrol dua variabel lain sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah distandarkan atau matriks korelasi sebagai masukan.
6. Mediasi. Mediasi ialah perantara yang berfungsi sebagai variabel endogenous pertama terhadap variabel sebelumnya (variabel exogenous) dan sebagai variabel exogenous terhadap variabel endogenous kedua, atau variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antar variabel independent dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Dalam urutan posisi diagram jalur berada pada antara dua variabel dimana pengaruh tidak langsung akan diukur.
7. Total effect. Pengaruh tidak langsung dari satu variabel exogenous melalui variabel endogenous perantara menuju ke variabel endogenous kedua.

8. Direct effect. Pengaruh langsung dari suatu variabel exogenous menuju variabel endogenous.
9. Pengaruh gabungan. Pengaruh dari semua variabel exogenous terhadap satu variabel endogenous yang dikenal dengan nilai  $r^2$ .
10. Pengaruh parsial. Pengaruh setiap variabel exogenous masing-masing terhadap satu variabel endogenous.

Studi ini menggunakan analisis jalur untuk mengestimasi hubungan antarvariabel dengan fokus pada variabel-variabel yang memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan layanan branchless banking. Penggunaan analisis jalur dilakukan dengan menyesuaikan skala data yang ada. Data yang digunakan dalam analisis jalur pada studi ini adalah data ordinal. Penggunaan data ordinal dalam analisis jalur masih dapat dilakukan dengan kriteria minimal lima kategori (Streiner, 2005). Menurut Suliyanto (2011), data ordinal dan Likert yang telah ditransformasi dapat digunakan dalam analisis data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, setelah dilakukan penyesuaian terbatas pada data hasil survei, maka analisis jalur dapat dilakukan.

Variabel bebas dalam analisis jalur ini adalah karakteristik individu, kemudian variabel moderasi yang digunakan adalah frekuensi penggunaan layanan bank dan pemahaman mengenai branchless banking. Variabel karakteristik individu yang pertama adalah kabupaten yang menggambarkan jarak antara kabupaten tempat tinggal responden dengan pusat kegiatan ekonomi. Kedua, jumlah pengeluaran yang menggambarkan tingkat kekayaan masing-masing responden. Jumlah penghasilan setiap individu berpengaruh dalam pilihan penggunaan jasa perbankan (Chepkangor, 2012). Ketiga, pendidikan responden karena perbedaan pendidikan merepresentasikan tingkat sosial yang berbeda juga. Perbedaan status dan kelas sosial berpengaruh dalam pilihan jasa keuangan, khususnya perbankan (Chepkangor, 2012).

Interaksi variabel-variabel tersebut memengaruhi variabel terikatnya, yaitu keinginan individu menggunakan layanan branchless banking.



IKOPIN

## BAB IV

# GAMBARAN UMUM DAERAH

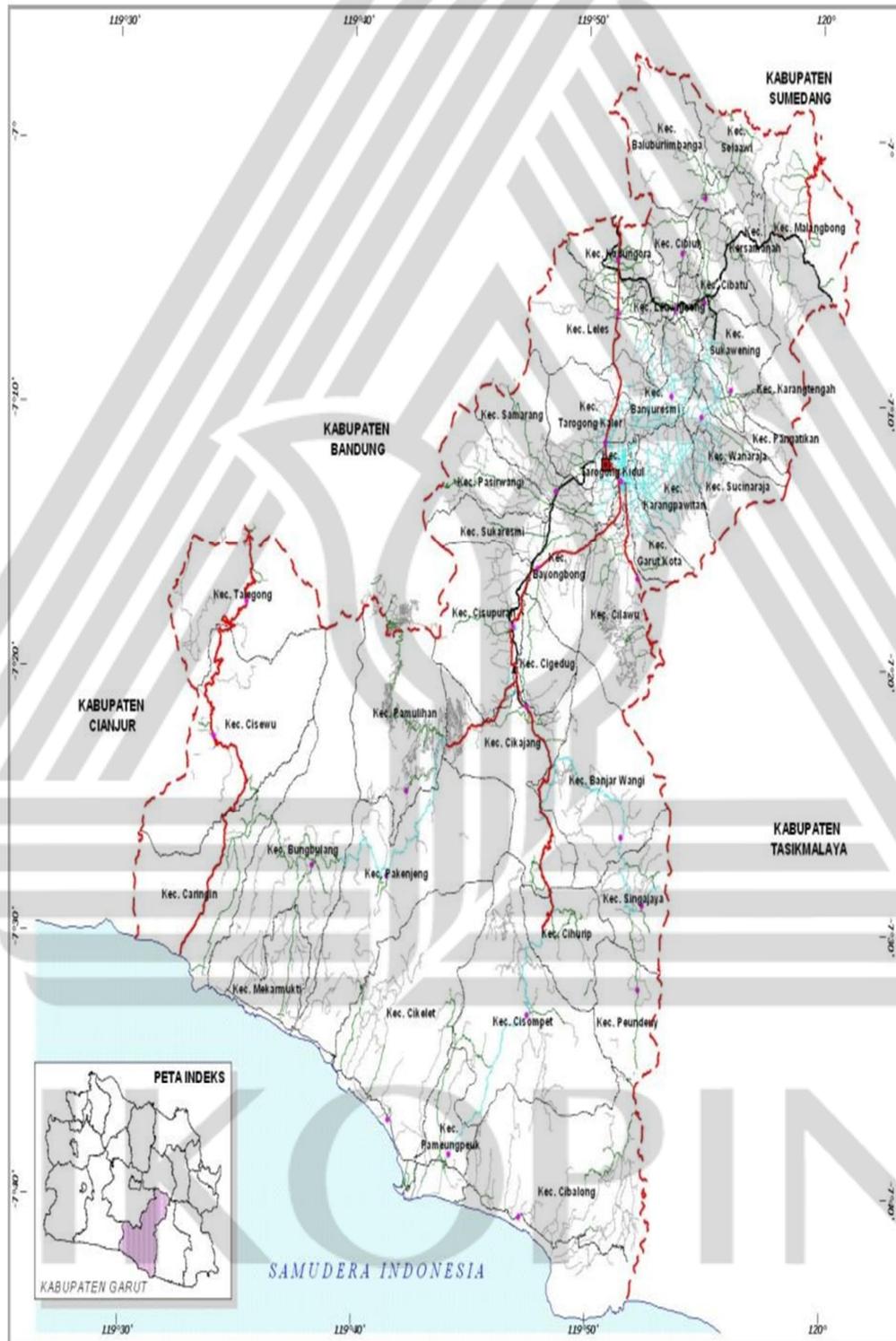
### 5.1 Kondisi Geografis Dan Demografis

Kabupaten Garut secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sekitar 3.065,19 Km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak diantara 6° 57'34" – 7° 44'57" Lintang Selatan dan 107°24'3" – 108°24'34" Bujur Timur dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit -bukit dan pegunungan. Kondisi alam daerah sebelah Selatan, sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam. Corak alam di daerah sebelah Selatan ini diwarnai oleh iklim Samudra Indonesia dengan segenap potensi alam dan keindahan pantainya. Kabupaten Garut dengan iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari hujan yang banyak dan lahan yang subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai baik yang bermuara ke pantai selatan maupun ke pantai utara Jawa. Hal ini menyebabkan sebagian besar dari luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan pertanian.

Gambar 1  
Kondisi Fisik Geografis Wilayah Kabupaten Garut



Ibukota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m di atas permukaan laut (dpl) dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 m), Gunung Cikuray (2821 m), Gunung Papandayan (2622 m) dan Gunung Guntur (2249 m). Karakteristik topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaan tanahnya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil. Rangkaian pegunungan vulkanik yang mengelilingi dataran antar gunung, di Garut Utara umumnya memiliki lereng dengan kemiringan 30-45° disekitar puncak, 15-30° di bagian tengah dan 10-15° di bagian kaki lereng pegunungan. Lereng gunung tersebut umumnya ditutupi vegetasi cukup lebat karena sebagian diantaranya merupakan kawasan konservasi alam.

**Tabel 1**

**Statistik geografi dan Iklim Kabupaten Garut**

Uraian	Satuan	Jumlah
Luas Wilayah	ha	306.519
Luas dengan kemiringan		
0-2°	ha	32.229
2-5°	ha	38.097
15-40°	ha	110.326
>40°	ha	125.867
Lokasi Geografi di Desa		
Desa di DAS	Desa	4
Desa di Lereng	Desa	195
Desa di dataran	Desa	206
Desa di pesisir	Desa	19

Sumber : BPS Kabupaten Garut

Pada wilayah Kabupaten Garut terdapat 34 aliran sungai ke utara, dan 19 aliran sungai ke Selatan. Berdasarkan interpretasi citra landsat Zona Bandung, nampak bahwa pola aliran sungai yang berkembang di wilayah dataran antar gunung Garut Utara menunjukkan karakter mendaun, dengan arah aliran utama berupa sungai Cimanuk menuju ke utara. Aliran Sungai Cimanuk dipasok

oleh cabang-cabang anak sungai yang berasal dari lereng pegunungan yang mengelilinginya. Secara individual, cabang-cabang anak sungai tersebut merupakan sungai-sungai muda yang membentuk pola penyaliran sub-paralel, yang bertindak sebagai subsistem dari DAS Cimanuk.

Berdasarkan letak geografi dan topografi wilayah, dari 424 desa, 19 desa di Kabupaten Garut merupakan desa pesisir, sedangkan 405 lainnya bukan desa pesisir yang meliputi 4 desa yang berada di lembah/ DAS, 195 desa berada di lereng/punggung bukit dan 206 desa berada di wilayah dataran. Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Berdasarkan studi data sekunder, iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (monsoonal circulation pattern), topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat; dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3500-4000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C -27°C.

**Tabel 2**

**Luas Lahan menurut fungsi Kabupaten Garut**

<b>Fungsi Lahan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
Sawah Irigasi	ha	37.292
Sawah Tandah Hujan	ha	10.765
Tegal/Kebun	ha	108.133
Ladang/Huma	ha	-
Perkebunan	ha	32.386
Hutan Negara	ha	15.065
Hutan Rakyat	ha	4.307
Tambak	ha	-
Kolam	ha	-
Padang/Rumput sementara diusahakan tdk	ha	5.260

Fungsi Lahan	Satuan	Jumlah
Lainnya (pekarangan yang ditanami tanaman pertanian)	ha	38.039
Lahan bukan pertanian	ha	51.052

**Tabel 3**

**Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Garut**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Cisewu	17.283	5,64
2	Caringin	9.903	3,23
3	Talegong	10.874	3,55
4	Bungbulang	14.698	4,80
5	Mekarmukti	5.522	1,80
6	Pamulihan	13.244	4,32
7	Pakenjeng	19.844	6,47
8	Cikelet	17.232	5,62
9	Pameungpeuk	4.411	1,44
10	Cibalong	21.359	6,97
11	Cisompet	17.225	5,62
12	Peundeuy	5.679	1,85
13	Singajaya	6.769	2,21
14	Cihurip	4.042	1,32
15	Cikajang	12.495	4,08
16	Banjarwangi	12.382	4,04
17	Cilawu	7.763	2,53
18	Bayongbong	4.763	1,55
19	Cigedug	3.120	1,02
20	Cisurupan	8.088	2,64
21	Sukaresmi	3.517	1,15
22	Samarang	5.971	1,95
23	Pasirwangi	4.670	1,52

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
24	Tarogong Kidul	1.946	0,63
25	Tarogong Kaler	5.057	1,65
26	Garut Kota	2.771	0,90
27	Karangpawitan	5.207	1,70
28	Wanaraja	3.526	1,15
29	Sucinaraja	3.383	1,10
30	Pangatikan	1.972	0,64
31	Sukawening	3.883	1,27
32	Karangtengah	2.328	0,76
33	Banyuresmi	4.788	1,56
34	Leles	7.351	2,40
35	Leuwigoong	1.935	0,63
36	Cibatu	4.143	1,35
37	Kersamanah	1.650	0,54
38	Cibiuk	1.990	0,65
39	Kadungora	3.731	1,22
40	Blubur Limbangan	7.359	2,40
41	Selaawi	3.407	1,11
42	Malangbong	9.238	3.01
<b>Garut</b>		<b>306.519</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut

Kabupaten Garut memiliki 421 Desa dan 21 Kelurahan dengan desa terbanyak berada di Kecamatan Malangbong.

**Tabel 4**

**Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Garut**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Cisewu	9	-
2	Caringin	6	-
3	Talegong	7	-
4	Bungbulang	13	-
5	Mekarmukti	5	-
6	Pamulihan	5	-

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
7	Pakenjeng	13	-
8	Cikelet	11	-
9	Pameungpeuk	8	-
10	Cibalong	11	-
11	Cisompet	11	-
12	Peundeuy	6	-
13	Singajaya	9	-
14	Cihurip	4	-
15	Cikajang	12	-
16	Banjarwangi	11	-
17	Cilawu	18	-
18	Bayongbong	18	-
19	Cigedug	5	-
20	Cisurupan	17	-
21	Sukaresmi	7	-
22	Samarang	13	-
23	Pasirwangi	12	-
24	Tarogong Kidul	7	5
25	Tarogong Kaler	12	1
26	Garut Kota	-	11
27	Karangpawitan	16	4
28	Wanaraja	9	-
29	Sucinaraja	7	-
30	Pangatikan	8	-
31	Sukawening	11	-
32	Karangtengah	4	-
33	Banyuresmi	15	-
34	Leles	12	-
35	Leuwigoong	8	-
36	Cibatu	11	-
37	Kersamanah	6	-
38	Cibiuk	5	-
39	Kadungora	14	-
40	Blubur Limbangan	14	-
41	Selaawi	7	-
42	Malangbong	24	-
	<b>Garut</b>	<b>421</b>	<b>21</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah penduduk Kabupaten Garut tahun 2017, tercatat sebesar 2.588.839 jiwa yang terdiri dari 1.303.638 penduduk laki-laki dan 1.285.201 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Garut selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0.95 persen per tahun. Di lain sisi, jumlah rumah tangga di Kabupaten Garut pada tahun 2017 mencapai 643.979 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 4 jiwa. Dengan wilayah seluas 3.065,19 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2017 telah mencapai 844 jiwa/Km<sup>2</sup>, atau mengalami peningkatan 6 jiwa/Km<sup>2</sup> dibandingkan tahun 2016. Tarogong Kidul merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 6.644,55 jiwa/Km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Garut Kotadengan kepadatan 4.715,59 jiwa/Km<sup>2</sup> Sedangkan tingkat kepadatan terendah tercatat pada Kecamatan Pamulihan dengan kepadatan yang hanya sebesar 138,405 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dengan membandingkan hasil sensus penduduk sejak tahun 1961, walaupun jumlah penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun trend laju pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata per tahun di Kabupaten Garut pada periode 1961-1971 masih cukup tinggi, yakni sebesar 2,74 persen, mengalami penurunan pada dekade-dekade berikutnya sampai 1,59 persen per tahun pada dekade terakhir. Hal yang perlu menjadi catatan adalah selama 5 dekade jumlah penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan lebih dari dua setengah kali lipat

**Tabel 5**

**Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Garut**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Cisewu	16.952	16.773	33.725
2	Caringin	16.235	15.783	32.018
3	Talegong	15.754	15.882	31.636
4	Bungbulang	31.385	31.319	62.704
5	Mekarmukti	8.452	8.510	16.962

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribu)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
6	Pamulihan	9.127	9.203	18.330
7	Pakenjeng	35.724	35.326	71.050
8	Cikelet	22.734	22.710	45.444
9	Pameungpeuk	20.752	21.126	41.878
10	Cibalong	21.962	21.869	43.831
11	Cisompet	25.497	25.530	51.027
12	Peundeuy	11.652	11.330	22.982
13	Singajaya	23.988	24.243	48.231
14	Cihurip	9.521	9.302	18.823
15	Cikajang	43.909	43.341	87.250
16	Banjarwangi	30.038	29.488	59.526
17	Cilawu	53.540	53.138	106.678
18	Bayongbong	51.545	50.614	102.159
19	Cigedug	21.152	20.434	41.586
21	Sukaresmi	20.787	20.533	41.586
22	Samarang	38.451	38.146	76.597
23	Pasirwangi	33.739	32.753	66.492
24	Tarogong Kidul	64.984	64.319	129.303
25	Tarogong Kaler	48.260	47.448	95.708
27	Karangpawitan	65.268	64.369	129.637
28	Wanaraja	23.456	23.848	47.304
29	Sucinaraja	13.639	13.161	26.800
31	Sukawening	25.482	26.074	51.556
32	Karantengah	8.162	8.362	16.524
33	Banyuresmi	46.585	45.123	91.708
34	Leles	41.266	40.670	81.936
35	Leuwigoong	21.000	20.731	41.731
36	Cibatu	35.647	35.029	70.676
37	Kersamanah	19.016	18.356	37.372
38	Cibiuk	16.310	15.635	31.945
39	Kadungora	46.842	45.568	92.410
40	Blubur Limbangan	40.553	39.482	80.035
41	Selaawi	19.392	19.048	38.440
42	Malangbong	65.755	63.575	129.330
<b>Garut</b>		<b>1.303.638</b>	<b>1.285.201</b>	<b>2.588.839</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut

Secara umum, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Garut lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar 101,55 persen. Indikator tersebut menggambarkan setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki. Demikian pula gambaran sex ratio di tingkat kecamatan, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Garut memiliki sex ratio di atas 100 persen kecuali 9 kecamatan, yakni Talegong, Mekarmukti, Pamulihan, Pameungpeuk, Cisompet, Singajaya, Wanaraja, Sukawening dan Karangtengah, yang memiliki sex ratio di bawah 100 persen.

Komposisi penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2017 tampak didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal yang dapat diamati pada tabel 6 di bawah adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk, dimana jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun yang merupakan refleksi keberhasilan Pemerintah dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah atau lebih rendah dibanding sebelumnya

**Tabel 6**  
**Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur**  
**di Kabupaten Garut**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	138.568	133.443	272.011
5-9	139.742	133.768	273.510
10-14	142.668	137.492	280.160
15-19	124.567	119.320	243.887
20-24	102.388	102.248	204.636
25-29	98.298	96.263	194.561
30-34	94.011	92.687	186.698
35-39	93.212	92.001	185.213
40-44	83.028	82.775	165.803
45-49	75.014	73.439	148.453

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
50-54	60.310	60.638	120.948
55-59	47.735	47.511	95.246
60-64	37.642	37.590	75.232
65-69	26.556	28.886	55.442
70-74	19.561	21.582	41.183
75+	20.338	25.558	45.896
Jumlah	1.303.638	1.285.201	2.588.839

Sumber : BPS Kabupaten Garut

## 5.2 Indikator Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan total balas jasa faktor produksi dari seluruh kegiatan ekonomi, menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Kinerja perekonomian suatu daerah sangat bergantung pada struktur ekonomi yang sangat menentukan sumber-sumber pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Performa ekonomi wilayah akan sangat berbeda antara wilayah pertanian dengan industri pengolahan atau jasa-jasa. Produk Domestik Regional Bruto dilakukan perubahan Tahun Dasar, selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Kinerja ekonomi Kabupaten Garut tampak masih sangat mengandalkan sektor pertanian dengan kontribusi yang mencapai hampir 40 persen terhadap perekonomian. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di tahun 2017 sebesar 37,89 %, jika dibandingkan empat tahun sebelumnya mengalami penurunan 1,22 persen. Sementara perdagangan besar

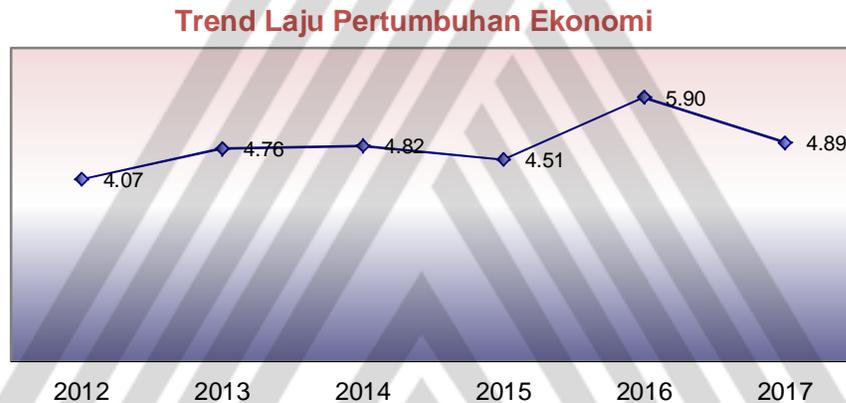
dan eceran; reparasi mobil dan motor kontribusinya 19,73 persen diikuti Industri pengolahan dengan kontribusinya 7,75 persen.

Situasi perekonomian Kabupaten Garut tahun 2017 tampak cukup bergairah dengan LPE sebesar 4,89 persen. Angka tersebut tercatat merupakan capaian angka yang cukup tinggi selama lebih dari satu dekade terakhir. Fenomena tersebut dipicu oleh kinerja pada kategori pertanian di Kabupaten Garut yang masih mampu tumbuh sebesar 2,32 persen. Di samping itu sektor lainnya juga memperlihatkan perkembangan yang positif, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa Lainnya yang mampu tumbuh 13,55 persen.

Selanjutnya, PDRB per kapita yang mencerminkan produktivitas per penduduk di Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama periode 2013-2017, dengan pertumbuhan di atas 5 persen per tahun. Pada tahun 2017 PDRB per kapita, yang dihitung atas dasar harga berlaku, di Kabupaten Garut tercatat sebesar Rp 18,54 juta, atau meningkat 7,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan Jawa Barat, angka tersebut masih tampak lebih rendah, dimana PDRB per kapita propinsi Jawa Barat telah mencapai Rp 37,18 juta di tahun 2017. Sementara itu, PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, selama periode 2013 - 2017 mengalami peningkatan sebesar 17,69 persen, atau dari Rp 11,64 juta menjadi Rp 13,70 juta. Dengan asumsi distribusi pendapatan yang tetap, PDRB per kapita tersebut merupakan gambaran dari perkembangan pendapatan riil per penduduk di Kabupaten Garut yang merupakan cerminan dari daya beli masyarakat. Sehingga, secara makro dapat dikatakan pendapatan riil masyarakat Kabupaten Garut meningkat dengan rata-rata 3,53 persen pertahun.

**Gambar 1**

**Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Garut**



Sumber : Garut dalam Angka 2018, BPS

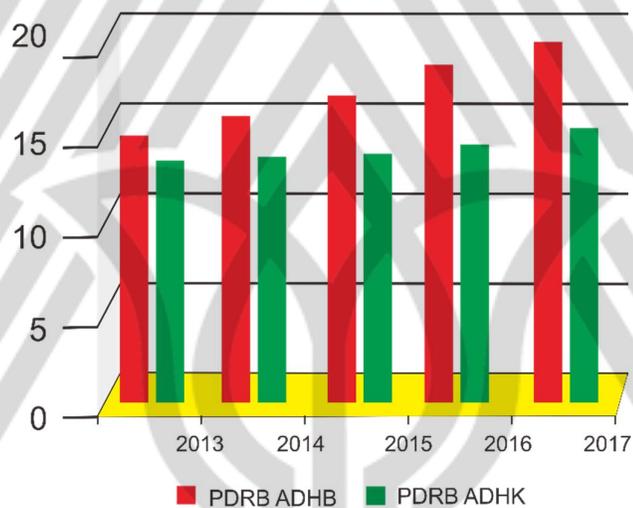
**Tabel 7**

**Kontribusi Kategori terhadap PDRB**

Kategori	2010	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,35	37,89
B. Pertambangan dan Penggalian	3,63	1,54
C. Industri Pengolahan	7,42	7,75
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05
F. Konstruksi	5,33	6,03
G. Perdagangan Besar, dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,81	19,73
H. Transportasi dan Pergudangan	3,46	4,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,19	3,48
J. Informasi dan Komunikasi	2,00	2,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	3,01
L. Real Estat	1,52	1,65
M,N Jasa Perusahaan	0,50	0,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan sosial	3,85	3,48
P. Jasa Pendidikan	3,20	4,72
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,72

Kategori	2010	2017
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,68	3,21
<b>PDRB</b>	100,00	100,00

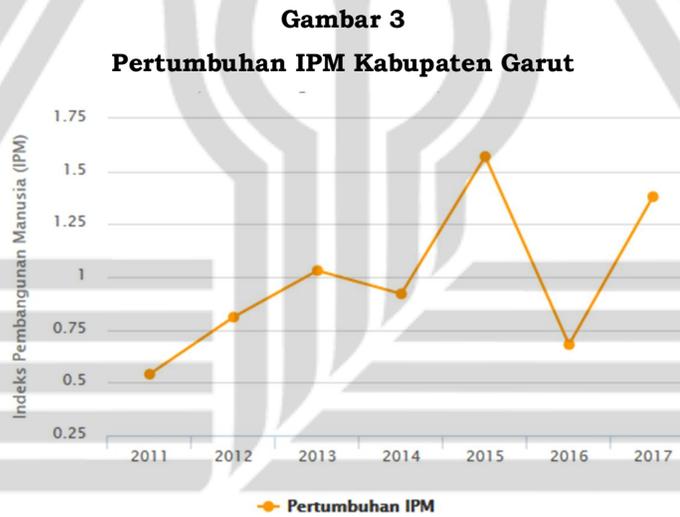
**Gambar 2**  
**Trend PDRB Per Kapita Kabupaten Garut**  
**Tahun 2013-2017**  
**Juta(Rp)**



Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme-UNDP*). Pada tahun 2017 (penghitungannya dimulai tahun 2010) metodologi penghitungan IPM dilakukan perubahan, dengan alasan: Pertama: beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. PDB per kapita sudah tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua: penggunaan rumus rata-rata aritmetik dalam penghitungan

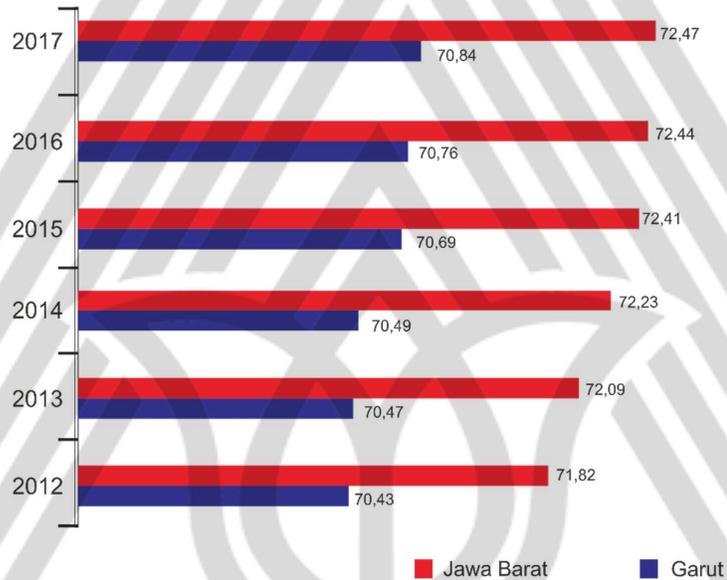
IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian dari dimensi lain.

Keunggulan IPM metode baru adalah dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif), dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Tingkat keterjangkauan (accessibility) yang semakin tinggi, dengan infratraktur yang semakin membaik, pada taraf hidup masyarakat di Kabupaten Garut. Perkembangan IPM Kabupaten Garut yang positif selama periode 2012-2017. Tahun 2017 IPM dihitung dengan metode baru Kabupaten Garut telah mencapai 64,52.



IKOPIN

**Gambar 4**  
**Capaian IPM Kabupaten Garut dan Jawa Barat**  
**2012-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Garut

Salah satu faktor yang secara makro sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan di wilayah bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat yang tentunya akan menyebabkan rendahnya respon masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Tekanan inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM yang sangat tinggi di akhir tahun 2005 tampak berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut.

Pada tahun 2006 persentase Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 19,10 persen, atau meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, sejalan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan oleh Pemerintah, persentase penduduk miskin di

Kabupaten Garut kembali mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut tercatat sebesar 291,2 jiwa, atau dengan persentase 11,27 persen. Angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat yang hanya sebesar 7,83 persen. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 325,7 jiwa atau dengan persentase 12,81 persen. Penduduk Kabupaten Garut berada di bawah garis kemiskinan, dengan garis kemiskinan sebesar 267.252 rupiah per kapita per bulan, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, tabel berikut disajikan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Garut tahun 2010-2017 :

**Tabel 7**  
**Kontribusi Kategori terhadap PDRB**

Tahun	Garis Kemiskinan Poverty Line (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu)	Persentase
2010	180.406	355,60	13,94
2011	202.350	330,90	13,50
2012	213.707	315,80	12,72
2013	226.308	320,90	12,79
2014	234.661	315,58	12,47
2015	241.068	325,67	12,81
2016	256.770	298,50	11,64
2017	267.252	291,20	11,27

Sumber : BPS Kabupaten Garut

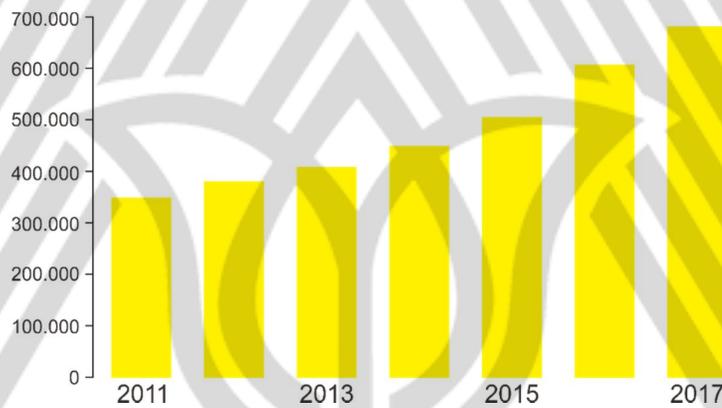
Perkembangan kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan yang secara makro dapat di proxy dengan perkembangan pengeluaran penduduk. Secara umum, selama periode 2011-2017 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Garut mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengeluaran per kapita.

Pengeluaran nominal per kapita penduduk meningkat dari Rp 354.016 pada tahun 2011, menjadi Rp 682.732 pada tahun 2017. Lebih jauh perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran nonmakanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Selama kurun waktu 2011-2017, tampak pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Garut secara makro mengalami pergeseran.

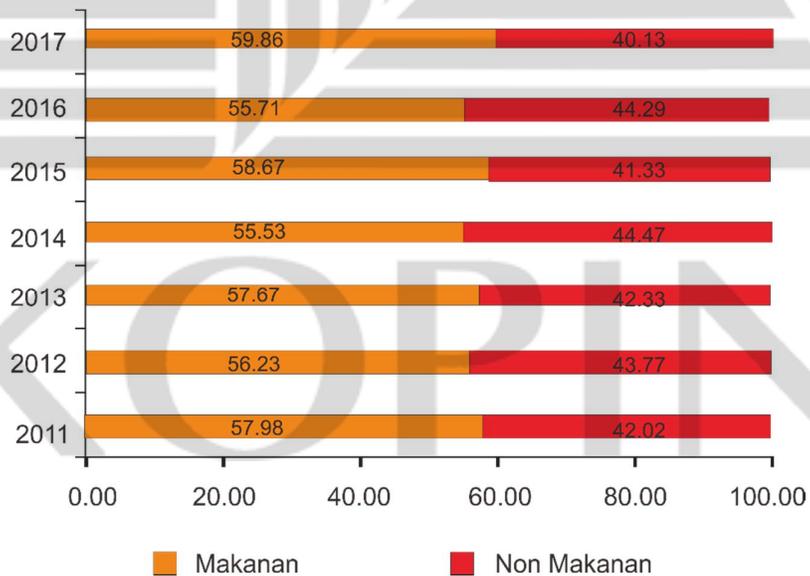
Porsi makanan pada tahun 2011 sebesar 57,98 persen dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi sebesar 55,71 persen, atau menurun 2,27 persen selama empat tahun. Namun pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan porsi makanan menjadi 59,86 persen. Porsi pengeluaran makanan masyarakat di Kabupaten Garut tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Barat dengan porsi yang hanya mencapai 40,74 persen. Secara makro gambaran tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut masih berada dibawah rata-rata masyarakat Propinsi Jawa Barat pada umumnya. Apabila dikaji lebih jauh, pengeluaran konsumsi untuk makanan di Kabupaten Garut pada tahun 2017 didominasi oleh pengeluaran untuk kelompok makanan dan minuman jadi yang mengambil porsi sebesar 29,38 persen dari total pengeluaran makanan. Menarik untuk di analisis pengeluaran rokok lebih besar dari pengeluaran padi-padian dimana pengeluaran rokok mencapai 18,78 persen, sedangkan untuk kelompok padipadia hanya 14,70 persen. Untuk kelompok makanan berprotein tinggi, yakni ikan/cumi/kerang, daging-dagingan dan telur/susu masih mengambil porsi yang relatif rendah, yakni masing-masing sebesar 4,97; 5,51 dan 4,57 persen. Sedangkan kelompok makanan dengan porsi pengeluaran terendah adalah kelompok umbi-umbian dengan porsi yang hanya sebesar 0,99 persen, disusul kelompok bumbu-bumbuan dan kacang-kacangan masing-masing dengan porsi sebesar 1,52 persen dan 2,18 persen. Selanjutnya, porsi non makanan paling tinggi di Kabupaten Garut adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumahtangga dengan

persentase sebesar 47,74 persen dari total pengeluaran bukan makanan. Disusul oleh kelompok kebutuhan aneka barang dan jasa dengan porsi 22,47 persen serta pakaian, alas kaki dan tutup kepala dengan porsi 9,05 persen. Sedangkan barang tahan lama sebesar 8,03%, keperluan pesta dan pajak masing-masing 12,70 % dan 4,50 %.

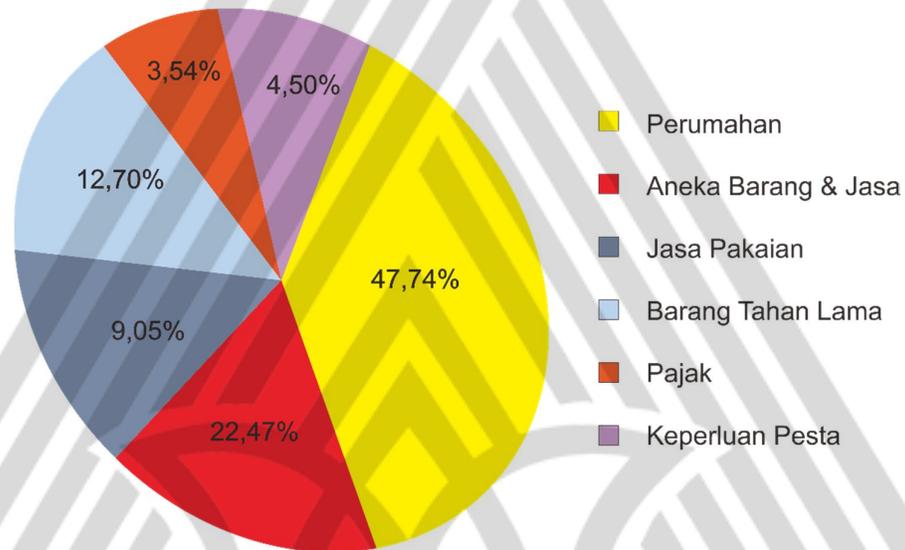
**Gambar 5**  
**Perkembangan Pengeluaran per kapita per bulan**  
**di Kabupaten Garut**



**Gambar 6**  
**Perkembangan Struktur Pengeluaran Penduduk**  
**di Kabupaten Garut**



**Gambar 7**  
**Struktur pengeluaran Non Makanan per Bulan penduduk di Garut**



Situasi ketenagakerjaan di Kabupaten Garut pada tahun 2017 ditandai dengan meningkatnya angkatan kerja baru, sehingga pada tahun ini total angkatan kerja mencapai 1.801.509 jiwa, atau 62,92 persen dari total penduduk usia kerja yang mencapai 1.133.248 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Garut mengalami peningkatan selama periode 2008-2017, yakni sebesar 3,12 persen. Jumlah penduduk dengan usia produktif (15 Tahun ke atas) di Kabupaten Garut memiliki status pekerjaan utama terbesar adalah sebagai Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 322.985.

IKOPIN

**Tabel 7**  
**Status Pekerjaan Utama penduduk**  
**Kabupaten Garut dengan usia 15 Tahun ke atas**

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Berusaha Sendiri	130.370	66.035	196.405
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	105.721	40.850	146.571
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	34.066	5.084	39.150
Buruh/Karyawan/Pegawai	225.513	97.472	322.985
Pekerja Bebas di Pertanian	57.466	37.863	95.329
Pekerja Bebas di Non Pertanian	100.931	9.076	110.007
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	23.272	110.418	133.690
<b>Jumlah</b>	<b>677.339</b>	<b>366.798</b>	<b>1.044.137</b>

Sumber : BPS Kabupaten Garut

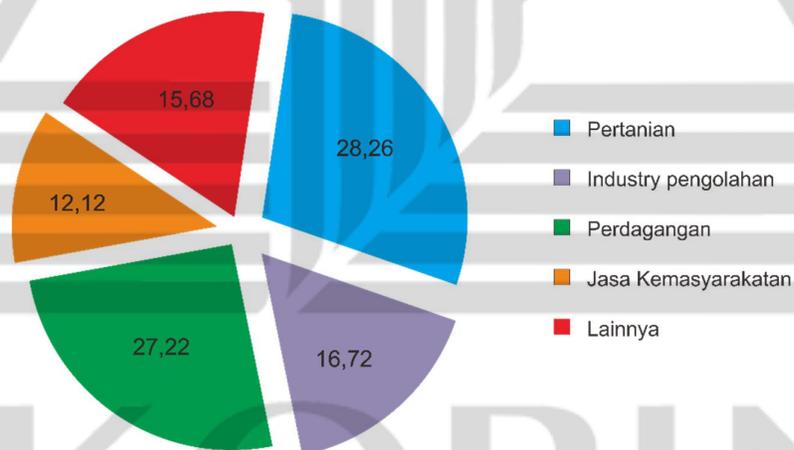
Dari sisi pasar tenaga kerja, terjadi peningkatan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang cukup signifikan di tahun 2017, yakni dari 10,98 persen menjadi 7,86persen. Walaupun terlihat masih cukup tinggi, namun jika dibandingkan dengan angka provinsi, TPT Kabupaten Garut relatif rendah, dimana TPT Jawa Barat pada tahun yang sama mencapai 8,72 persen. Selanjutnya jika ditinjau dari lapangan usaha, untuk tahun 2017 sektor perdagangan sangat mendominasi bursa tenaga kerja, terjadi sedikit peningkatan jika dibandingkan tahun 2015. Di tahun 2017 sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 28,26 persen, hal ini terjadi karenakemarau yang cukup panjang yang terjadi dari bulan Mei 2017, sedangkan tiga sektor penting lainnya, yakni sektor industri sektor jasa-jasa dan sektor

lainnya berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 16,72; 12,12 dan 15,68 persen. Yang menjadi catatan di tahun 2017 terhadap tahun sebelumnya adalah, terjadinya peningkatan serapan tenaga kerja hampir pada semua sektor, kenaikan tertinggi di sektor Lainnya yaitu sebesar 4,11 persen, kecuali sektor jasa-jasa terjadi penurunan kontribusi.

**Tabel 8**  
**Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Garut**

Rincian	Satuan	Jumlah
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.801.509
Angkatan Kerja	Jiwa	1.133.248
TPAK	Persen	62,92
Pengangguran	Persen	7,86
Bekerja	Persen	92,14

**Gambar 8**  
**Persentase Tenaga Kerja Menurut Sektor Kabupaten Garut**



Angka pengangguran yang tinggi terutama dialami kaum muda yang baru menyelesaikan pendidikan lanjutan, yang kebanyakan berasal dari masyarakat kota kelas menengah. Aspirasi akan pekerjaan “kantor” di sektor modern dianggap sebagai sebab utama pengangguran yang dialami kelompok ini dan berhubungan dengan

lambatnya penambahan lapangan pekerjaan baru yang dapat memenuhi harapan mereka. Di sisi lain, pada tahun 2016, pencari kerja yang baru mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tercatat 27.147 orang yang meliputi 11.428 laki-laki dan 16.286 perempuan. Hal ini menunjukkan banyak kaum muda yang baru lulus menyelesaikan pendidikan baik itu tingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi masih mencari pekerjaan yang di idam-idamkan. Menarik untuk disimak berdasarkan data di atas ternyata kaum perempuan lebih banyak yang mendaftar di banding kaum laki-laki. Data tersebut menunjukkan, kaum perempuan sekarang lebih berminat untuk bekerja di sektor formal dan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja.

**Tabel 9**  
**Pencari kerja yang mendaftar di Kabupaten Garut**

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Jumlah
SD	1.221
SMP	6.787
SMA	10.859
Diploma	2.851
Universitas	5.429

Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk terbesar di Wilayah Priangan Timur, merupakan kabupaten dengan kontribusi PDRB tertinggi terhadap pembentukan PDRB di Jawa Barat. Pada tahun 2017 Kabupaten Garut memberikan sumbangan PDRB sekitar Rp 47.993 miliar, atau 2,69 persen terhadap perekonomian Jawa Barat. Di sisi lain, tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Priangan Timur secara umum relatif rendah, ini tampak dari perbandingan besaran PDRB per kapita di wilayah tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Garut menempati posisi terbesar keempat setelah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Sementara PDRB per kapita terendah ditempati oleh Kabupaten Tasikmalaya.

Perbandingan beberapa indikator terpilih lainnya, yakni laju pertumbuhan ekonomi, dan IPM juga memperlihatkan perbedaan capaian yang tidak terlalu signifikan. Namun variasi kabupaten/kota yang cukup tinggi di Wilayah Priangan Timur tampak pada persentase penduduk miskin. LPE bervariasi antara 4,89 persen sampai 6,07 persen di tahun 2017. LPE Kabupaten Garut menempati peringkat kelima setelah Kota Banjar. Selanjutnya capaian IPM kabupaten/kota di Wilayah Priangan Timur berkisar antara 64,14 sampai 71,51. Capaian IPM Kabupaten Kota di wilayah Priangan Timur menduduki status sedang (antara 60 sampai dengan 70).

### **Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut**

Secara teoritik, perumusan rencana kerja terlebih dulu diawali oleh proses analisis mendalam terhadap persoalan yang muncul atau diperkirakan terdapat dalam dinamika pencapaian visi dan misi. Oleh karenanya perumusan masalah yang telah, sedang maupun yang akan dihadapi menjadi sebuah hal yang tidak boleh dihindari, agar senantiasa dapat terjaga korelasi yang positif antara visi, misi, serta kebijakan yang tepat untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Berbagai isu regional dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan serta mengacu pada isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis yang dapat menjadi bahan perumusan kebijakan utama (*core policy*) pembangunan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- b. Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan
- c. Penguatan Struktur Perekonomian Daerah

- d. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang
- e. Pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Pembangunan kehidupan sosial, politik dan budaya yang demokratis
- g. Penanganan dan pengelolaan asset perusahaan daerah
- h. Penanganan pembentukan wilayah otonomi baru

Adapun untuk arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk kemandirian ekonomi masyarakat dalam kerangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata, serta pengembangan seni dan budaya daerah, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah dengan didukung oleh pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang demokratis menuju masyarakat yang madani.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Garut serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah : “Mewujudkan Kabupaten Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional

maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu. Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Maju; ditunjukkan dengan keberadaan Kabupaten Garut sebagai daerah otonom yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
2. Adil; diindikasikan dengan terselenggaranya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, sehingga meminimalkan konflik sosial dan kesenjangan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pola pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut.
3. Sejahtera; dimanifestasikan dengan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.
4. Berwawasan Lingkungan; ditunjukkan dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensekaskan aktivitas manusia dengan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk menopangnya.
5. Demokratis dalam Politik: Sikap dan kondisi pemerintah Kabupaten Garut yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

6. Menuju Ridlo Allah SWT: sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut yang senantiasa meyakinkan segala tindakan dan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridlo Allah SWT.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Garut, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut ditetapkan dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
2. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

# BAB V

## Potensi Ekonomi Unggulan Daerah

### 5.1 Gambaran Sembilan Sektor Ekonomi Kabupaten Garut

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator ini di gunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu, maka indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Garut. Roda perekonomian yang bergulir di Kabupaten Garut selama tahun 2017 merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan di Garut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut tahun 2017 yang mencapai 4,89 persen, Angka tersebut tercatat merupakan capaian angka yang cukup tinggi selama lebih dari satu dekade terakhir. Fenomena tersebut dipicu oleh kinerja pada kategori pertanian di Kabupaten Garut yang masih mampu tumbuh sebesar 2,32 persen. Di samping itu sektor lainnya juga memperlihatkan perkembangan yang positif, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori jasa Lainnya yang mampu tumbuh 13,55 persen.

Selanjutnya, PDRB per kapita yang mencerminkan produktivitas per penduduk di Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama periode 2013-2017, dengan pertumbuhan di atas 5 persen per tahun. Pada tahun 2017 PDRB per kapita, yang dihitung atas dasar harga berlaku, di Kabupaten Garut tercatat sebesar Rp 18,54 juta, atau meningkat 7,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan Jawa Barat, angka tersebut masih tampak lebih rendah, dimana PDRB per kapita propinsi Jawa Barat telah mencapai Rp 37,18 juta di tahun 2017.

Sementara itu, PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, selama periode 2013 - 2017 mengalami peningkatan sebesar 17,69 persen, atau dari Rp 11,64 juta menjadi Rp 13,70 juta. Dengan asumsi distribusi pendapatan yang tetap, PDRB per kapita tersebut merupakan gambaran dari perkembangan pendapatan riil per penduduk di Kabupaten Garut yang merupakan cerminan dari daya beli masyarakat. Sehingga, secara makro dapat dikatakan pendapatan riil masyarakat Kabupaten Garut meningkat dengan rata-rata 3,53 persen pertahun.

Kinerja ekonomi Kabupaten Garut tampak masih sangat mengandalkan sektor pertanian dengan kontribusi yang mencapai hampir 40 persen terhadap perekonomian. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian di tahun 2017 sebesar 37,89 %, jika dibandingkan empat tahun sebelumnya mengalami penurunan 1,22 persen. Sementara perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor kontribusinya 19,73 persen diikuti Industri pengolahan dengan kontribusinya 7,75 persen.

Kedudukan dan peran Kabupaten Garut secara eksternal dapat dilihat baik dalam konteks nasional, maupun dalam konteks regional Provinsi Jawa Barat. Secara nasional rencana tata ruang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997. Dalam RTRWN ini telah ditetapkan kawasan andalan dan fungsi kota-kota secara nasional. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kabupaten Garut merupakan bagian dari Kawasan Andalan Priangan Timur bersama Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, yang pengembangannya diarahkan pada pembangunan sektor unggulan yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, kehutanan, pariwisata, beserta jasa, industri dan usaha.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, maka menempatkan Kabupaten Garut sebagai bagian dari wilayah pengembangan tengah dengan pusat pertumbuhan Kota Bandung. Untuk itu maka kebijakan

pembangunan di Kabupaten Garut turut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur. Selain itu, sesuai Rencana Pengembangan Kawasan Tertentu di Jawa Barat, Kabupaten Garut juga dijadikan sebagai Kawasan Khusus yang akan dikembangkan terkait statusnya sebagai daerah tertinggal dan sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jawa Barat.

Berdasarkan RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat, peran Kabupaten Garut terkait dengan kebijakan struktur ruang wilayah Jawa Barat yang menetapkan dua kategori wilayah, yaitu wilayah utama dan wilayah penunjang, dalam hal ini Kabupaten Garut sebagai wilayah penunjang tengah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah utama bersama-sama dengan wilayah Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Dalam rencana pemanfaatan ruang RTRW Provinsi yang menunjukkan alokasi dominan aktivitas ekonomi, Kabupaten Garut dialokasikan untuk kegiatan pertanian lahan kering, hutan produksi, perkebunan, dan perikanan.

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut Tahun 2011- 2031 sebagai upaya mewujudkan ruang Kabupaten Garut sebagai daerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas :

- a. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi, berupa perkotaan Rancabuaya yang berada di kecamatan Caringin;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Bungbulang.
- c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala

kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, terletak di Perkotaan Kadungora; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatu; dan Perkotaan Singajaya.

- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Caringin; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pekenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip, Perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisarupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; dan Perkotaan Selaawi.
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet.

Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi(KSP) meliputi:

- a. KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisurupan.
- b. KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten terdiri atas:
  - 1) KSK Perkotaan Garut terletak di kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.
  - 2) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler; dan Tarogong Kidul.
  - 3) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatu, dan Malangbong.
  - 4) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.
  - 5) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
  - 6) KSK Agropolitan terletak di kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.
  - 7) KSK Minapolitan terletak di kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan.
  - 8) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.

- b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh berada di kecamatan Cikelet; dan Kampung Adat Pulo berada di kecamatan Leles.
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas berada di kecamatan Tarogong Kaler.

Kedekatan posisi Kabupaten Garut dengan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bandung tidak hanya memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan daerah tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu banyak terserapnya sumberdaya oleh pusat (*backwash effect*). Hal ini mengakibatkan daerah menjadi relatif tertinggal dan tidak dapat tumbuh secara maksimal. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan di Kabupaten Garut adalah ditetapkannya 85% wilayah Kabupaten Garut sebagai kawasan konservasi berfungsi lindung, sehingga kurang memancing investasi. Hal tersebut merupakan indikasi timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan di Kabupaten Garut, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana daerah. Untuk itu, maka pembangunan daerah harus lebih diarahkan pada bagaimana mendorong daerah untuk tumbuh secara mandiri berdasarkan potensi sosial ekonomi dan karakteristik spesifik wilayah yang dimilikinya.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak pada laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pada sektor industri. Kegiatan sektor industri di Kabupaten Garut masih didominasi oleh industri kecil dan menengah, yang pada umumnya merupakan industri rumah tangga. Potensi industri kecil yang menjadi komoditas andalan Kabupaten Garut terdiri dari industri penyamakan kulit, jaket kulit, industri batik, sutera alam, dodol, minyak akar wangi dan industri kerajinan anyaman bambu. Dari berbagai komoditi yang ada, tercatat beberapa diantaranya telah menembus pasar ekspor seperti: teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, sepatu

dan sandal kulit, Dodol Garut, kulit tersamak dan kain sutera. Namun demikian, peran sektor ini belum menjadi sektor andalan dalam kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor ini masih perlu dikembangkan dan dioptimalkan, sehingga dapat menopang aktivitas perekonomian dan pembangunan Kabupaten Garut.

Perkembangan usaha ekspor ditandai dengan keragaman komoditas dan nilai ekspor. Jenis komoditas yang diekspor terdiri dari teh hitam, teh hijau, karet, bulu mata palsu, minyak akar wangi, jaket kulit, kulit tersamak dan kain sutera dengan negara tujuan ekspor yaitu: USA, Inggris, Belanda, Rusia, Mesir, Jepang, Singapura, Irak, Iran, Srilanka, India, Korea Selatan, Kanada, Jerman, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Menghadapi pelaksanaan otonomi daerah dan menyongsong diberlakukannya AFTA (*Asean Free Trade Area*), Kabupaten Garut menghadapi berbagai masalah yang harus segera ditangani baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Menghadapi keadaan yang berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian terlebih kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut sangat mengharapkan akan peningkatan kewirausahaan yang mandiri dan profesional yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Garut.

Kabupaten Garut dengan jumlah penduduk terbesar di Wilayah Priangan Timur, merupakan kabupaten dengan kontribusi PDRB tertinggi terhadap pembentukan PDRB di Jawa Barat. Pada tahun 2017 Kabupaten Garut memberikan sumbangan PDRB sekitar Rp 47.993 miliar, atau 2,69 persen terhadap perekonomian Jawa Barat. Di sisi lain, tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Priangan Timur secara umum relatif rendah, ini tampak dari perbandingan besaran PDRB per kapita di wilayah tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Garut menempati posisi terbesar keempat setelah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Sementara PDRB per kapita terendah ditempati oleh Kabupaten Tasikmalaya. Perbandingan

beberapa indikator terpilih lainnya, yakni laju pertumbuhan ekonomi, dan IPM juga memperlihatkan perbedaan capaian yang tidak terlalu signifikan. Namun variasi kabupaten/kota yang cukup tinggi di Wilayah Priangan Timur tampak pada persentase penduduk miskin. LPE bervariasi antara 4,89 persen sampai 6,07 persen di tahun 2017. LPE Kabupaten Garut menempati peringkat kelima setelah Kota Banjar. Selanjutnya capaian IPM kabupaten/kota di Wilayah Priangan Timur berkisar antara 64,14 sampai 71,51. Capaian IPM Kabupaten Kota di wilayah Priangan Timur menduduki status sedang (antara 60 sampai dengan 70). Berdasarkan data, tampak hal menarik untuk dikaji, yaitu angka IPM yang tinggi tidak selalu terkait dengan angka kemiskinan yang rendah. Kota Tasikmalaya yang memiliki angka IPM tertinggi di Priangan Timur, justru memiliki tingkat kemiskinan yang juga paling tinggi.

#### PDRB adh Berlaku Kabupaten Garut

Tahun 2013-2016 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[6]	[7]	[8]	[9]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.118.170,86	14.504.538,16	15.833.975,54	17.267.206,69
B	Pertambangan dan Pengalihan	917.632,68	929.397,14	719.167,01	728.771,18
C	Industri Pengolahan	2.438.999,91	2.723.905,02	3.087.593,03	3.430.876,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.003,51	17.844,04	22.001,51	26.479,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.990,05	16.908,52	18.457,92	21.128,11
F	Konstruksi	1.958.534,01	2.157.687,58	2.398.963,25	2.630.860,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.028.266,52	7.569.557,83	8.187.964,92	8.802.819,37

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016
[1]	[2]	[6]	[7]	[8]	[9]
H	Transportasi dan Pergudangan	1.128.396,83	1.294.335,85	1.578.799,53	1.740.600,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.114.880,82	1.219.424,30	1.327.358,67	1.482.676,45
J	Informasi dan Komunikasi	637.000,66	708.271,15	807.730,37	913.063,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	881.338,74	1.007.840,66	1.146.515,16	1.309.890,22
L	Real Estate	553.676,44	607.887,45	661.148,05	715.597,24
M,N	Jasa Perusahaan	161.894,95	176.781,83	198.392,32	219.690,19
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.286.500,24	1.399.802,77	1.524.683,04	1.609.520,89
P	Jasa Pendidikan	1.303.486,09	1.518.429,05	1.767.657,35	1.946.235,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.419,91	214.854,94	263.042,26	300.510,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya	931.318,31	1.017.077,94	1.139.908,56	1.303.401,20
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>33.687.510,52</b>	<b>37.084.544,22</b>	<b>40.683.358,46</b>	<b>44.449.327,17</b>

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Garut selama tahun 2013-2016 meningkat Rp.1,86 trilyun dari sebesar Rp. 31,9 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp.33,7 trilyun pada tahun 2016 ). Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Garut secara makro berkembang positif selama Tahun 2013-2016.

Uraian	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.957.009,41	11.161.548,24	11.197.706,63	11.705.824,63
Pertambangan dan Penggalian	843.340,70	853.577,97	869.927,68	870.459,93
Industri Pengolahan	2.157.364,29	2.294.637,75	2.475.797,35	2.655.393,69
Pengadaan Listrik dan Gas	18.050,68	19.305,65	19.954,29	21.129,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.143,63	14.852,22	15.767,11	16.719,44
Konstruksi	1.741.046,97	1.843.072,32	1.966.005,24	2.107.164,42
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.146.664,91	6.524.503,25	6.810.509,69	7.183.454,71
Transportasi dan Pergudangan	1.007.361,09	1.088.865,30	1.193.941,17	1.280.776,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	979.219,27	1.029.765,08	1.117.524,43	1.202.354,45
Informasi dan Komunikasi	637.574,54	733.784,53	837.335,35	945.016,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	753.151,02	815.703,55	879.800,51	960.171,09
Real Estate	496.994,53	535.114,01	564.170,70	599.600,62
Jasa Perusahaan	147.603,17	155.150,13	168.583,26	183.434,28
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.039.243,02	1.047.869,58	1.102.599,31	1.129.282,21
Jasa Pendidikan	1.148.221,46	1.288.697,48	1.448.367,10	1.556.704,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182.655,92	194.673,45	224.581,57	247.388,44
Jasa Lainnya	868.837,17	940.510,50	1.026.473,16	1.121.627,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.138.481,77	30.541.631,03	31.919.044,56	33.786.502,37

Sampai dengan tahun 2017, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai 37,89% yang mengalami penurunan 0,96% dibandingkan tahun 2016. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok

untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayursayuran dan juga padi. Kontribusi sektor pertanian banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (Tabama), diikuti oleh sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, akselerasi kinerja sektor pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya.

Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Potensi lain dalam sektor pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Dilain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan.

Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya. Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan pada tahun 2017 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran.

Pada dasarnya, subsektor Hotel dan Restoran, di Kabupaten Garut masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyak lokasi pariwisata di Garut yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, atau bahkan sampai skala internasional. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat (propensity to consume) yang relatif tinggi membuat sektor ini berkembang cukup baik. Kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dari sisi pendanaan, sektor perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan sektor pertanian yang cenderung padat karya. Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2013-2016 yaitu mencapai sebesar 7,7%. Namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turut mendorong struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian, sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah

hasil pertanian. Untuk itu roda perekonomian Kabupaten Garut dipandang dapat bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian, yang merupakan keunggulan wilayah yang dapat memperpanjang rantai agribisnis, sehingga produksi Kabupaten Garut dapat berupa barang-barang industri hasil pertanian. Sementara itu peranan sektor jasa terhadap perekonomian di Kabupaten Garut selama periode tahun 2013-2016 secara konstan menunjukkan trend yang terus meningkat dari sebesar 9,14% pada tahun 2015 menjadi sebesar 9.17% pada tahun 2016. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya kontribusi subsektor jasa pemerintahan serta subsektor jasa swasta meliputi jasa perorangan dan rumah tangga, jasa sosial kemasyarakatan serta jasa hiburan dan rekreasi.

Apabila sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok (primer, sekunder dan tersier), maka terlihat adanya fenomena umum, yakni pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Garut selama periode 2013-2016 dari primer ke arah sekunder dan tersier yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian di Kabupaten Garut. Kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonomi makro, yang diungkapkan oleh A.G.B. Fisher, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk di suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer ke sekunder. Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara sektoral merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada sektor yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Secara makro, pengukuran LPE dapat diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2010.

Sektor Pertanian secara umum merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana yang memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk

pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan). Sektor perdagangan dapat dijadikan suatu indikator kinerja perekonomian secara umum. Pada tahun 2017 pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Garut tampak dipicu oleh peningkatan kedatangan wisatawan yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Garut.

### Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

#### Kabupaten Garut Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
[2]	[5]	[6]	[7]	[8]
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,23	1,87	0,32	4,54
Pertambangan dan Penggalian	6,58	1,21	1,92	0,06
Industri Pengolahan	6,35	6,36	7,89	7,25
Pengadaan Listrik dan Gas	5,31	6,95	3,36	5,89
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,29	5,01	6,16	6,04
Konstruksi	7,42	5,86	6,67	7,18
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52	6,15	4,38	5,48
Transportasi dan Pergudangan	4,17	8,09	9,65	7,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,55	5,16	8,52	7,59
Informasi dan Komunikasi	9,22	15,09	14,11	12,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,12	8,31	7,86	9,14
Real Estate	7,43	7,67	5,43	6,28
Jasa Perusahaan	6,43	5,11	8,66	8,81
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(2,99)	0,83	5,22	2,42

Jasa Pendidikan	8,65	12,23	12,39	7,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,36	6,58	15,36	10,16
Jasa Lainnya	5,81	8,25	9,14	9,27
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,76</b>	<b>4,82</b>	<b>4,51</b>	<b>5,85</b>

Dengan mengelompokkan sektor ekonomi menjadi tiga kelompok, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, peningkatan kinerja tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada kelompok sektor tersier, dengan pertumbuhan sebesar 6,46%, diikuti oleh kelompok sektor sekunder dengan pertumbuhan sedikit lebih rendah yakni 6,17%. Selanjutnya kelompok sektor primer memperlihatkan peningkatan kinerja terendah, yakni hanya mampu tumbuh sebesar 2,44% jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan mencapai 5,67%. Pertumbuhan produksi pada kelompok sektor primer tampak berfluktuasi dan tumbuh relatif rendah dibanding kelompok sektor yang lain. Kondisi ini tidak terlepas dari besarnya kontribusi sektor pertanian dengan peningkatan produksi yang cenderung relatif rendah pada semua sektor pembentuknya. Subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan terkecil dibandingkan pertumbuhan subsektor lain, ini terjadi diakibatkan oleh penurunan produksi. Peningkatan volume produk pada kelompok sektor tersier pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,46% serta mengalami percepatan diatas sektor lainnya, dan dibandingkan dengan tahun 2009 terdapat peningkatan sebesar 1,39% dari sebesar 5,07% pada tahun 2009. Pertumbuhan yang cukup tinggi kelompok sektor ini didorong/dipicu oleh membaiknya kinerja pada sektor perdagangan sektor keuangan dan sektor jasa-jasa sebagai sektor pendukungnya. Walaupun kelompok sektor ini merupakan kontributor terkecil terhadap perekonomian Kabupaten Garut, namun perkembangan kinerja kelompok sektor ini tampak sangat konsisten selama periode 2009-2012, dimana pertumbuhannya di atas 5% di setiap tahunnya. Sementara itu, kinerja kelompok sektor sekunder menunjukkan kinerja yang berfluktuatif dan cenderung menurun selama periode 2009-2012. Pertumbuhan yang cukup tinggi dari kelompok ini hanya terjadi pada sektor konstruksi. Dalam konteks pembangunan

ekonomi Jawa Barat yang memiliki struktur ekonomi berbasis Industri Pengolahan, sektor pertanian pun merupakan sektor yang sangat penting karena sebagian besar penduduk di Jawa Barat masih bermatapencaharian di sektor ini dan juga memberikan share yang masih cukup tinggi terhadap perekonomian. Kabupaten Garut merupakan daerah yang memberikan kontribusi nilai tambah di sektor pertanian yang paling dominan di Propinsi Jawa Barat. Sampai dengan tahun 2012, sektor pertanian Kabupaten Garut memberikan share sebesar 12,22% terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat. Walaupun sumbangan sektor pertanian Kabupaten Garut tampak sangat dominan, namun secara makro total nilai tambah yang tercipta (PDRB) ternyata masih terlihat sangat kecil, yaitu hanya sebesar 3,18% terhadap perekonomian Jawa Barat dan yang lebih memprihatinkan adalah share tersebut cenderung mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya, dan dimana pada tahun 2000 PDRB Kabupaten mampu memberikan kontribusi sebesar 3,73% terhadap perekonomian Jawa Barat. Penurunan share tersebut dapat dimaklumi karena penciptaan nilai tambah untuk Kabupaten Garut masih sangat mengandalkan sektor pertanian yang relatif lebih lambat dibandingkan Jawa Barat yang pembentukan PDRB nya telah berbasis sektor industri pengolahan. Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama dibandingkan industri pengolahan. Selain itu, efek multifier terhadap perekonomian secara makro yang ditimbulkan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektifitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik backward maupun foreward, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Dominannya share produk sektor pertanian Kabupaten Garut terhadap penciptaan nilai tambah pertanian di Propinsi Jawa Barat dibandingkan tingkat kabupaten/kota lainnya, tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages) Kabupaten Garut, seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian disertai jumlah penduduk yang besar. Hal tersebut berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan

hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan share-nya terhadap produk komoditi yang sama di Jawa Barat, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi. Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Garut periode 2000-2012 sangat berbeda dengan Jawa Barat, tiga sektor penyumbang terbesar Kabupaten Garut berturut-turut sebagai berikut: Pertanian; Perdagangan, hotel dan restoran; dan Lembaga Keuangan, sedangkan di Jawa Barat berturut-turut sebagai berikut: Industri Pengolahan; Perdagangan, hotel dan restoran; dan Pertanian. Secara umum pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Garut dan Jawa Barat terlihat sama, yakni pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Kondisi tersebut tampak dari kontribusi kelompok sektor primer yang mengalami penurunan diikuti peningkatan pada sektor sekunder dan tersier. Kendati demikian dari sisi kecepatan pergeseran, Propinsi Jawa Barat tampak lebih cepat dibandingkan Kabupaten Garut, ini terlihat dari penurunan sektor primer Jawa Barat yang lebih tinggi dibandingkan Garut, dimana pada periode 2000-2012 share sektor primer di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 7,21 persen, sedangkan pada Kabupaten Garut hanya mengalami penurunan sebesar 6,29% pada periode yang sama. Hal tersebut merupakan refleksi bahwa kecepatan pertumbuhan kelompok sektor-sektor primer baik di Kabupaten Garut maupun di Jawa Barat relatif lebih lambat dibandingkan kelompok sektor lainnya. Jika diamati kontribusi penciptaan nilai tambah sektoral Kabupaten Garut terhadap Jawa Barat pada periode 2000-2012, tampak hanya tiga sektor yang mengalami peningkatan kontribusi, yakni sektor pertanian dari 11,82% menjadi 12,22%, sektor industri pengolahan dari 0,51% menjadi 0,68% dan sektor penggalan dari 0,11% menjadi 0,21%. Kondisi tersebut menggambarkan rata-rata kecepatan pertumbuhan dari tiga sektor tersebut di Kabupaten Garut berada diatas rata-rata pertumbuhan sektor yang sama di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Sedangkan enam sektor lainnya mengalami penurunan kontribusi, dimana sektor yang mengalami penurunan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa diikuti bangunan/konstruksi yang masing-masing menurun sebesar 2,25% dan 1,72%. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari kecepatan pertumbuhan sektor jasa-jasa dan konstruksi

di Propinsi Jawa Barat cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Garut. Berbeda dengan tahun sebelumnya, secara makro pada tahun 2012, ekonomi Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan sebesar 4,61% yang lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat sebesar 6,21% ataupun dengan Indonesia sebesar 6,23%. Jika dikaji secara sektoral, tampak ada tiga sektor di Kabupaten Garut yang memiliki kinerja di atas sektor yang sama di Jawa Barat, yakni sektor industri, sektor pertanian dan sektor pertambangan. Sedangkan enam sektor lainnya memperlihatkan kinerja dibawah kinerja sektor yang sama di Jawa Barat. Pertumbuhan perekonomian sektor yang paling potensial di Kabupaten Garut yakni pertanian di tahun 2012 mencapai sebesar 2,43%, jauh di atas sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat yang turun dibawah 1%. Pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Garut tersebut tampak cukup efektif dalam mendongkrak perekonomian secara makro. Walaupun perekonomian Jawa Barat maupun Nasional menunjukkan kinerja yang relatif baik, namun dari sisi pondasi ekonomi yang terbentuk, masih tampak rapuh dan rentan terhadap gejolak yang terjadi di pasar internasional. Sebaliknya Kabupaten Garut, yang lebih mengandalkan sektor pertanian, walaupun menunjukkan kinerja yang relatif lambat namun lebih tahan terhadap gejolak yang terjadi. Kendati demikian, dengan hanya mengandalkan kinerja sektor pertanian tentu saja perekonomian Kabupaten Garut tidak akan mampu bersaing dan akan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Sehingga, dalam perjalanannya menuju wilayah transisi industrialisasi, Kabupaten Garut sangat perlu untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh, diantaranya menciptakan komoditi-komoditi industri yang mandiri atau industri yang lebih memanfaatkan sumberdaya domestik dibanding impor. Indikator ekonomi lainnya yang dapat memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraannya bertambah baik. Sebaliknya penurunan pendapatan per kapita berarti tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Pendapatan per kapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan menggunakan data PDRB sebagai

pendekatan pendapatan, perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Garut selama periode tahun 2009-2012 tampak cukup mengagumkan, dengan pertumbuhan di atas 7%. Pada tahun 2012 pendapatan perkapita diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 8,16% atau dari semula pada tahun 2011 sebesar Rp.11.233.508 menjadi Rp. 12.150.453 pada tahun 2012. Peningkatan ini dapat dikatakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 3,87% yang terjadi sepanjang tahun 2012. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Kabupaten Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun. Untuk lebih menggambarkan perkembangan daya beli atau pendapatan riil dari masyarakat dapat diamati perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Hal yang menarik untuk dikaji adalah walaupun pendapatan perkapita pada periode 2009-2012 meningkat relatif tinggi yang berkisar antara 7,91% sampai 11,10%, namun daya beli masyarakat secara riil pada periode yang sama hanya mengalami peningkatan berkisar 3,18% sampai 4,92% yang tercermin dari peningkatan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan sehingga mengkoreksi peningkatan daya beli yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan yang diterima. Kendati demikian, dari data tersebut dapat dilihat pendapatan riil yang sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat Kabupaten Garut secara makro di sepanjang periode 2009-2012 cenderung terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kondisi perkembangan PDRB per kapita di atas merupakan dampak dari kecepatan tumbuhnya ekonomi pada wilayah yang berbasis industri jauh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang berbasis pertanian, ini tergambar

dari kecepatan perkembangan PDRB perkapita yang dihitung atas dasar harga konstan Jawa Barat secara makro tampak lebih cepat dibandingkan Kabupaten Garut. Kendati demikian, inflasi yang terjadi relatif lebih tinggi wilayah yang berbasis industri dibandingkan yang berbasis pertanian, ini tampak dari kecepatan gap/selisih yang terlihat jauh lebih tinggi PDRB perkapita atas dasar berlaku dibandingkan atas dasar harga konstan. Walaupun secara kasar, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa dari sisi produksi, tingkat harga di Kabupaten Garut yang berbasis pertanian relatif lebih stabil dibandingkan Jawa Barat yang berbasis industri pengolahan.

## **5.2 Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Garut**

Potensi Sektor Unggulan di Kabupaten Garut di bagi menjadi 2, yaitu

1. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

### **a. Gambaran Umum**

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang strategis dalam menyumbang perekonomian di Kabupaten Garut terutama dalam kontribusi PDB, Penyedia lapangan kerja dan peyediaan pangan. Perhitungan PDB sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menggunakan pendekatan produksi.

Rincian Rencana Kawasan Budidaya pertanian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan adalah sebagai berikut:

IKOPIN

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Proposi (%)	Lokasi
1	2	3	4	5
1	Kawasan Pertanian			
	a. Pertanian tanaman pangan			
	Pertanian lahan basah	44.028	14,32	Tersebar diseluruh kecamatan
	Pertanian Lahan Kering	60.790	19.78	Tersebar diseluruh kecamatan
	b. Holtikultura	32.108	10,44	Tersebar diseluruh kecamatan
	c. Perkebunan	56.940	18,52	Tersebar diseluruh kecamatan
	d. Perternakan	42.000	12,66	Tersebar diseluruh kecamatan
2	Kawasan Perikanan			
	a. Perikanan Budidaya	26.645	8,67	Tersebar diseluruh kecamatan
	b. Perikanan Tangkap			Kecamatan Pameungpeuk, Cikelet, Cibalong, Pakenjeng, Bungbulang, Mekarmukti, Caringin, Banyuresmi, dan Leles

Sampai dengan tahun 2017, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan (prime mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai 37.89% yang mengalami penurunan 0,96% dibandingkan tahun 2016. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah penduduk yang besar yang berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan kontribusinya, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi.

Kontribusi sektor pertanian banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (Tabama), diikuti oleh sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun demikian, akselerasi kinerja sektor pertanian tersebut masih belum optimal, diantaranya disebabkan hubungan antar subsistem pertanian dan sektor lain (linkages) belum sepenuhnya menunjukkan sinergitas pada skala lokal, regional dan nasional, hal ini tercermin dari pengembangan agroindustri yang belum optimal baik dalam pengolahan maupun pemasarannya. Pengembangan yang bersifat sektoral pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.

#### b. Kondisi UMKM Sektor Unggulan

##### Jumlah Usaha Tanaman Holtikultura di Kabupaten Garut

Jenis Tanaman	Jumlah
Pisang	46.656
Jeruk	6.559
Mangga	17.811
Kunyit	5.435
Jahe	7.088
Kencur	257
Anggrek	17
Mawar	4
Bawang Merah	2.967
Bawang Putih	5
Kentang	6.360
Jenis Tanaman	Jumlah
Cabai	29.144
Cabai Besar	17.757
Cabai Hijau	2.453
Cabai Merah Besar	867
Cabai Merah Kriting	14.712
Cabai Rawit	13.360

Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan  
Kabupaten Garut

Jenis Tanaman	Jumlah
Akasia	10.189
Bambu	36.936
Jati	13.763
Mahoni	28.138
Sengon	68.166
Jabon	6.263
Waru	3.648
Jati Putih	3.255
Suren	12.727

Jumlah Rumah Tangga Budidaya Ikan Kabupaten Garut

Bukan Ikan Hias	
Jenis Ikan Utama	Jumlah Rumah Tangga
(1)	(2)
<b>AIR PAYAU</b>	<b>8</b>
Nila	6
Mujair	1
Udang Putih	1
<b>AIR TAWAR</b>	<b>37.042</b>
Nila	22.511
Mujair	4.951
Mas	4.840
Nilem	3.333
Lele	947
Tawes	217
Bawal Air	106
Tawar	63
Sepat Siam	47
Gurami	27
Tambakan	

Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Bukan Ikan Hias  
Menurut Jenisnya Kabupaten Garut

Jenis Ikan Utama	Jumlah
Nila	22.517
Lele	947
Mas	4.840
Gurame	47
Bandeng	3
Patin	21

Jumlah Rumah Tangga Usaha Perkebunan  
Di Kabupaten Garut

Jenis Tanaman	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Pohon/Lajar/Rumpun		
		Yang Diusahakan/Dikelola	Yang Belum Produksi	Yang Sudah Produksi
AREN/ENAU	14.686	219.841	103.047	75.940
ASAM JAWA	28	81	33	37
CENGKEH	27.062	748.342	240.324	413.952
GAMBIR	1	4	0	2
JAMBU METE	27	374	108	153
JARAK PAGAR	8	227	212	12
KAKAO	462	23.011	6.391	12.357
KAPOK	358	93.601	38.536	45.257
KARET	4.590	2.428.667	1.496.379	450.622
KAYU MANIS	120	6.935	3.504	1.527
KELAPA SAWIT	164	34.704	10.626	7.050
KELAPA	32.451	282.850	51.275	197.919
KEMENYAN	1	8	0	4
KEMIRI	344	2.776	834	1.653
KEMIRI SUNAN	22	599	460	27
KENANGA	42	1.227	986	39
KINA	17	365	32	280
KOPI	19.748	8.473.886	3.275.000	4.088.388
LADA	325	12.058	1.400	6.867
LONTAR	1	12	0	12
MURBAI	6	12.130	1	10.029

PANILI/VANILI	12	311	91	155
PALA	210	2.933	1.377	1.248
PANDAN ANYAMAN	1	4	1	3
PINANG/JAMBE	74	1.369	387	490
SAGU	5	198	0	25
SOGA	1	10	0	3
TEH	4.239	10.783.275	284.657	9.938.314

**Jumlah Rumah Tangga Usaha Tanaman Padi dan Palawija menurut Jenis  
Tanaman dan Keterangan Penjualan Hasil Usaha**

Jenis Tanaman	Keterangan Penjualan Hasil Usaha			Jumlah
	Dijual Seluruhnya	Dijual Sebagian	Tidak Dijual	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Padi</b>				
- Padi Sawah	9.406	93.387	81.514	184.307
- Padi Ladang	440	3.999	7.801	12.240
<b>Palawija</b>				
- Jagung	37.520	14.283	4.716	56.519
- Kedelai	2.048	1.910	472	4.430
- Kacang	5.485	7.093	2.763	15.341
<b>Tanah Hijau</b>				
- Kacang	1.008	754	173	1.935
- Ubi Kayu	11.186	12.237	7.913	31.336
- Ubi Jalar	1.789	3.809	2.435	8.033
- Sorgum	3	3	1	7
- Gandum	4	1	2	7
- Talas	24	236	302	562
- Ganyong	2	9	20	31
- Garut	2	4	3	9

c. Penyerapan Tenaga Kerja, Kredit dan Lainnya

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara sektoral merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada sektor yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Secara makro, pengukuran LPE dapat diukur dari perkembangan besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan, dimana BPS memakai harga konstan tahun 2018. Perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2018 mengalami perkembangan yang cukup positif ditandai oleh pertumbuhan sebesar 4,89 %, yang tidak lepas dari performa ekonomi yang baik pada sektor pertanian yang merupakan sumber pertumbuhan paling dominan yang mampu tumbuh 2,43%. Kenaikan produksi tertinggi di sektor pertanian terjadi pada subsektor peternakan dengan pertumbuhan sebesar 5,17%, sedangkan terendah terjadi pada subsektor kehutanan dengan pertumbuhan sebesar 0,76%. Selanjutnya subsektor tanaman bahan makanan yang merupakan kontributor paling dominan pada sektor pertanian, mengalami penurunan pertumbuhan menjadi sebesar 2,28%. Sektor Pertanian secara umum merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana yang memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, dan hutan).

Dalam konteks pembangunan ekonomi Jawa Barat yang memiliki struktur ekonomi berbasis Industri Pengolahan, sektor pertanian pun merupakan sektor yang sangat penting karena sebagian besar penduduk di Jawa Barat masih bermata pencaharian di sektor ini dan juga memberikan share yang masih cukup tinggi terhadap perekonomian. Kabupaten Garut merupakan daerah yang memberikan kontribusi nilai tambah di sektor pertanian yang paling dominan di Propinsi Jawa Barat.

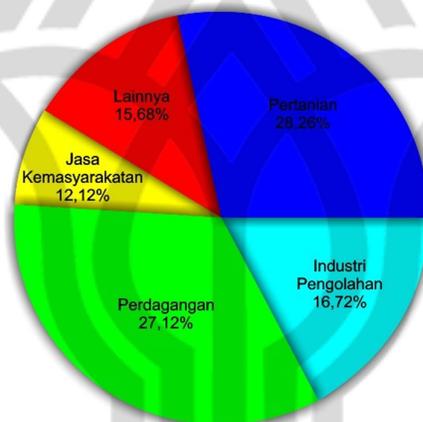
Sampai dengan tahun 2017, sektor pertanian Kabupaten Garut memberikan share sebesar 17,22% terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat. Walaupun sumbangan sektor pertanian Kabupaten Garut tampak sangat dominan, namun secara makro total nilai tambah yang tercipta (PDRB) ternyata masih terlihat sangat kecil, yaitu hanya sebesar 3,18% terhadap perekonomian Jawa Barat dan yang lebih memprihatinkan adalah share tersebut cenderung mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya, dan dimana pada tahun 2017 PDRB Kabupaten mampu memberikan kontribusi sebesar 3,73% terhadap perekonomian Jawa Barat. Penurunan share tersebut dapat dimaklumi karena penciptaan nilai tambah untuk Kabupaten Garut masih sangat mengandalkan sektor pertanian yang relatif lebih lambat dibandingkan Jawa Barat yang pembentukan PDRB nya telah berbasis sektor industri pengolahan.

Kondisi ini disebabkan karena siklus produksi sektor pertanian jauh lebih lama dibandingkan industri pengolahan. Selain itu, efek multifier terhadap perekonomian secara makro yang ditimbulkan sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian, sehingga efektifitasnya dalam mendongkrak perekonomian relatif lebih tinggi. Hal tersebut karena sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan sektor, baik backward maupun forward, yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Dominannya share produk sektor pertanian Kabupaten Garut terhadap penciptaan nilai tambah pertanian di Propinsi Jawa Barat dibandingkan tingkat kabupaten/kota lainnya, tidak lepas dari beberapa keunggulan komparatif (*comparative advantages*) Kabupaten Garut, seperti kondisi tanah yang relatif lebih subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian disertai jumlah penduduk yang besar. Hal tersebut berimplikasi pada sistem pertanian yang tampak sangat beragam dan hampir sebagian besar komoditi produk pertanian sangat dominan share-nya terhadap produk komoditi yang sama di Jawa Barat, seperti berbagai palawija, sayur-sayuran dan juga padi.

**Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut  
Sektor Pertanian Tahun 2016 – 2017**

No	Sektor/sector	Tahun	
		2016	2017
1	Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plantation	22.869.246.504	55.514.340.772
2	Peternakan / Livestock	140.349.013.023	135.464.421.507
3	Perikanan / Fishery		3.487.175.035

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan sektor di Kabupaten Garut :



Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak menampung tenaga kerja tiap tahunnya walaupun mengalami penurunan. Pada tahun 2017, sektor pertanian menampung sebanyak 28,26%, kemudian sektor perdagangan sebanyak 27,22%, sektor jasa sebanyak 12,12%, dan sektor industri pengolahan sebanyak 16,72%.

**Posisi Pinjaman Yang diberikan Rupiah dan Valuta Asing  
Bank Umum dan BPR (Juta Rp)**

No	Sektor/sector	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	83,182	5,320,598	5,140,437

#### d. Potensi Pengembangan Sektor

Potensi dalam sektor pertanian yaitu pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan terutama dalam pengembangan usaha perikanan tangkap di pesisir selatan, usaha budidaya laut, bioteknologi kelautan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Namun kondisi dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang besar ini belum diikuti dengan perkembangan bisnis dan usaha perikanan dan kelautan yang baik. Tingkat investasi sarana dan prasarana pendukung bisnis kelautan serta produksi sumber daya perikanan dan kelautan masih jauh dari potensi yang ada. Di lain pihak, lemahnya kondisi pembudidaya dan nelayan sebagai produsen menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan dan pengelolaan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan. Dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat apabila diperbandingkan dengan sektor lainnya terutama industri manufaktur, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhannya sangat lambat. Pada sisi lain, seiring peningkatan jumlah penduduk tentu saja berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, sehingga luas lahan pertanian memiliki cenderung terus mengalami penurunan. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal positif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Potensi lainnya adalah pergeseran sektor primer, yaitu peternakan ke sektor sekunder di Industri pengolahan, khususnya di bidang peternakan Domba. Peningkatan potensi domba garut sebagai plasma nutfah unggulan Indonesia belum dimaksimalkan. Padahal, domba garut bisa menjadi salah satu penyumbang ketersediaan daging secara nasional sekaligus menjadi identitas ciri khas lokal asli Indonesia. usaha peternakan domba garut diyakini mampu menyumbangkan ketersediaan daging secara lokal dan nasional. Alasannya, dengan perawatan yang relatif mudah, seekor domba garut

mampu menghasilkan daging antara 40-80 kilogram. Selain itu, dengan pengolahan yang benar, kulit domba garut berpotensi menjadi bahan olahan lain seperti jaket atau kerajinan lainnya bernilai ekonomi tinggi. Tantangan dalam pengolahan ini adalah minimnya populasi domba garut. Diperkirakan seorang petani hanya memiliki 10 ekor domba garut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas produksinya, menekankan pada petani dan pembudidaya domba garut agar terus menjaga produktivitas ternak domba dengan meningkatkan proses reproduksi. Dengan cara melakukan proses perkawinan pada domba garut yang siap kawin. Hal itu diyakini akan mampu menjamin ketersediaan ternak domba secara berkelanjutan. Selain itu, Aceng juga mengharapkan setiap peternak yang sudah mahir juga bersedia mengembangkan keahliannya pada masyarakat lainnya. Domba garut juga berpotensi mengangkat Garut dan Indonesia di dunia internasional. Alasannya, domba garut adalah satwa khas atau plasma nutfah asli Indonesia.

#### **e. Tantangan Pengembangan Sektor**

Berdasarkan hasil survey kepada Pelaku Industri tantangan adalah sebagai berikut

##### **a. Akses modal**

Salah satu unsur terpenting dan mendasar dalam proses pembangunan pertanian adalah pada unsur sumber daya manusianya, yaitu petani. Petani berperan dalam proses budidaya hingga produksi hasil pertanian. Petani adalah orang yang bergerak dalam usahatani, mulai dari pengolahan lahan, budidaya tanaman sampai dengan memanen hasil yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun dipasarkan. Petani harus menjadi unsur yang paling diperhatikan dalam pembangunan pertanian.

Hingga saat ini muncul berbagai permasalahan yang dihadapi petani Indonesia. Jika dilihat lebih mendalam soal permasalahan petani, dapat dikatakan bahwa masalah utama petani adalah bagaimana cara mereka mendapatkan hasil panen yang maksimal. Jika petani tidak bisa mendapat hasil panen yang

maksimal, maka tidak akan didapat pula penghasilan. Padahal penghasilan ini yang nantinya akan dibuat untuk mencukupi kebutuhan hidup maupun untuk memulai usahataniya kembali. Petani dalam memulai usahataniya pasti membutuhkan input berupa modal, baik berupa uang maupun sarana produksi pertanian. Apalagi jika petani mengalami kerugian dalam proses usahataniya, baik karena iklim ekstrem maupun hama dan penyakit tanaman.

Permodalan adalah permasalahan paling mendasar yang sering dihadapi petani. Modal sering menjadi kendala seorang petani dalam melakukan usahataniya. Keterbatasan modal juga membuat kuantitas dan kualitas hasil yang didapat petani tidak maksimal. Permasalahan modal ini juga menjadi penyebab utama banyaknya petani yang hidup di bawah garis kemiskinan..

Sifat budidaya yang lebih tergantung dengan alam, kegagalan panen yang dialami petani tentu menjadi permasalahan yang sangat serius. Petani yang tergolong miskin seringkali tidak memiliki tabungan untuk menutupi kerugian usahataniya. Akan muncul masalah bagaimana petani mendapatkan modal untuk memulai kembali usahataniya, mulai dari pembelian bibit, pupuk, pestisida, dan sarana produksi pertanian lainnya. Petani akan dituntut untuk mendapat modal dari pihak lain.

Terdapat beberapa lembaga yang sebenarnya bisa menyediakan modal bagi petani yang membutuhkan, namun sifatnya pinjaman. Pemerintah melalui bank milik negara sudah menyediakan fasilitas melalui kredit. aksesibilitas petani kecil pada sumber kredit, petani kecil atau miskin memiliki banyak kendala untuk mendapat akses modal ke lembaga formal seperti bank, di antaranya:

2. Petani tidak memiliki agunan sertifikat tanah.
3. Pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usahatani yang memberikan siklus produksi musiman.
4. Petani kecil umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang rumit.

Berdasarkan data Survei, menyatakan bahwa hanya 5% petani di Garut yang mengakses kredit di bank akibatnya banyak petani yang melakukan pinjaman ke rentenir dan perorangan lainnya. Terdapat permasalahan kredit melalui perbankan yang dirasakan petani, seperti prosedur yang birokratis, tinggi risiko, dan besarnya suku bunga. Sedangkan jika petani memilih untuk melakukan kredit ke lembaga non bank atau informal tentu akan lebih merugikan karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Berbagai kondisi tersebut tentu sangat memberatkan petani dan bisa menjadi permasalahan baru untuk mendapatkan modal.

Petani membutuhkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Petani umumnya hanya memiliki penghasilan setelah masa panen. Jika lahan petani mengalami cuaca ekstrem maupun serangan hama dan penyakit sehingga gagal panen, harus ada langkah yang cepat agar petani mendapatkan modal kembali untuk memulai usahatannya maupun memulihkan kondisi lahannya. Modal yang dibutuhkan tidak selalu berjumlah besar, namun yang terpenting adalah harus didapatkan secara mudah dan cepat.

Informasi modal tidak kalah penting artinya bagi petani. Ketersediaan informasi modal dapat membantu petani dalam mempermudah dan memperlancar proses peningkatan modal usahatannya. Peningkatan modal usahatani akan berdampak meningkatnya kinerja usahatani dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan usahatani juga. Semakin sering petani mampu memperoleh/mengakses informasi modal maka semakin besar pula kemungkinan petani untuk meningkatkan modal usahatannya. Ini juga yang diharapkan oleh para petani. Mereka juga mengharapkan adanya informasi tentang ketersediaan sumber-sumber penyedia modal bagi peningkatan usahatani mereka. Tidak sampai disana, mereka berharap informasi tersebut mampu mereka peroleh dengan mudah. Dilihat dari kategori tingkat pengaksesan informasi modal pada petani, maka tergolong sangat rendah terlihat dari persentase pencapaian skornya hanya mencapai 35%. Ini berarti kemampuan mereka memperoleh

informasi modal sangat rendah. Rendahnya kemampuan petani memperoleh informasi modal disebabkan oleh banyak penyebab.

Hal-hal yang mengakibatkan rendahnya akses informasi modal pada petani adalah sangat kurangnya informasi tentang lembaga-lembaga pemberi kredit yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan modal dalam kegiatan usahatani. Ini terbukti dari jumlah responden yang mengisi kuesioner, 13,3% menyatakan tidak pernah, 66,7% sangat jarang dan 20% menyatakan jarang mendapat informasi tentang lembaga-lembaga pemberi kredit yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kebutuhan modal. Penyebab lain yang mengakibatkan rendahnya akses informasi modal pada petani adalah sangat kurangnya informasi tentang persyaratan yang diwajibkan oleh pemberi modal. Hal ini dibuktikan 46,7% mengatakan tidak pernah memperoleh informasi tentang persyaratan yang diwajibkan oleh pemberi modal, 36,7% mengatakan sangat jarang, dan 16,6% mengatakan jarang.

Kurangnya informasi tentang besarnya bunga dan waktu yang dibebankan oleh pemberi modal, juga merupakan penyebab rendahnya kemampuan petani memperoleh informasi modal. Ini terlihat dari 46,7% mengatakan tidak pernah memperoleh informasi tentang besarnya bunga dan waktu yang dibebankan oleh pemberi modal, 40% mengatakan sangat jarang, dan 13,3% mengatakan jarang. Kurangnya informasi tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran cicilan juga mengakibatkan rendahnya kemampuan petani dalam memperoleh informasi modal. Ini juga dibuktikan dari 56,7% mengatakan tidak pernah mendapat informasi tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran cicilan, 30% mengatakan sangat jarang, dan 13,3% yang mengatakan jarang. Keterbatasan ini mengakibatkan petani melakukan kegiatan usahatani hanya sebatas modal yang mereka miliki. Ini juga mengakibatkan rendahnya kreativitas dan keinginan mereka dalam mengadopsi inovasi baru. Rendahnya kreativitas dan keinginan untuk menerapkan inovasi baru nantinya akan dapat menurunkan kinerja usahatannya. Agar

kreativitas dan keinginan petani untuk mengadopsi inovasi baru meningkat maka akses informasi modal sangat perlu di sediakan bagi petani.

b. Akses Pasar

Informasi pasar sangat penting artinya bagi petani. Informasi pasar dapat membantu petani dalam proses penjualan produk hasil, dan penentuan harga yang paling menguntungkan bagi mereka. Semakin sering petani mampu memperoleh/mengakses informasi pasar maka semakin banyak pula petani mengetahui peluang-peluang pasar yang menjanjikan. Ini juga yang diharapkan oleh para petani di Kabupaten Garut. Mereka sangat mengharapkan adanya informasi tentang pasar-pasar potensial yang mau menerima produk hasil usahatani mereka. Tidak sampai disana, selain informasi pasar, mereka berharap informasi tersebut mampu terakses oleh mereka. Dilihat dari kategori tingkat pengaksesan informasi pasar pada petani, maka tergolong sangat rendah terlihat dari persentase pencapaian skornya hanya mencapai 25%. Ini berarti kemampuan mereka memperoleh informasi pasar sangat rendah. Rendahnya kemampuan petani disebabkan oleh banyak penyebab. Hal-hal yang mengakibatkan rendahnya akses informasi pasar pada petani adalah sangat kurangnya informasi tentang kualitas produk yang diinginkan konsumen. Ini terbukti 30% menyatakan tidak pernah dan sangat jarang mendapat informasi tentang kualitas produk yang diinginkan konsumen. Ini mengakibatkan petani kurang memperhatikan kualitas produk yang mereka hasilkan.

Penyebab lain yang mengakibatkan rendahnya akses informasi pasar pada petani di Kabupaten Garut adalah sangat kurangnya informasi tentang jumlah kebutuhan konsumen. Hal ini dibuktikan dari 73,3% mengatakan tidak pernah memperoleh informasi tentang jumlah kebutuhan konsumen, 16,7% mengatakan sangat jarang, dan 10% mengatakan jarang. Kurangnya informasi tentang perbedaan harga yang terjadi di tingkat petani, tengkulak dan lembaga pemasaran lainnya, juga

merupakan penyebab rendahnya kemampuan petani memperoleh informasi pasar. Ini terlihat 63,3% mengatakan tidak pernah memperoleh informasi tentang perbedaan harga yang terjadi di tingkat petani, tengkulak dan lembaga pemasaran lainnya, 26,7% mengatakan sangat jarang, dan 10% mengatakan jarang. Kurangnya informasi tentang lembaga-lembaga yang bersedia membeli produk petani juga mengakibatkan rendahnya kemampuan petani dalam memperoleh informasi pasar. Ini juga dibuktikan 73,3% mengatakan tidak pernah mendapat informasi tentang lembaga-lembaga yang bersedia membeli produk mereka, 23,3% mengatakan sangat jarang, dan 3,4% yang mengatakan jarang. Keterbatasan ini mengakibatkan petani umumnya menjual hasil produksi padi dengan sistem tebasan. Penjualan produksi padi dengan sistem tebasan sangat melemahkan posisi petani, karena mereka tidak memiliki posisi tawar. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas hasil produksi mereka, karena baik atau buruk kualitas hasil produksi mereka di jual danga tingkat harga yang sama. Guna meningkatkan hasil produksi, kualitas hasil produksi, dan harga, maka akses informasi pasar perlu di perbaiki menjadi lebih baik

c. Informasi dan Teknologi

Informasi teknologi juga tidak kalah penting artinya bagi petani. Informasi teknologi dapat membantu petani dalam memperlancar dan mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan usahatani di lahan garapannya. Semakin sering petani mampu memperoleh/mengakses informasi teknologi maka semakin mudah proses kegiatan usahatani yang mereka jalani dan hasil produksinya pun akan semakin baik. Hal serupa juga sangat diharapkan oleh para petani. Mereka sangat mengharapkan adanya informasi tentang penggunaan teknologi-teknologi tepat guna sesuai kebutuhan mereka dan mudah dalam penerapannya. Disamping itu diharapkan informasi tersebut mampu terakses oleh mereka. Dilihat kategori tingkat pengaksesan informasi teknologi pada petani , maka tergolong rendah terlihat dari

persentase pencapaian skornya hanya mencapai 36,9%. Ini berarti kemampuan mereka memperoleh informasi teknologi masih dikatakan rendah. Rendahnya kemampuan petani disebabkan oleh banyak penyebab. Hal-hal yang mengakibatkan rendahnya akses informasi teknologi pada petani adalah sangat kurangnya informasi tentang teknologi pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT). Ini terbukti dari 20% menyatakan tidak pernah, 50% menyatakan sangat jarang, 26,7% menyatakan jarang, dan 3,3% menyatakan sering mendapat informasi teknologi pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT). Penyebab lain yang mengakibatkan rendahnya akses informasi teknologi pada petani adalah sangat kurangnya informasi tentang ketersediaan teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan usahatani/budidaya. Hal ini dibuktikan 43,3% mengatakan tidak pernah memperoleh informasi tentang jumlah kebutuhan konsumen, 36,7% mengatakan sangat jarang, 16,7% mengatakan jarang, dan 3,3% menyatakan sering. Kurangnya informasi tentang pihak-pihak penyedia teknologi, juga merupakan penyebab rendahnya kemampuan petani memperoleh informasi teknologi. Ini terlihat dari 53,3% mengatakan tidak pernah memperoleh informasi tentang pihak-pihak penyedia teknologi, 33,3% mengatakan sangat jarang, dan 13,4% mengatakan jarang. Keterbatasan ini mengakibatkan petani umumnya melakukan kegiatan usahatani kurang efisien. Pada prinsipnya penggunaan teknologi tepat guna bertujuan untuk mengefisienkan kinerja usahatani. Pengefisienan kinerja usahatani diharapkan dapat mengakibatkan peningkatan produksi atau mengurangi biaya produksi, sehingga dengan demikian pendapatan usahatannya menjadi meningkat. Peningkatan pendapatan petani merupakan tujuan akhir setiap kegiatan usahatani. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan/pendapatan petani maka akses informasi teknologi perlu ditingkatkan.

Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB mencapai sebesar 26,62%

(angka sangat sementara) yang mengalami penurunan 0,04% dibandingkan tahun 2009 sebesar 26,66%. Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. Pada dasarnya, subsektor Hotel dan Restoran, di Kabupaten Garut masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyak lokasi pariwisata di Garut yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, atau bahkan sampai skala internasional. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat (*propensity to consume*) yang relatif tinggi membuat sektor ini berkembang cukup baik. Kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di Kabupaten Garut yang infrastrukturnya terlihat masih sangat minim dan dari sisi pendanaan, sektor perdagangan memerlukan dana yang relatif lebih besar karena cenderung lebih lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan sektor pertanian yang cenderung padat karya.

## 2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

### a. Gambaran Umum

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang strategis dalam menyumbang perekonomian di Kabupaten Garut terutama dalam kontribusi PDB, Penyedia lapangan kerja dan pendukung kegiatan pariwisata.

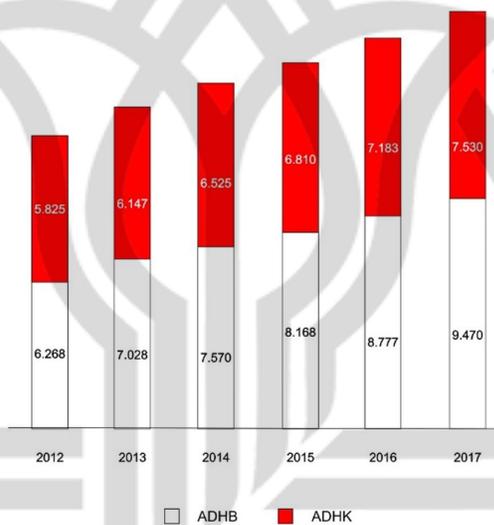
Perkembangan volume perdagangan merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati perkembangan volume produksi dan impor barang di suatu wilayah. Semakin besar volume barang yang diperdagangkan memiliki kecenderungan semakin maju perekonomian di wilayah bersangkutan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan produksi barang,

secara makro perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Garut selama 2012 - 2017 relatif cepat. Kondisi ini tampak dari laju pertumbuhan penciptaan nilai tambah, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan yang cukup tinggi pada periode tersebut. Pertumbuhan NTB perdagangan, yang dihitung atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan pertumbuhan nilai barang yang diperdagangkan pada periode 2013 - 2017 berkisar antara 7,45 persen sampai 12,13 persen. Sementara, pertumbuhan NTB perdagangan yang dihitung atas dasar harga konstan, yang lebih menggambarkan perkembangan volume riil barang yang diperdagangkan, berkisar antara 4,38 persen sampai 7,22 persen pada periode yang sama. Dengan kontribusi yang mencapai lebih dari 19 persen terhadap perekonomian, tidak mengherankan jika perdagangan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut yang cukup dominan.

Ukuran volume perdagangan juga dapat dilihat dari banyaknya fasilitas pasar beserta jumlah kios, los dan PKL yang ada di setiap pasar. Pada tahun 2015, jumlah pasar yang dikelola Pemda Kabupaten Garut tampak masih cukup minim, yakni hanya sebanyak 16 pasar dengan jumlah kios sebanyak 6.587 unit. Namun dari sejumlah kios tersebut, 50,10 persen diantaranya tidak beroperasi, atau sebanyak 3.300 kios masih tutup. Selanjutnya, jumlah los yang ada pada 16 pasar tersebut berjumlah 2.158 los dengan 1.049 los masih belum berfungsi. Sementara jumlah pedagang kaki lima (PKL) di lokasi pasar-pasar di Kabupaten Garut sebanyak 2.804 pedagang. Sebagai wilayah yang mengalami surplus produk-produk sektor pertanian yang cukup besar, pengembangan ekspor di Kabupaten Garut merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang sangat potensial. Mengingat sifat produk pertanian yang mudah rusak, untuk menciptakan produk-produk ekspor unggulan diperlukan penanganan pasca panen yang sangat khusus dengan teknologi yang tidak sederhana. Pada tahun 2010, nilai ekspor 11 komoditi unggulan di Kabupaten Garut tercatat mencapai 17.763 ribu US

\$. Komoditi ekspor dengan nilai tertinggi adalah komoditi teh hitam, dengan nilai mencapai 7.708 ribu US \$, atau 43,39 persen dari total ekspor 11 komoditi tersebut. Komoditi ekspor lainnya yang juga bernilai cukup besar adalah bulu mata palsu dengan nilai ekspor sebesar 4.730 ribu US \$, disusul komoditi karet dan minyak akar wangi dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 1.754 dan 1.416 ribu US \$.

Gambar Trend Penciptaan NTB Perdagangan di Garut Tahun 2012-2017 (Milyar)



b. Kondisi UMKM Sektor Unggulan

**Statistik Usaha Perdagangan Formal dan Pasar**

Rincian	Satuan	Jumlah
Pasar (dikelola pemda)		
Jumlah Pasar	Unit	16
Jumlah Kios	Unit	6.587
- Berfungsi	Unit	3.287
- Tidak berfungsi	Unit	3.300
Jumlah Los	Unit	2.158
- Berfungsi	Unit	1.109
- Tidak berfungsi	Unit	1.049
Jumlah PKL	Pedagang	2.804

### Data Jumlah Hotel di Wilayah Kabupaten Garut

Tahun	Hotel					Akomodasi Lainnya
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5	
2011		3	4			108
2012		3	4			114
2013		3	4			120
2014		3	4			112
2015		3	5			122

### Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Garut

Tipe Badan Hukum	2014	2015	2016	2017
Perseroan Terbatas	278	161	257	149
CV/Firma	672	438	425	216
Koperasi	8	36	29	7
Perorangan	1.040	863	529	57
Lainnya	0	0	0	0
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.998</b>	<b>1.498</b>	<b>1.240</b>	<b>429</b>

c. Penyerapan tenaga kerja, Kredit dan Lainnya

### Posisi Pinjaman Yang diberikan Rupiah dan Valuta Asing

#### Bank Umum dan BPR (Juta Rp)

No	Sektor/sector	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,595,099	2,921,890	3,214,041
2	Penyedia Akomodasi Makan dan Minum	155,935	165,083	163,865

Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak menampung tenaga kerja tiap tahunnya walaupun mengalami penurunan. Pada tahun 2017, sektor pertanian menampung sebanyak 28,26%, kemudian sektor perdagangan sebanyak 27,22%, sektor jasa sebanyak 12,12%, dan sektor industri pengolahan

sebanyak 16,72%. Pertumbuhan bisnis perdagangan eceran naik berupa minimarket, supermarket, maupun hypermarket semakin meningkat pesat. Berbagai jenis usaha perdagangan tersebut saling bersaing di Kabupaten Garut. Untuk jenis usaha minimarket, tidak hanya yang berlabel nasional atau internasional tetapi minimarket lokal juga mulai banyak di daerah. Jenis minimarket yang berlabel nasional antara lain Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Sedangkan yang berlabel internasional. Sementara yang berlabel local antara lain Yo-Mart, SB-Mart dan lain-lain. Banyaknya minimarket lokal ini mengikuti jejak minimarket nasional yang sudah terlebih dahulu sukses berdiri di suatu daerah. Dalam melakukan usaha minimarket ada 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Lokasi, pemilihan lokasi harus dengan melakukan pemetaan untuk mengetahui tempat dimana banyak aktivitas orang dan mengetahui area perdagangan, dan melihat siapa pesaingnya yang dekat dengan lokasi yang akan dipilih,
2. Disain toko, perlu dipikirkan bagaimana menampilkan toko yang menarik bagi pembeli,
3. Pemasaran atau promosi, perlunya memilih produk yang berkualitas, menetapkan harga, dan membuat promosi yang selalu diingat oleh pembeli,
4. SOP, perlu adanya mekansime atau sistem kerja yang sederhana tetapi bisa dijalankan dengan efektif dan mudah,
5. Teknologi informasi, perlunya memilih software yang cocok untuk bisnisnya.

#### d. Potensi Pengembangan Sektor

Peluang usaha ini juga dilihat dari masih rendahnya rasio perbandingan antara jumlah usaha dengan jumlah penduduk. Dalam menjalankan usaha perdagangan tersebut, ada berbagai hambatan dan tantangan yang harus dilalui dan dicari pemecahannya. Berbagai hambatan dan tantangan baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari pihak eksternal atau masyarakat selaku pelaku usaha dan penerima manfaat. Hambatan tersebut antara lain :

1. Dari sisi ketersediaan tempat atau lokasi : semakin sulit mencari lahan untuk mendirikan usaha perdagangan eceran terutama untuk jenis pasar tradisional dan toko modern sejenis minimarket misalnya Indomart, Alfamart dan lain-lain. Keterbatasan lahan ini terutama di kota-kota besar karena banyaknya lahan yang digunakan untuk membangun usaha perdagangan berupa supermarket atau hypermarket, mendirikan bangunan hotel, dan perkantoran swasta yang semakin banyak. Selain itu, kurang ketatnya ijin pendirian minimarket dari pemerintah daerah sehingga terlalu banyak minimarket yang lokasinya saling berdekatan.
2. Dari sisi permodalan : masih terbatasnya akses pemodalannya bagi usaha kecil menengah (toko kelontong, kios, dan pasar tradisional) terutama permodalan dari pihak Lembaga Perbankan karena dibutuhkan jaminan yang rata-rata tidak dimiliki oleh usaha perdagangan tersebut. Untuk meningkatkan usahanya, para pedagang tersebut biasanya menggunakan modal keluarga atau renternir yang bunganya di atas bunga bank. Hambatan ini bukan menjadi masalah bagi usaha perdagangan besar maupun eceran yang berupa supermarket atau hypermarket karena umumnya usaha-usaha tersebut memang sudah mempunyai modal yang besar atau karena merupakan cabang atau gerai.
3. Dari sisi distribusi dan penyimpanan : belum optimalnya jalur distribusi akibat masih buruknya sarana infrastruktur yang berdampak pada terganggunya kelancaran arus barang dan orang terutama di luar pulau Jawa. Hal ini terutama untuk barang-barang yang membutuhkan kesegaran misalnya jenis sayuran, buah-buahan, maupun daging/ayam/ikan. Tempat penyimpanan atau gudang juga masih relatif sedikit. Untuk jenis usaha atau toko modern memang disyaratkan untuk mempunyai gudang atau tempat penyimpanan sendiri. Akan tetapi tidak semua jenis minimarket mempunyai tempat penyimpanan yang layak karena keterbatasan lahan dan biaya. Untuk jenis pasar tradisional atau kios hampir dipastikan tidak mempunyai tempat penyimpanan khusus.

4. Dari sisi pemasaran : masih lemahnya pengemasan, manajemen, maupun pemasaran dari usaha tersebut. Masih banyak barang-barang di toko/kios, pasar tradisional, atau minimarket yang belum memperhatikan soal pengemasan. Berbagai barang tersebut dipajang didepan pembeli dengan kondisi apa dayanya sehingga kurang menarik bagi pembeli. Manajemen toko juga kurang tertata dengan rapi sehingga masih terkesan tidak dijalankan dengan serius.
  5. Dari sisi regulasi pemerintah : masih ada beberapa keluhan dari pelaku usaha antara lain berupa pengenaan pajak atau retribusi yang cukup tinggi bagi daerah dimana pengenaan ini akan menambah biaya usaha. Selain itu, terkait dengan adanya otonomi daerah dimana jalur birokrasinya menjadi tidak efisien dan ada beberapa peraturan dari pemerintah pusat yang belum dijalankan oleh pemerintah daerah sehingga menghambat usaha perdagangan.
  6. Dari sisi koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha : kurangnya sosialisasi dan pelibatan Asosiasi di beberapa daerah dalam perumusan kebijakan atau peraturan di daerah tersebut.
  7. Hotel-hotel kecil milik masyarakat daerah atau milik pribumi mulai merasakan penurunan atau pengurangan jumlah tamu yang datang menginap karena banyak berdiri hotel-hotel besar dan asing yang relatif lebih bagus dan lebih diminati oleh masyarakat
- e. Tantangan Pengembangan Sektor

Sementara tantangan yang dihadapi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah :

1. Meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya permintaan akan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, dan jumlah penduduk kelas menengah yang berpotensi meningkatkan permintaan akan barang-barang kebutuhan, hotel, dan kunjungan ke restoran.
3. Merubah pola pikir masyarakat bahwa usaha ritel modern akan

- menggerus pasar tradisional, padahal segmen pasar maupun jenis barang dijual berbeda antara toko modern dan pasar tradisional
4. Penataan lokasi usaha ritel terutama ritel modern agar tidak berdampak negatif bagi pasar tradisional. Pembangunan pasar modern harus memperhatikan jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional dan pasar modern dengan pertokoan, koperasi dan pengusaha kecil sehingga dapat dihindari timbulnya persaingan yang tidak sehat.
  5. Pembangunan lokasi usaha dan hotel perlu memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
  6. Meningkatkan kemitraan perdagangan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi disertai dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar atas dasar prinsip saling menguntungkan.
  7. Potensi bisnis lokal sangat besar dan bisa dikembangkan. Usaha mikro kecil (UMK) berpeluang memunculkan usaha unggulan. Kebanyakan, peluang bisnis yang digarap adalah makanan dan minuman dalam kemasan yang bercita rasa lokal.
  8. Munculnya persaingan usaha yang dapat mendorong berkembangnya usaha di sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, namun ada beberapa daerah yang sudah cenderung lebih padat persaingannya
  9. Menciptakan tenaga kerja profesional yang mendukung usaha perdagangan, hotel, dan restoran melalui sertifikasi profesi
  10. Pentingnya perumusan dan implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah yang dapat mendukung kemajuan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
  11. Menciptakan kondisi perekonomian, sosial, dan ekonomi yang stabil serta kondusif untuk menarik investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
  12. Menggalakan promosi pariwisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
  13. Pelayanan konsumen yang lebih memuaskan Sektor perdagangan

merupakan sektor kunci yang dapat meningkatkan sektor perekonomian lainnya.

Perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjanjikan prospek yang cukup bagus dimasa mendatang. Dengan melihat semakin meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya upah minimum buruh di berbagai daerah maka daya beli masyarakat semakin meningkat didorong oleh berbagai kebutuhan yang semakin beragam baik kebutuhan akan barang maupun jasa. Peluang untuk mendirikan usaha tersebut antara lain adalah :

1. meningkatnya golongan kelas menengah (middle income) yang menjadi target/segmen pasar utama karena semakin meningkatnya tuntutan dan gaya hidup untuk berbelanja di toko modern,
2. meningkatnya laju pertumbuhan PDB, dan
3. faktor demografi, semakin bertambahnya jumlah penduduk.

**Data Realisasi Investasi di Kabupaten Garut  
Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2016 - 2017**

No	Sektor/sector	Tahun	
		2016	2017
I	Sektor Primer/Primary Sector	20.000.000.000	252.440.301.000
1	Tanaman Pangan & Perkebunan / Food Crops & Plantation	-	2.810.000.000
2	Peternakan / Livestock	20.000.000.000	249.630.301.000
3	Kehutanan / Forestry	-	-
4	Perikanan / Fishery	-	-
5	Pertambangan / Mining	-	-
II.	Sektor Sekunder/ Secondary Sector	-	608.205.440.000
1	Industri Makanan / Food Industry	-	14.530.000.000
2	Industri Tekstil / Textile Industry	-	135.000.000.000
3	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki / Leather Goods & Footwear Industry	-	31.433.000.000
4	Industri Kayu / Wood Industry	-	7.086.000.000
5	Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	-	1.750.000.000
6	Ind. Karet dan Plastik / Rubber and Plastic Industry	-	417.884.440.000
7	Ind. Logam, Mesin & Elektronik / Metal, Machinery & Electronic Industry	-	-

	Industri Lainnya / Other Industry	-	522.000.000
III.	Sektor Tersier/Tertiary Sector	3.314.209.718.857	2.776.100.543.710
1	Listrik, Gas dan Air / Electricity, Gas & Water Supply	2.356.725.000.000	953.923.674.746
2	Konstruksi / Construction	-	223.393.543.811
3	Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	25.550.000.000	345.681.786.854
4	Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant	202.264.000.000	99.415.987.500
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	-	41.840.000.000
6	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Business Activities	706.644.376.000	329.243.849.999
7	Jasa Lainnya / Other Services	23.026.342.857	782.601.700.800
	<b>Jumlah</b>	<b>3.334.209.718.857</b>	<b>3.636.746.284.710</b>



IKOPIN

## BAB VI

### Kondisi Akses Keuangan Daerah

Peran lembaga keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sebagai financial intermediaries yang membagi dana dari pemilik dana kepada sektor-sektor usaha yang produktif. Pembiayaan lembaga keuangan menuntut adanya peningkatan sektor produksi sehingga mendorong peningkatan produktivitas. Greenwood dan Jovanovic (1990) maupun King dan Levine (1993), serta masih banyak studi lainnya menunjukkan keterkaitan yang erat antara perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya pengembangan sektor keuangan adalah melalui perluasan akses keuangan. Dengan demikian, peningkatan produktivitas akan terjadi dalam lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Perkembangan jaringan kantor di Wilayah Garut mengalami penurunan sebesar 12 kantor, terlihat jumlah jaringan kantor perbankan di wilayah Garut pada tahun 2016 sebanyak 479 menurun menjadi 467. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah ATM serta kantor Kas.

**Tabel 1 Jumlah Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan di Kabupaten Garut**

<b>Jaringan Kantor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Kantor Pusat	5	5	5	5
Kantor Cabang	29	29	30	30
Kantor Cabang Pembantu	81	80	69	65
Kantor Kas	84	86	87	83
ATM	281	286	288	284

Tabel 2 Jumlah Perkembangan Agen di Kabupaten Garut

Nama Bank	Jumlah
Bank Mandiri	263
BNI	1.173
BRI	2.495
BTN	101
BTPN	3.511
Bank Sinarmas	7
Bank Bukopin	1
BRI Syariah	2
Bank Jabar Banten	22
BTPN Syariah	3.916
Bank Danamon	3
Bank Artha Graha	2
Total	11.496

Tabel 3 Komposisi Dana Pihak Ketiga (jutaan Rp)

Keterangan	2016	2017	2018
Kab Garut	4.365.827	5.058.781	5.667.419
Giro	554.524	646.840	704.541
Tabungan	2.829.526	3.260.108	3.709.755
Deposito	981.777	1.151.833	1.253.123

Tabel 4 Penyaluran Kredit (Jutaan Rp)

Keterangan	2016	2017	2018
Kab. Garut	6.841.782	7.464.492	8.071.376
Modal Kerja	2.305.850	2.725.364	3.085.787
Investasi	604.265	547.027	530.200
Konsumsi	3.931.667	4.192.101	4.455.389

**Tabel 5 Rasio jumlah penduduk terhadap akses LJK**

<b>Keterangan</b>	<b>%</b>
Jaringan Kantor	0,007%
Jaringan ATM	0,011%
Agen Asuransi	0,031%
Agen Laku Pandai	0,444%

**Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Nasabah BSA Laku Pandai**

<b>Nama Bank</b>	<b>Jumlah</b>
Bank Mandiri	257
BNI	274.787
BRI	63
BTN	
BTPN	64.471
Bank Sinarmas	1.092
Bank Bukopin	
BRI Syariah	
Bank Jabar Banten	256
BTPN Syariah	1
Bank Danamon	69
Bank Artha Graha	29
Total	341.025

**Tabel 7 Rekapitulasi Outstanding Nominal BSU Laku Pandai**  
(dalam Juta Rupiah)

<b>Nama Bank</b>	<b>Jumlah</b>
Bank Mandiri	
BNI	6.872,3
BRI	35,2
BTN	
BTPN	437,7
Bank Sinarmas	0,5
Bank Bukopin	
BRI Syariah	
Bank Jabar Banten	19,2
BTPN Syariah	
Bank Danamon	9,9
Bank Artha Graha	9,7
Total	7.384,4

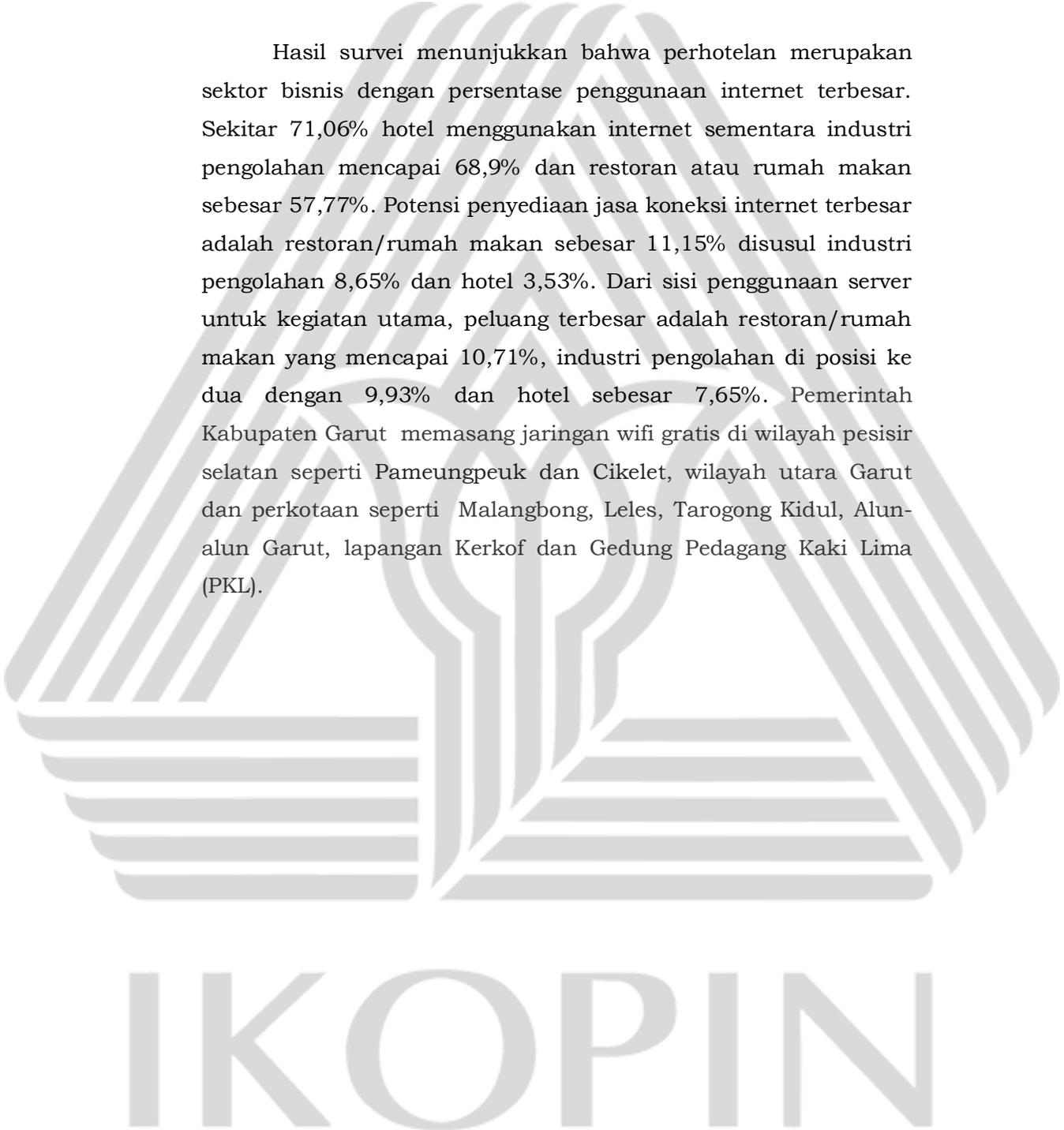
**Tabel 8 Rekapitulasi Perkembangan Aset perbankan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2015	6.161.415
2016	7.046.012
2017	7.692.871
2018	8.222.308

IKOPIN

## Cakupan Jaringan Internet

Hasil survei menunjukkan bahwa perhotelan merupakan sektor bisnis dengan persentase penggunaan internet terbesar. Sekitar 71,06% hotel menggunakan internet sementara industri pengolahan mencapai 68,9% dan restoran atau rumah makan sebesar 57,77%. Potensi penyediaan jasa koneksi internet terbesar adalah restoran/rumah makan sebesar 11,15% disusul industri pengolahan 8,65% dan hotel 3,53%. Dari sisi penggunaan server untuk kegiatan utama, peluang terbesar adalah restoran/rumah makan yang mencapai 10,71%, industri pengolahan di posisi kedua dengan 9,93% dan hotel sebesar 7,65%. Pemerintah Kabupaten Garut memasang jaringan wifi gratis di wilayah pesisir selatan seperti Pameungpeuk dan Cikelet, wilayah utara Garut dan perkotaan seperti Malangbong, Leles, Tarogong Kidul, Alun-alun Garut, lapangan Kerkof dan Gedung Pedagang Kaki Lima (PKL).



# IKOPIN

## Bab VII

# Kebijakan/ program Perluasan Akses Keuangan Daerah

Berdasarkan buku pedoman Tim percepatan Akses keuangan Daerah kebijakan/ perluasan akses keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi pembiayaan LJK kepada sektor UMKM produktif.

Contohnya : Mendorong pembiayaan perbankan (KUR) pada sektor pertanian kepada kelompok tani dengan melibatkan tokoh atau pemimpin petani di daerah.

- 2) Fasilitasi pembiayaan LJK untuk pengembangan usaha komoditas/potensi unggulan.

Contohnya : perluasan akses keuangan kepada peternak domba di Kabupaten Garut, perluasan akses keuangan kepada pelaku perdagangan, khususnya pada sektor pariwisata, Penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan UMi

- 3) Pengembangan Model Value Chain Akses Keuangan Sektor Produktif

Contohnya : Peran perempuan dalam peningkatan akses keuangan daerah melalui penguatan infrastruktur akses keuangan, pengembangan akses keuangan dimulai dari Desa.

4) Fasilitasi pembiayaan LJK melalui skim KUR

Contohnya: Perluasan Akses KUR Modal Kerja untuk UMKM, masyarakat Petani, Nelayan dan BUMDesa daerah terpencil, dalam rangka meningkatkan perekonomian di pedesaan, Fasilitasi penyaluran KUR dengan skema kluster bagi UMKM disektor pariwisata dan ekspor

5) Bank Wakaf Mikro

Seperti : Fasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan guru TPQ, Madin, dan Sekolah Minggu di Kabupaten Garut melalui literasi dan inklusi keuangan dengan perluasan akses keuangan melalui pembukaan rekening di BPR/ Bank

6) Perluasan akses keuangan melalui peningkatan agen Laku Pandai dan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).

Seperti : Peningkatan Layanan Keuangan bagi Masyarakat melalui Pembukaan maupun optimalisasi Agen Bank (Laku Pandai) bagi masyarakat daerah terpencil untuk meningkatkan layanan keuangan masyarakat melalui Transaksi Keuanga

7) Perluasan akses keuangan

Seperti : Memberikan edukasi tentang produk dan jasa keuangan lainnya (asuransi mikro, dana pensiun dan gadai) yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Pengembangan Perusahaan Efek di daerah, pemberdayaan pengusaha muda start up melalui akses keuangan di sektor pasar modal dan pegadaian dengan perluasan akses melalui pembukaan rekening tabungan.

## BAB VIII

# Analisis Perluasan Akses Keuangan Daerah

### 8.1 Efektifitas Pelaksanaan Program Perluasan Akses Keuangan Daerah

Banyak sekali negara yang berusaha untuk meningkatkan akses keuangan penduduknya ke institusi keuangan, tidak terkecuali Indonesia. Hasil Survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengungkapkan bahwa hanya 48% rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank, institusi keuangan, dan institusi nonkeuangan. Distribusi layanan jasa perbankan di Indonesia masih kurang merata, secara umum rendah di kawasan Indonesia Timur dan cukup tinggi di Pulau Jawa dan Bali. Untuk meningkatkan akses keuangan di Indonesia, disusunlah sebuah kerangka keuangan inklusif. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi yang dicapai dengan mengurangi angka kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan dengan membuat sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh penduduk di Indonesia.

Target utama program keuangan inklusif di Indonesia adalah tenaga kerja yang berpindah-pindah dan orang yang menetap di daerah terpencil. Program keuangan inklusif ini dimulai dari kategori kelompok yang sangat miskin, pekerja produktif namun masih miskin, mendekati miskin, dan tidak miskin (Banking Research and Regulation Department-Bank Indonesia, 2013). Saluran yang digunakan untuk keuangan inklusif di Indonesia melalui institusi keuangan, baik bank maupun nonbank, dan juga pemerintah. Sedangkan produk/jasa keuangan yang ditawarkan adalah simpanan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya.

Selain itu, dari pemerintah juga menawarkan keuangan publik melalui subsidi, insentif fiskal, program kesejahteraan sosial, cash transfer (bantuan langsung tunai/BLT) untuk orang miskin, dan lain sebagainya.

Strategi keuangan inklusif memiliki enam pilar, yaitu:

1. Financial Education (Pendidikan Keuangan), melalui program pendidikan untuk pelajar dan pekerja;
2. Public Financial Facility (Fasilitas Pinjaman pada Masyarakat), yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Sosial (Bansos);
3. Mapping on Financial Information, melalui Financial Identity Number (FIN) yaitu berupa pemberian nomor identitas pengguna jasa keuangan, Credit Rating (pemeringkat kredit);
4. Supporting Regulation/Policy (Peraturan dan kebijakan pendukung), seperti branchless banking (layanan bank tanpa kantor), "start-up" credit (kredit bagi pelaku usaha pemula seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)
5. Intermediary/Distribution Facility (fasilitas perluasan jasa keuangan) seperti program Tabunganku (no-frills account/tabungan tanpa biaya administrasi), branchless banking, "start-up" credit (kredit bagi pelaku usaha pemula seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi lahan;
6. Customer Protection (perlindungan konsumen), melalui mediasi perbankan, transparansi produk (Banking Research and Regulation Department-Bank Indonesia, 2013).

Selanjutnya dari kajian di berbagai negara, disadari bahwa perbankan tidak dapat melakukan kegiatan branchless banking dengan efisien secara sendiri, namun dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain, yaitu terutama perusahaan telekomunikasi. Selain itu, tujuan semula yang hanya berupaya untuk memperluas akses

keuangan, kini semakin berkembang menjadi upaya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka branchless banking diperluas menjadi Layanan Keuangan Digital (LKD). Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014, definisi LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif (Bank Indonesia, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha dan pemerintah di Kabupaten garut menyatakan bahwa menunjukkan beberapa temuan terkait dengan kesadaran responden terhadap produk perbankan. Hasil survei menunjukkan bahwa 76% dari total 100 responden mengetahui produk perbankan dan sisanya tidak mengetahui. Sebanyak 80,9% dari responden yang mengetahui produk perbankan menyatakan memanfaatkan produk perbankan tersebut. Proporsi ini menunjukkan masih terdapat sebagian kecil responden yang belum memiliki produk perbankan. Hasil survei mengenai pemanfaatan produk perbankan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan produk simpanan dan hanya sebagian kecil responden yang memanfaatkan produk lainnya seperti kredit, layanan pembayaran, maupun pengiriman uang.

Sebanyak 58% responden datang ke bank untuk bertransaksi dan sisanya (42%) tidak datang ke bank. Alasan utama yang menyebabkan keengganan nasabah untuk bertransaksi ke bank adalah masalah jarak tempuh, antrian yang panjang, dan terdapat media lain untuk bertransaksi seperti ATM maupun internet banking. Prosedur yang menyulitkan, biaya transaksi, dan ketidakcocokan produk perbankan dengan kebutuhan transaksi juga menjadi alasan keengganan nasabah datang ke bank meskipun dalam porsi yang relatif lebih kecil. Banyaknya responden yang menyatakan jarak tempuh sebagai faktor penghambat kedatangan

nasabah ke bank untuk bertransaksi menunjukkan kebutuhan layanan bank alternatif.

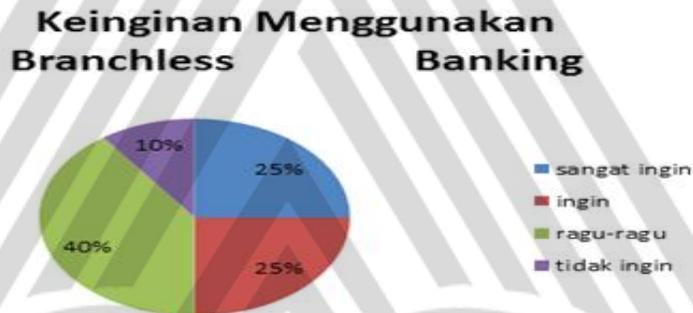
Jika saat ini sudah terdapat layanan perbankan berbasis kartu seperti kartu ATM/debit dan layanan perbankan berbasis internet, maka pengembangan layanan perbankan jarak jauh lainnya juga perlu mendapat perhatian. Fasilitas layanan bank tanpa kantor (branchless banking) dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat ditawarkan. Hasil survei yang berkaitan dengan kesadaran responden pada branchless banking menunjukkan bahwa hanya 5% responden yang telah mengetahui mengenai program branchless banking dan sisanya belum mengetahui. Setelah mendapat penjelasan singkat mengenai branchless banking, 25% responden menyatakan sangat ingin menggunakan fasilitas layanan branchless banking dan 25% menyatakan ingin. Sementara itu, 40% responden menyatakan ragu-ragu dan 10% responden menyatakan tidak ingin. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tersebut mengatakan bahwa program akses keuangan daerah masih kurang efektif dilaksanakan di Kabupaten garut hal tersebut dikarenakan :

1. Kurangnya sosialisasi terhadap laku pandai di wilayah Garut
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk perbankan, khususnya tabungan, asuransi dan efek
3. Akses dan lokasi kantor perbankan yang belum dapat memenuhi wilayah masyarakat di Kabupaten garut

## 8.2 Studi Kelayakan terhadap perluasan akses keuangan daerah

Dalam rangka perluasan akses keuangan daerah, lembaga perbankan menelurkan suatu inovasi kegiatan perbankan jenis baru inovasi tersebut disebut sebagai "Branchlessbanking" atau LAKU PANDAI, dimana LAKU PANDAI ini bertujuan untuk menawarkan alternative sistem distribusi keuangan baru dengan kata lain LAKU PANDAI membuat sebuah lembaga keuangan Pelaksanaan branchless bankingsebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif ini pihak perbankan dibantu

oleh pihak ketiga yang disebut agen. Berdasarkan kondisi tersebut studi kelayakan terhadap laku pandai atau keinginan masyarakat untuk menggunakan branchless banking di wilayah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :



Berdasarkan informasi melalui kuesioner yang didapatkan bahwa hampir 80% masyarakat belum mengetahui adanya layanan branchless banking seperti laku pandai, tetapi Setelah mendapat penjelasan singkat mengenai branchless banking, 25% responden menyatakan sangat ingin menggunakan fasilitas layanan branchless banking dan 25% menyatakan ingin. Sementara itu, 40% responden menyatakan ragu-ragu dan 10% responden menyatakan tidak ingin. Sehingga perluasan akses terhadap program laku pandai sangat layak untuk digunakan sebagai program perluasan akses keuangan daerah di Kabupaten Garut dengan cara :

1. Perlu dilakukan pemetaan lokasi dan sosialisasi di wilayah masyarakat yang belum banyak memiliki rekening bank. Daerah-daerah dengan jumlah kantor cabang bank, ATM, dan koperasi simpan pinjam dengan jumlah rekening yang masih rendah sangat potensial untuk menjadi lokasi sasaran agen Laku Pandai dan LKD.
2. Perlu kehadiran Jaringan Agen Manager (Agent Network Managemen) dari setiap bank di setiap kecamatan untuk meningkatkan kemampuan literasi keuangan sehingga semakin

banyak bertumbuh agen-agen dan pengguna layanan inklusi keuangan.

3. Perlu diberi insentif bila berhasil meningkatkan jumlah pemilik rekening masyarakat, sementara biaya dari berbagai layanan dibuka secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak ada biaya-biaya tambahan yang memberatkan.

c. Tantangan dalam memperluas akses keuangan daerah

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam memperluas akses keuangan daerah di wilayah Kabupaten Garut, diantaranya :

1. Kondisi demografis wilayah Garut  
kondisi wilayah Kabupaten garut yang sangat luas dan kultur yang beragam
2. Pemahaman masyarakat terhadap laku pandai
3. Infrastruktur pendukung seperti jaringan telekomunikasi dan telepon seluler dengan harga yang terjangkau
4. biaya yang lebih tinggi terutama untuk penarikan dan pembayaran menyebabkan Laku Pandai kehilangan keunggulan dalam hal biaya dibandingkan dengan layanan keuangan lain yang disediakan lembaga non-bank dan non-formal
5. Layanan Laku Pandai dan LKD dinilai masih tidak mudah untuk melakukan transaksi dibandingkan layanan keuangan non-formal

Kabupaten garut merupakan wilayah yang sangat unik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Barat. Wilayah yang memiliki kondisi alam dimulai dari laut, perkotaan serta dataran tinggi membuat kabupaten ini menempatkan sektor pertanian menjadi potensi unggulan di wilayahnya. Tetapi ada yang menarik disini bahwa Kabupaten Garut memiliki dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sama dengan wilayah Jawa Barat setelah Bupati Garut saat ini merubah tata ruang wilayah sehingga pada kenyataannya bahwa sektor

pertanian tidak menjadi syarat mutlak sebagai potensi unggulan daerah.

pengolahan domba Garut dengan baik dapat menjadikan Perubahan sektoral sangat memungkinkan di wilayah ini, pergeseran dari sektor primer menjadi sektor sekunder dapat difokuskan dalam rangka peningkatkan PDRB di wilayah ini, disamping itu dalam rangka mendukung wilayah Garut menjadi daerah potensi wisata, membuat sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diperhitungkan di wilayah Kabupaten Garut.



IKOPIN

# BAB IX

## REKOMENDASI

Banyak sekali negara yang berusaha untuk meningkatkan akses keuangan penduduknya ke institusi keuangan, tidak terkecuali Indonesia. Hasil Survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengungkapkan bahwa hanya 48% rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank, institusi keuangan, dan institusi nonkeuangan. Distribusi layanan jasa perbankan di Indonesia masih kurang merata, secara umum rendah di kawasan Indonesia Timur dan cukup tinggi di Pulau Jawa dan Bali. Untuk meningkatkan akses keuangan di Indonesia, disusunlah sebuah kerangka keuangan inklusif. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi yang dicapai dengan mengurangi angka kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan dengan membuat sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh penduduk di Indonesia.

Target utama program keuangan inklusif di Indonesia adalah tenaga kerja yang berpindah-pindah dan orang yang menetap di daerah terpencil. Program keuangan inklusif ini dimulai dari kategori kelompok yang sangat miskin, pekerja produktif namun masih miskin, mendekati miskin, dan tidak miskin (Banking Research and Regulation Department-Bank Indonesia, 2013). Saluran yang digunakan untuk keuangan inklusif di Indonesia melalui institusi keuangan, baik bank maupun nonbank, dan juga pemerintah. Sedangkan produk/jasa keuangan yang ditawarkan adalah simpanan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Selain itu, dari pemerintah juga menawarkan keuangan publik melalui subsidi, insentif fiskal, program kesejahteraan sosial, cash transfer (bantuan langsung tunai/BLT) untuk orang miskin, dan lain sebagainya.

Strategi keuangan inklusif memiliki enam pilar, yaitu:

7. Financial Education (Pendidikan Keuangan), melalui program pendidikan untuk pelajar dan pekerja;
8. Public Financial Facility (Fasilitas Pinjaman pada Masyarakat), yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Sosial (Bansos);
9. Mapping on Financial Information, melalui Financial Identity Number (FIN) yaitu berupa pemberian nomor identitas pengguna jasa keuangan, Credit Rating (pemeringkat kredit);
10. Supporting Regulation/Policy (Peraturan dan kebijakan pendukung), seperti branchless banking (layanan bank tanpa kantor), "start-up" credit (kredit bagi pelaku usaha pemula seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)
11. Intermediary/Distribution Facility (fasilitas perluasan jasa keuangan) seperti program Tabunganku (no-frills account/tabungan tanpa biaya administrasi), branchless banking, "start-up" credit (kredit bagi pelaku usaha pemula seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi lahan;
12. Customer Protection (perlindungan konsumen), melalui mediasi perbankan, transparansi produk (Banking Research and Regulation Department-Bank Indonesia, 2013).

Selanjutnya dari kajian di berbagai negara, disadari bahwa perbankan tidak dapat melakukan kegiatan branchless banking dengan efisien secara sendiri, namun dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain, yaitu terutama perusahaan telekomunikasi. Selain itu, tujuan semula yang hanya berupaya untuk memperluas akses keuangan, kini semakin berkembang menjadi upaya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka branchless banking diperluas menjadi Layanan Keuangan Digital (LKD). Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014, definisi LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat

teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif (Bank Indonesia, 2014).

Sebagian besar analisis dalam studi ini bersumber dari analisis data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada pelaku usaha yang mewakili wilayah pegunungan, dataran dan perkotaan di wilayah Kabupaten Garut. Penyebaran kuesioner dilakukan pada Maret-April 2019. Unit analisis dalam studi ini adalah kepala keluarga dengan total responden sebanyak 100 responden. Jumlah responden ini lebih besar dibandingkan ukuran sampel yang layak dalam studi, yaitu sebesar 30 hingga 500 unit sampel (Roscoe, 1982). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada responden yang dilengkapi dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang relevan. Pembagian responden terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dengan rincian seperti pada :

- d. Responden tersebar di Dataran Tinggi, meliputi :
  - 3. Desa Cikandang, Kec. Cikelet
  - 4. Desa Cigedung, Kec Cigedung
- e. Dataran Redah
  - 3. Desa Cigadog, Kec Sucinaraja
  - 4. Desa Mandalakasih, Kec Pameungpeuk
- f. Perkotaan
  - 3. Desa, Kec Kadungora
  - 4. Desa, Kec Leles

Alat analisis data yang digunakan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu statistik deskriptif, analisis faktor, dan analisis jalur (path analysis). Pada bagian pertama, statistik deskriptif berfokus pada analisis penggunaan layanan perbankan oleh masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik pie chart maupun grafik distribusi frekuensi. Analisis juga mencakup analisis hubungan antarvariabel dengan menggunakan cross tabulation. Analisis Faktor Studi ini

menggunakan analisis faktor untuk menentukan aspek terpenting yang dianggap penting dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan, khususnya layanan perbankan tanpa kantor (branchless banking). Analisis faktor yang digunakan adalah confirmatory model dengan varimax rotation yang mereduksi sepuluh variabel yang berhubungan dengan keuntungan, aksesibilitas, keamanan, dan kecocokan. Keuntungan, khususnya secara finansial, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank. Kenaikan biaya yang dibebankan pada nasabah menyebabkan nasabah tidak setia (Filip dan Anghel, 2009).

Secara tidak langsung, pembebanan biaya ini akan mengurangi keuntungan yang diperoleh nasabah. Keuntungan finansial juga berpengaruh terhadap pilihan bank oleh nasabah (Rehman dan Ahmed, 2008; Mokhlis et al., 2010; Hinson et al., 2013). Salah satu penyebab nasabah berpindah bank adalah perpindahan tempat domisili sehingga jarak ke bank menjadi semakin jauh. Filip dan Anghel (2009) serta Rehman dan Ahmed (2008) juga memasukkan aksesibilitas sebagai salah satu alasan dalam pemilihan bank oleh nasabah. Jarak menjadi salah satu faktor dalam memilih bank terutama pada nasabah bank ritel (Mokhlis et al., 2010). Chigamba dan Fatoki (2011) menyatakan hanya jarak ke rumah saja yang berpengaruh pada pilihan bank oleh nasabah. Pengaruh jarak tidak hanya mencakup jarak dari rumah ke bank, namun juga jarak dari tempat kerja ke bank (Torres dan Castells, 2006). Masalah keamanan, khususnya yang berkaitan dengan solvabilitas dan reputasi bank berpengaruh pada pilihan bank oleh nasabah (Torres dan Castells, 2006). Mokhlis et al. (2010) menyatakan bahwa aspek keamanan yang berpengaruh pada pilihan bank sangat berkaitan dengan rasa aman nasabah dalam menggunakan jasa bank. Hinson et al. (2013) juga menyatakan bahwa perasaan aman yang berkaitan dengan reputasi bank menjadi salah satu faktor penentu pilihan bank oleh nasabah. Aspek kecocokan juga menjadi salah satu faktor penentu bagi nasabah untuk memilih bank. Filip dan Anghel (2009) menyatakan bahwa kebiasaan merupakan salah satu faktor yang

menentukan pilihan bank. Status dan kelas sosial nasabah juga membuat pilihan bank menjadi berbeda antara masing-masing individu (Chepkangor, 2012). Bahkan dalam beberapa kasus, perilaku dari pegawai bank yang memberikan rasa nyaman kepada nasabah, turut berpengaruh pada pilihan bank oleh nasabah (Rehman dan Ahmed, 2008).

Analisis Jalur Path analysis atau analisis jalur pada awalnya dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1920-an untuk menganalisis model hipotesis pada studi phylogenetis.

Pola hubungan ditunjukkan dengan tanda panah yang menunjukkan hubungan sebab akibat antarvariabel, baik variabel bebas, perantara, maupun terikat yang dapat berjumlah satu atau lebih. Kemudian diestimasi koefisien jalur yang disebut "beta" yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model jalur tertentu. Koefisien-koefisien jalur yang merupakan keluaran dari regresi dapat digunakan untuk mengurai korelasi-korelasi dalam suatu model ke dalam pengaruh langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan jalur langsung dan tidak langsung yang direfleksikan dengan anak panah-anak panah dalam suatu model tertentu.

Studi ini menggunakan analisis jalur untuk mengestimasi hubungan antarvariabel dengan fokus pada variabel-variabel yang memengaruhi keputusan individu dalam menggunakan layanan branchless banking. Penggunaan analisis jalur dilakukan dengan menyesuaikan skala data yang ada. Data yang digunakan dalam analisis jalur pada studi ini adalah data ordinal. Penggunaan data ordinal dalam analisis jalur masih dapat dilakukan dengan kriteria minimal lima kategori (Streiner, 2005). Menurut Suliyanto (2011), data ordinal dan Likert yang telah ditransformasi dapat digunakan dalam analisis data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, setelah dilakukan penyesuaian terbatas pada data hasil survei, maka analisis jalur dapat dilakukan.

Variabel bebas dalam analisis jalur ini adalah karakteristik individu, kemudian variabel moderasi yang digunakan adalah frekuensi penggunaan layanan bank dan pemahaman mengenai branchless banking. Variabel karakteristik individu yang pertama adalah kabupaten yang menggambarkan jarak antara kabupaten tempat tinggal responden dengan pusat kegiatan ekonomi. Kedua, jumlah pengeluaran yang menggambarkan tingkat kekayaan masing-masing responden. Jumlah penghasilan setiap individu berpengaruh dalam pilihan penggunaan jasa perbankan (Chepkangor, 2012). Ketiga, pendidikan responden karena perbedaan pendidikan merepresentasikan tingkat sosial yang berbeda juga. Perbedaan status dan kelas sosial berpengaruh dalam pilihan jasa keuangan, khususnya perbankan (Chepkangor, 2012).

Interaksi variabel-variabel tersebut memengaruhi variabel terikatnya, yaitu keinginan individu menggunakan layanan branchless banking.

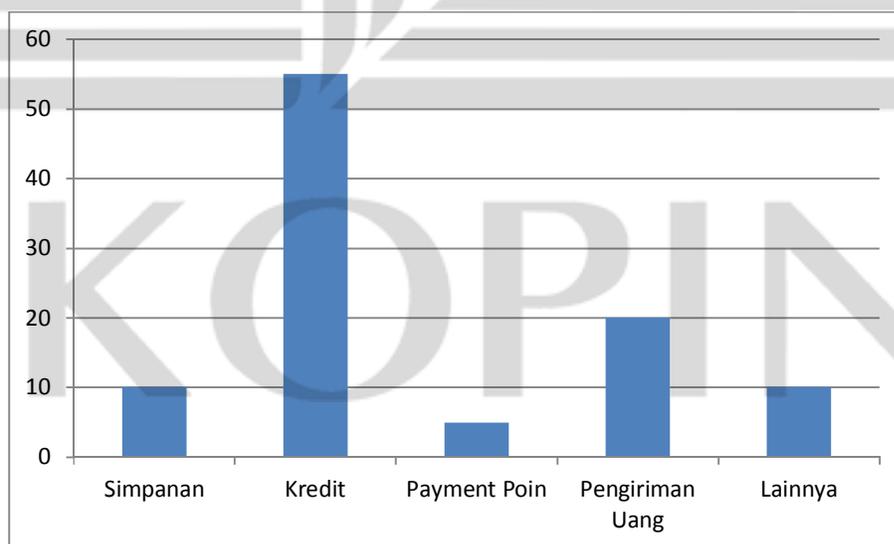
**Hasil dan Analisis Analisis Deskriptif** menunjukkan beberapa temuan terkait dengan kesadaran responden terhadap produk perbankan. Hasil survei menunjukkan bahwa 76% dari total 100 responden mengetahui produk perbankan dan sisanya tidak mengetahui. Sebanyak 80,9% dari responden yang mengetahui produk perbankan menyatakan memanfaatkan produk perbankan tersebut. Proporsi ini menunjukkan masih terdapat sebagian kecil responden yang belum memiliki produk perbankan. Hasil survei mengenai pemanfaatan produk perbankan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan produk simpanan dan hanya sebagian kecil responden yang memanfaatkan produk lainnya seperti kredit, layanan pembayaran, maupun pengiriman uang.

Sebanyak 58% responden datang ke bank untuk bertransaksi dan sisanya (42%) tidak datang ke bank. Alasan utama yang menyebabkan keengganan nasabah untuk bertransaksi ke bank adalah masalah jarak tempuh, antrian yang panjang, dan terdapat media lain untuk bertransaksi seperti ATM maupun internet banking. Prosedur yang menyulitkan, biaya transaksi, dan

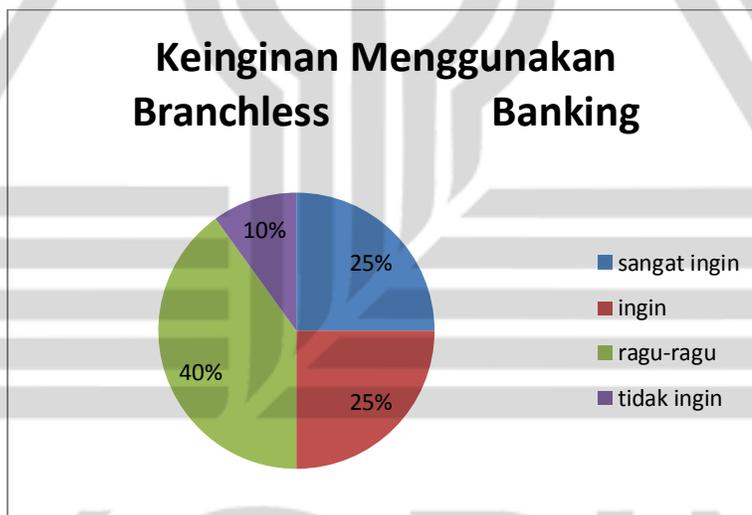
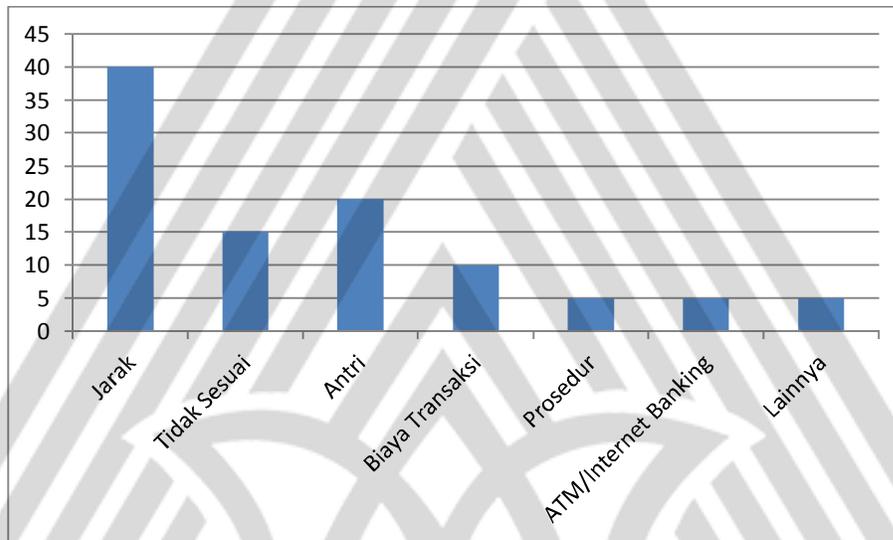
ketidakcocokan produk perbankan dengan kebutuhan transaksi juga menjadi alasan keengganan nasabah datang ke bank meskipun dalam porsi yang relatif lebih kecil. Banyaknya responden yang menyatakan jarak tempuh sebagai faktor penghambat kedatangan nasabah ke bank untuk bertransaksi menunjukkan kebutuhan layanan bank alternatif.

Jika saat ini sudah terdapat layanan perbankan berbasis kartu seperti kartu ATM/debit dan layanan perbankan berbasis internet, maka pengembangan layanan perbankan jarak jauh lainnya juga perlu mendapat perhatian. Fasilitas layanan bank tanpa kantor (branchless banking) dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat ditawarkan. Hasil survei yang berkaitan dengan kesadaran responden pada branchless banking menunjukkan bahwa hanya 5% responden yang telah mengetahui mengenai program branchless banking dan sisanya belum mengetahui. Setelah mendapat penjelasan singkat mengenai branchless banking, 25% responden menyatakan sangat ingin menggunakan fasilitas layanan branchless banking dan 25% menyatakan ingin. Sementara itu, 40% responden menyatakan ragu-ragu dan 10% responden menyatakan tidak ingin.

Pemanfaatan Produk Perbankan



### Alasan Nasabah Bank Tidak Datang ke Bank Untuk Bertransaksi



Proporsi ini menunjukkan peluang implementasi branchless banking menjadi semakin terbuka.

**Hasil dan Analisis Deskripsi analisis faktor** adalah melakukan uji Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan Bartlett untuk menentukan apakah estimasi dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Hasil estimasi menunjukkan nilai signifikansi uji KMO dan Bartlett sebesar 0,000

lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi alpha 1%. Hasil estimasi matriks Anti-Image menunjukkan bahwa seluruh 10 variabel memiliki nilai Measure Sampling Adequacy (MSA) lebih dari 0,5. Principal component analysis dengan rotasi Varimax telah diterapkan pada sepuluh variabel studi untuk mendapatkan faktor-faktor dasar. Delapan variabel memiliki muatan yang tinggi pada faktor pertama yang dinamakan dengan kualitas. Sementara itu, dua variabel memiliki muatan yang tinggi pada faktor kedua yang dinamakan dengan kecocokan.

Faktor kualitas mencakup aksesibilitas, keuntungan, dan keamanan. Variabel yang berhubungan dengan kualitas antara lain kecepatan transaksi, biaya yang lebih murah, kenyamanan transaksi, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, keamanan transaksi, rekening yang aman, dan kemudahan transaksi). Hasil survei juga menunjukkan bahwa kecepatan transaksi menjadi faktor yang paling penting dalam kategori kualitas. Dua variabel memiliki muatan yang tinggi pada faktor kedua, yaitu faktor kecocokan. Variabel pertama adalah kecocokan layanan branchless banking yang ditawarkan dengan tipe usaha responden. Variabel kedua adalah kecocokan layanan branchless banking yang ditawarkan dengan pribadi responden sebagai pengusaha. Apabila dibandingkan tingkat kepentingan dua faktor tersebut, maka faktor kualitas dipandang jauh lebih penting. Nilai modus untuk faktor kualitas sebesar 5, sementara nilai modus faktor kecocokan hanya sebesar 3.

#### Faktor 1 : Kualitas

Variabel	Factor Loading
Kecepatan transaksi	0,83
Biaya Murah	0,83
Kenyamanan Transaksi	0,84
Akses Dimana Saja	0,70
Akses Kapan Saja	0,74
Transfer Aman	0,85
Rekening Aman	0,87
Petunjuk Operasional Mudah	0,80

**Hasil dan Analisis estimasi analisis** jalur menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat melalui tiga jalur). Jalur pertama adalah dari peningkatan pengeluaran responden di mana akan meningkatkan keinginan mendapatkan layanan branchless banking. Jalur ini melalui frekuensi transaksi dan keaktifan bertransaksi di kantor bank sebagai variabel perantara. Jalur kedua adalah semakin jauhnya lokasi tempat tinggal responden menyebabkan penurunan keinginan responden mendapatkan layanan branchless banking. Jalur ini melalui keaktifan bertransaksi ke kantor bank. Jalur ketiga adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan mendorong keinginan mendapatkan layanan branchless banking.

Jalur ini melalui variabel frekuensi transaksi dan keaktifan bertransaksi ke kantor bank sebagai variabel perantara. Pengaruh kabupaten, pendidikan, jumlah pengeluaran, frekuensi bertransaksi di kantor bank, dan aktif bertransaksi perbankan dengan mendatangi kantor cabang bank secara bersama-sama terhadap keinginan menggunakan/memanfaatkan branchless banking secara gabungan adalah sebesar 0,040. Dari sisi lokasi tempat tinggal, masyarakat dibedakan menurut wilayah dataran tinggi, Rendah dan perkotaan. Berdasarkan lokasi tempat tinggal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi frekuensi dan keaktifan bertransaksi di bank dan keinginan menggunakan layanan branchless banking. Artinya, tidak terdapat perbedaan masyarakat yang tinggal di Perkotaan, dengan Dataran Rendah yang relatif jauh dari Garut Kota, misalnya Kecamatan Kadungora dan Leles dalam bertransaksi di bank dan keinginan menggunakan layanan branchless banking. Secara signifikan, jumlah pengeluaran memengaruhi keinginan menggunakan/memanfaatkan branchless banking melalui frekuensi transaksi dan aktif bertransaksi dengan total pengaruh yang diberikan adalah sebesar 0,020.

Masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran yang relatif lebih tinggi akan semakin sering datang ke bank dan bertransaksi, serta ingin memanfaatkan layanan branchless banking. Secara signifikan, pendidikan memengaruhi keinginan menggunakan/memanfaatkan branchless banking melalui frekuensi transaksi dan aktif bertransaksi. Pengaruh yang diberikan adalah sebesar 0,006. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan semakin sering datang ke bank dan aktif bertransaksi. Selain itu, kelompok masyarakat tersebut juga lebih berminat menggunakan layanan branchless banking dibanding kelompok masyarakat yang pendidikannya lebih rendah. Hasil estimasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan layanan branchless banking sangat diperlukan terutama bagi masyarakat dengan kualitas dan status sosial yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan layanan branchless banking. Sementara itu, lokasi responden yang semakin jauh dari pusat kegiatan ekonomi ternyata mengurangi kebutuhan akan layanan branchless banking. Hal ini diperkirakan berhubungan dengan ketidaktahuan responden akan jenis-jenis layanan perbankan.

Hasil estimasi dan analisis studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi dan model, yaitu :

Pertama, akses masyarakat pada lembaga keuangan dan keinginan melakukan transaksi perbankan tanpa datang ke kantor bank (branchless banking) berbeda-beda untuk setiap kondisi sosial ekonominya. Jauh dekatnya lokasi tempat tinggal masyarakat dari pusat aktivitas perekonomian tidak secara signifikan memengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa perbankan. Sedangkan tingkat strata ekonomi masyarakat yang diukur dari tingkat pengeluaran secara signifikan memengaruhi keinginan bertransaksi di bank dan keinginan memanfaatkan layanan branchless banking. Semakin besar tingkat pengeluaran masyarakat, semakin sering datang ke kantor bank dan aktif bertransaksi, serta berkeinginan untuk memanfaatkan layanan

branchless banking. Dari sisi tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin sering datang dan bertransaksi di bank, serta ingin memanfaatkan layanan branchless banking.

Kedua, berdasarkan hasil studi ini terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya memperluas akses lembaga keuangan yang salah satunya melalui layanan branchless banking. Faktor tersebut adalah kualitas dan kecocokan. Faktor kualitas dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan kecocokan. Faktor kualitas yang dianggap paling penting adalah kecepatan transaksi.

Berdasarkan studi di atas, beberapa rekomendasi untuk otoritas perbankan dan pelaku usaha di sektor perbankan adalah :

Pertama, upaya memperluas layanan perbankan melalui branchless banking dapat terus ditingkatkan, namun diperlukan upaya peningkatan sosialisasi atau promosi terutama untuk golongan masyarakat golongan menengah ke bawah dan yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Kedua, peningkatan layanan perbankan branchless banking dapat dilakukan dengan meyakinkan masyarakat akan kualitas layanan tersebut, khususnya dalam hal kecepatan transaksi.

#### Activity Branchless Banking Model



*Activity Branchless Banking Model* membagi kegiatan di dalam menjadi dua kategori utama, yaitu *primary activities*, dan *support activities*.

*Primary value activities* terdiri dari:

1. *Development (Bank)*: kegiatan mengelola awal dan pengembangan sumber daya serta mendistribusikannya untuk keperluan peningkatan Number Of Account
2. *Operations (Penyedia Jaringan)*: mentransformasi inputan sehingga dapat terlayani sampai ke pelosok daerah bahkan sampai ke Desa
3. *Sales (Agen)*: kegiatan mendistribusikan *goods* dan *services* kepada *customers*
4. Tokoh: menyediakan *customer support* setelah kegiatan penjualan serta berperan sebagai agent of change dalam suatu wilayah (*after sales*).

Sementara itu, *support value activities* terdiri dari:

1. *Infrastructure (Pemerintah Daerah)*: termasuk kegiatan pengembangan struktur organisasi, lingkungan, serta perumusan strategi dan sistem.
2. *Regulatory Control (OJK)*: mengawasi dan mensupport kegiatan Branchless Banking untuk memberikan *value* lebih bagi jalannya bisnis.

Road Map Pengembangan Perluasan Akses Keuangan Daerah



Lampiran :



Kegiatan FGD Garut 23 April 2019



Kegiatan FGD Garut 23 April 2019

IKOPIN



Kegiatan FGD Garut 23 April 2019



No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
15	Beni Soga. S	Biner Perania	
17	RULIN MIRHADI	OK KR 2 Jabar	
18	Vati, R	setra	
19	Billy. C	DJS	
20	Fajar D. Trinatih	Bank bjb	
21	Bambang Hari S	Bogor	
22	Aris Rasmawan	BMMD	
23	Anna Yuliana	DMMD	
24	Irma Hermonawati	Diskamak	
25	Stephan Yan	Dislumb	
26	Dati. Nurfaei	Dinas Pertanian	
27	KARATIYADI	BPS Garut	
28	Emni H	DISTRIBUSI BAH ESDM	
29	AELIS TARULYUFIN	KADIN GARUT	



No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	H. RUDY GUNAWAN	BUPATI	
2	KWIN MIRHADI	OK	
3	MIFTAH BUDIMAN	OK	
4	HETA NUGRAHA	ISEI	
5	M. Ardi Nuri. H	ISEI	
6	I GUSTIYUDI	BPS GARUT	
7	Dati. W	Dinas Pertanian	
8	Solijon Yuni	Dinas Perikanan	
9	Irma Hermonawati	Diskamak	
10	Emni Herfoni	DISTRIBUSI BAH ESDM	
11	Purwaningsih	by Eluwan Setan	
12	Pri Mulyawan	Ka. Adip Ucan	
13	Eko Yulianto	MfKa. BAHASEK	
14	TANI T-S	DISTRIBUSI	
15	BUDI B.	DISTRIBUSI	

## DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolyn, 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Bachrul, Elmi, 2004. *Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (urbandevelopment finance) Kota Prabumulih, Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.8, No.1. Maret.

Radi A Gani. 2002. *Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Salim, Emil. 1992. *Pembangunan Berkelanjutan Mencari Format Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, Sondang P. 1989. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Hortikultura di Kabupaten Tasikmalaya dan Garut [Skripsi]. Bogor (ID): IPB. Yoong J. 2008. *Financial Illiteracy and Stock Market Participation: Evidence from the RAND American Life Panel*. Pension

Tsai K. 2004. *Imperfect Substitutes: The Local Political Economy of Informal Finance and Microfinance in Rural China and India*. *World Development*. 32(9): 1487-1507. Research Council Working Paper No. 2010-29.

Cole S, Sampson T, Zia B. 2009b. *Financial Literacy, Financial Decisions, and the Demand for Financial Services: Evidence from India and Indonesia*. Harvard Business School Working Paper.

IKOPIN